



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur menggunakan indikator yang bersifat progresif.

16. Permasalahan ...

16. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Arah Pembangunan adalah komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan.
19. Indikator Utama Pembangunan adalah ukuran keberhasilan pencapaian arah pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJPD Provinsi Banten; dan
 - c. RTRW.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) RPJPD Tahun 2025-2045 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2045.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


IMAM RANA HARDIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6,60) / (TAHUN 2024)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	11
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	11
2.1.1 Geografi.....	12
2.1.2 Demografi	26
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	30
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	30
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	39
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	41
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	41
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	45
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	49
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	54
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	60
2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SERANG TAHUN 2008-2025.....	63
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	75
2.6.1 Proyeksi Demografi	76
2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana	80
2.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA SERANG	87
2.7.1 Kedudukan Kota Serang Secara Regional	88
2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kota Serang	90
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	96
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	97
3.2 ISU-ISU STRATEGIS	114
3.2.1 Isu Strategis Internasional	115
3.2.2 Isu Strategis Nasional	120
3.2.3 Isu Strategis Daerah	124
3.2.4 Isu Strategis Kota Serang.....	144
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	154
4.1 VISI KOTA SERANG	156

4.2	MISI KOTA SERANG.....	163
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	169
5.1.	ARAH KEBIJAKAN KOTA SERANG TAHUN 2025-2045	172
5.1.1	Misi Kesatu: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial)	173
5.1.2	Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi)	178
5.1.3	Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik	183
5.1.4	Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	188
5.1.5	Misi Kelima: Sarana dan Prasarana kewilayahan yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	192
5.2.	Sasaran Pokok Kota Serang 2025-2045	196
5.2.1	Sasaran Pokok Misi Kesatu Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial)	197
5.2.2	Sasaran Pokok Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi)	198
5.2.3	Sasaran Pokok Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik (Transformasi Tata Kelola)	199
5.2.4	Sasaran Pokok Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	200
5.2.5	Sasaran Pokok Misi Kelima: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	202
5.3	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)	209
BAB VI	PENUTUP	217
LAMPIRAN	METADATA RPJPD KOTA SERANG TAHUN 2025-2045	221

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan (km ²) Tahun 2023.....	12
Tabel II.2	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2023	16
Tabel II.3	Suhu Udara Kota Serang Tahun 2023	16
Tabel II.4	Kelembapan Udara Kota Serang Tahun 2023.....	17
Tabel II.5	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2021 – 2023 (m ³)	18
Tabel II.6	Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang	19
Tabel II.7	Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan	20
Tabel II.8	Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2018 – 2022	21
Tabel II.9	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2018 – 2023	22
Tabel II.10	Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pangan Kota Serang Tahun 2018-2022	23
Tabel II.11	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Serang Tahun 2018-2022.....	24
Tabel II.12	Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah Kota Serang Tahun 2018- 2022	26
Tabel II.13	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023	28
Tabel II.14	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2008-2023	28
Tabel II.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023 (Jiwa)	28
Tabel II.16	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha atau Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang Tahun 2013- 2023 (%) II -27	31
Tabel II.17	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kota Serang Tahun 2008-2023	34
Tabel II.18	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Serang Tahun 2013-2023	36
Tabel II.19	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Kota Serang Tahun 2019- 2022	39

Tabel II.20	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender, Kota Serang Tahun 2019-2023.....	40
Tabel II.21	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)	42
Tabel II.22	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%)	43
Tabel II.23	Indeks Pendidikan Kota Serang Tahun 2020-2023	47
Tabel II.24	Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan di Kota Serang Tahun 2020-2023	47
Tabel II.25	Angka Literasi dan Numerasi untuk Satuan Pendidikan dan Peserta Didik di Kota Serang Tahun 2021-2023.....	48
Tabel II.26	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023..	50
Tabel II.27	Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kota Serang Tahun 2023	51
Tabel II.28	Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kota Serang Tahun 2019-2023.....	52
Tabel II.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Tahun 2018-2022	53
Tabel II.30	Capaian Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2019-2022	54
Tabel II.31	Pemakaian Tenaga Listrik Kota Serang Tahun 2019-2023 (Rupiah)	55
Tabel II.32	Posisi Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2021 dan 2022	56
Tabel II.33	Lama Proses Perizinan Kota Serang	57
Tabel II.34	Angka Kriminalitas Kota Serang Tahun 2018 – 2023	59
Tabel II.35	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Serang Tahun 2019-2023.....	60
Tabel II.36	Jumlah Demonstrasi di Kota Serang Tahun 2018 – 2023.....	60
Tabel II.37	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2018-2023.....	61
Tabel II.38	Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kota Serang Tahun 2018 – 2023.....	61
Tabel II.39	Nilai IKM Kota Serang Tahun 2019 – 2023.....	62
Tabel II.40	Capaian Realisasi AKIP Kota Serang Tahun 2019 – 2022	62
Tabel II.41	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2019 – 2023	63

Tabel II.42	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Serang Tahun 2008-2022	65
Tabel II.43	Kriteria Penilaian Kinerja	66
Tabel II.44	Periode I Tahun 2008-2013	67
Tabel II.45	Periode II Tahun 2014-2018	68
Tabel II.46	Periode III Tahun 2018-2023	71
Tabel II.47	Periode IV Tahun 2024-2026	73
Tabel II.48	Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045	78
Tabel II.49	Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045 berdasarkan Jenis Kelamin	79
Tabel II.50	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang	79
Tabel II.51	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	83
Tabel II.52	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	84
Tabel II.53	Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Serang	85
Tabel II.54	Proyeksi Timbulan Sampah Kota Serang	86
Tabel II.55	Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Serang	87
Tabel II.56	Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Serang	88
Tabel II.57	Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat sebagai Penunjang Pusat Pertumbuhan	94
Tabel II.58	Capaian Target Komponen, Sub Komponen, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikasi Program RTRW	95
Tabel III.1	IPM Kota Serang dibandingkan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.....	101
Tabel III.2	Angka Partisipasi Sekolah Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019-2021	102
Tabel III.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2022	103
Tabel III.4	Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022	104
Tabel III.5	Rata-rata Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	105
Tabel III.6	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022	106
Tabel III.7	Gini Rasio Kabupaten/Kota di provinsi Banten Tahun 2021-2023.....	106
Tabel III.8	Jumlah Tamu Asing dan Domestik Berdasarkan Akomodasi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2020	107

Tabel III.9	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2023.....	108
Tabel III.10	IPM Kota Serang dibandingkan dengan wilayah sekitar Tahun 2019-2023.....	109
Tabel III.11	Angka Partisipasi Sekolah Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019-2021.....	110
Tabel III.12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar	112
Tabel III.13	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Serang tahun 2019-2023.....	113
Tabel III.14	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang dan Provinsi Banten ..	115
Tabel III.15	Indeks SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023	115
Tabel III.16	Penyelarasan 17 Arah Pembangunan Nasional dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	127
Tabel III.17	Penyandingan Kerangka Kerja Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB dengan Permasalahan RPJPD Kota Serang	132
Tabel III.18	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang	144
Tabel III.19	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang	145
Tabel IV.1	Persandingan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang Tahun 2025- 2045	165
Tabel V.1	Arah Kebijakan Transformasi Misi 1 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	179
Tabel V.2	Arah Kebijakan Transformasi Misi 2 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	184
Tabel V.3	Arah Kebijakan Transformasi Misi 3 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	190
Tabel V.4	Arah Kebijakan Transformasi Misi 4 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	194
Tabel V.5	Arah Kebijakan Transformasi Misi 5 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	198
Tabel V.6	Misi, Arah Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Kota Serang.....	206
Tabel V.7	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) Kota Serang.....	212
Tabel V.8	Visi, Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2045	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keselarasan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang	2
Gambar I.2	Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	7
Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Kota Serang.....	13
Gambar II.2	Peta Topografi Kota Serang.....	14
Gambar II.3	Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2015-2023	19
Gambar II.4	Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023	27
Gambar II.5	Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023	30
Gambar II.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2013-2022	31
Gambar II.7	Inflasi di Kota Serang Tahun 2020-2023 (%).....	33
Gambar II.8	Indeks Pembangunan Manusia di Kota Serang Tahun 2008-2023	34
Gambar II.9	Tingkat Kemiskinan Kota Serang Tahun 2013-2023	35
Gambar II.10	Indeks Gini Kota Serang Tahun 2013-2023	37
Gambar II.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2013-2023	38
Gambar II.12	PDRB per Kapita Kota Serang Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Kapita)	45
Gambar II.13	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Serang Tahun 2021	46
Gambar II.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Serang Tahun 2019-2023	49
Gambar II.15	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2019-2023	51
Gambar II.16	Nilai Total Investasi di Kota Serang Tahun 2013-2023 (dalam trilyun rupiah)	58
Gambar II.17	Capaian Indeks SPBE Kota Serang Tahun 2021 – 2023	64
Gambar II.18	Rata-rata Hasil Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode RPJMD Kota Serang	66
Gambar II.19	Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2025-2045	80
Gambar II.20	Ilustrasi Konsep Pusat Pertumbuhan	89
Gambar II.21	Peta Administrasi Kota Serang.....	90
Gambar II.22	Peta Hirarki Struktur Ruang Kota Serang.....	92
Gambar II.23	Kawasan Strategis Kota Serang	93

Gambar III.1	Permasalahan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.....	100
Gambar III.2	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	116
Gambar III.3	Megatren Dunia 2045.....	117
Gambar III.4	Visi Indonesia Emas 2045	124
Gambar III.5	17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045	126
Gambar III.6	Visi & Misi RPJPD Provinsi Banten.....	127
Gambar III.7	Penyandingan Permasalahan RPJPD Provinsi Banten dan Kota Serang Tahun 2025-2045.....	131
Gambar III.8	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kota Serang.....	136
Gambar III.9	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang	145
Gambar III.10	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang.....	146
Gambar III.11	Rencana Pola Ruang Kota Serang.....	146
Gambar IV.1	Kerangka Logis Perumusan Visi Kota Serang 2025-2045	160
Gambar IV.2	Alur Keterkaitan Pokok Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045	161
Gambar IV.3	Keterkaitan Pokok Visi dengan Sasaran Visi Kota Serang	164
Gambar IV.4	Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Banten, dan Visi Kota Serang Tahun 2025-2045	164
Gambar IV.5	Keterhubungan antara Strategi Transformasi Nasional, Pokok Visi dan Misi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 .	166
Gambar V.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang.....	172
Gambar V.2	Arah Kebijakan berdasarkan Transformasi Sosial/Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan di Kota Serang 2025-2045.....	176
Gambar V.3	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi/Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Kota Serang 2025-2045.....	181
Gambar V.4	Arah Kebijakan Mewujudkan Tata Kelola Kota Serang 2025-2045	186
Gambar V.5	Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kota Serang 2025-2045	191
Gambar V.6	Arah Kebijakan berdasarkan Misi Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan di Kota Serang 2025-2045	196

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Kota Serang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kesultanan Banten yang telah ada semenjak abad ke-16. Secara geografis, Kota Serang berada di jalur utama yang menghubungkan Jawa-Sumatera dan daerah-daerah strategis di pulau Jawa bagian Barat. Sebelum berdiri sebagai daerah otonomi baru, Kota Serang sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Serang. Kelahiran Kota Serang juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Dengan kata lain, Kota Serang merupakan daerah yang diperkenankan hadir disebabkan urgensitasnya sebagai suatu wilayah.

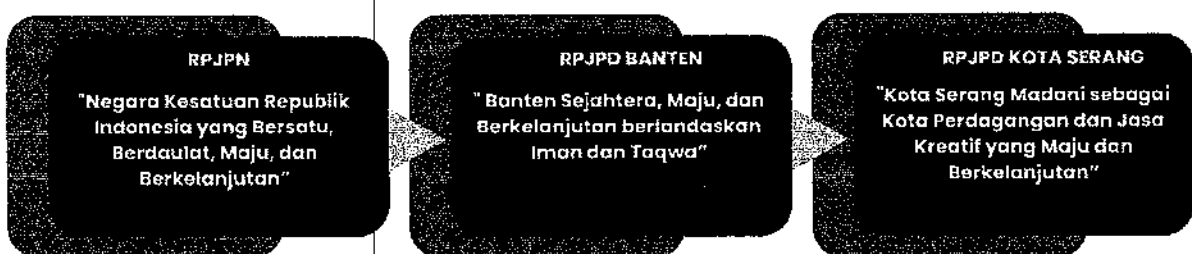
Kota Serang memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari kekayaan warisan kebudayaan dan juga kuatnya identitas sebagai wilayah yang madani. Pada tahun 2022, Kota Serang digadang-gadang akan menjadi *"The City of Heritage"* sebuah *tagline* yang menggambarkan keseriusan pemerintah dan masyarakat Kota Serang untuk menunjukkan keunggulannya. Keberadaan Masjid Agung Banten menunjukkan identitas masyarakat Kota Serang yang agamis dan beradab. Selain ragam warisan budaya yang dimilikinya, Kota Serang juga sedang berbenah dan bertransformasi menjadi *"Smart City"* dengan merencanakan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, E-Governance, dan infrastruktur digital.

Dengan potensi, sumber daya dan prestasi yang dimiliki, Pemerintah Kota Serang perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Pembuatan kebijakan pembangunan yang memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan ini menjadi panduan dalam mengarahkan dan menekankan strategi pembangunan daerah, karena perencanaan yang baik akan membentuk landasan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, peran signifikan dari perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Sebagai ibu kota Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang memiliki peran yang signifikan dan strategis serta ekonomis dalam penyediaan

layanan dan infrastruktur yang mendukung berbagai sektor pembangunan. Dengan mempertimbangkan potensi Kota Serang sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh para pengguna moda transportasi darat, keamanan dan kenyamanan yang mampu ditawarkan akan memberikan pengaruh yang signifikan pada capaian kinerja pembangunan provinsi dan nasional. Hal ini sangat relevan mengingat Kota Serang sebagai salah satu pintu gerbang menuju Pulau Jawa dari arah barat dan menjadi wilayah pendukung bagi masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dengan pertimbangan di atas, pengembangan rencana pembangunan di Kota Serang sangat layak untuk mendapatkan perhatian utama dan diselaraskan dengan pembangunan di Provinsi Banten dan Nasional. Sebagaimana termuat dalam keselarasan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang berikut :

Gambar I.1
Keselarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten
dan RPJPD Kota Serang



Atas kebutuhan perencanaan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses perencanaan pembangunan bersifat menyeluruh dengan tujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana pembangunan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya juga diamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemantauan dan evaluasi adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung pengendalian pembangunan, perlu dilakukan monitoring guna memantau perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dan mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang

membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pencapaian kegiatan (*output/outcome*) dari rencana yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, pembangunan Kota Serang pada periode pembangunan jangka panjang tahun 2008-2025 dengan visi “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025” telah dilaksanakan dengan baik. Dari enam indikator kinerja makro masih terdapat satu indikator yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19 di tahun 2020, sedangkan indikator lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian “TINGGI”. Capaian ini tentu masih dapat terus dioptimalkan dengan memperhatikan berbagai faktor penghambat pembangunan di Kota Serang. Oleh karena itu, melalui penyusunan dokumen RPJPD Kota Serang tahun 2025-2045 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan isu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Penyusunan RPJPD ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18, yang menetapkan bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD sebelumnya. Penyusunan dokumen RPJPD bertujuan untuk memberikan dasar acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Dokumen ini esensialnya mencakup arah kebijakan dan sasaran utama pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mengacu dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan SEB MDN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.2.1/3674/SJ dan No. 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-

2045 maka RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 disusun untuk membantu pencapaian RPJPD Provinsi Banten sebagai upaya pencapaian RPJPN dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJPD. Penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 telah memperhatikan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Serang untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Terkait hal tersebut, disusunlah dokumen acuan perencanaan untuk Kota Serang. Perencanaan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan memperhitungkan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kota Serang untuk dua puluh tahun mendatang dapat direalisasikan melalui penyusunan dokumen RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi *stakeholders* dan Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang dalam periode 2025-2045. Adapun RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

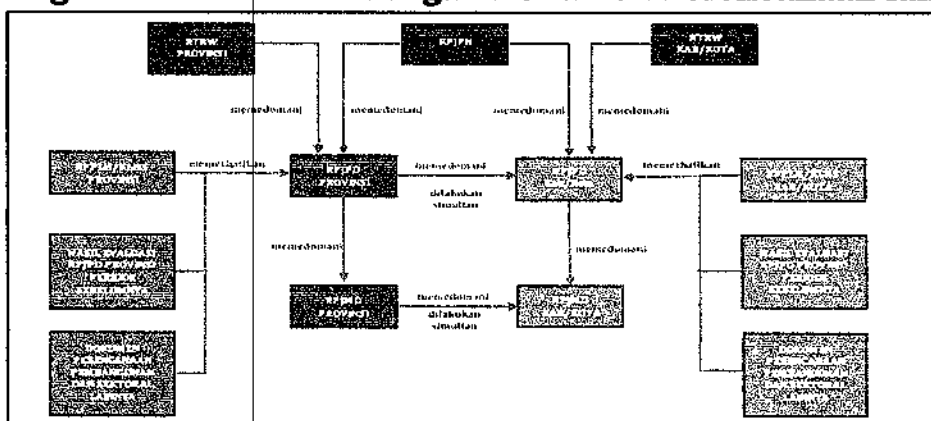
1. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilu;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Kota Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Serang, analisis isu-isu strategis, visi dan misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang;

5. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Wali Kota setiap 5 tahun;
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 perlu disesuaikan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang bersinergi dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk RTRW, KLHS, dan RPJPD Provinsi. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara singkat, dokumen RPJPD diimplementasikan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan melalui RKPD, dan selanjutnya RKPD ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambar 1.2
Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

a. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dan RPJPN

RPJPD Kota Serang perlu mengacu pada RPJPN untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang langsung terkait dengan wilayah Kota Serang. Dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan harus didasarkan pada isu-isu dan strategi

pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dan RPJPD Provinsi Banten

RPJPD Kota Serang perlu mengikuti dan menyelaraskan dengan RPJPD Provinsi Banten untuk menciptakan sinergi dan keselarasan dalam kebijakan dan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Banten agar tercipta sinkronisasi kebijakan yang efektif. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pemerintah Kota Serang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan antara RPJPD dan RTRW Kota Serang

Penyusunan RPJPD Kota Serang harus mempertimbangkan RTRW Kota Serang. Hal ini dikarenakan strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang terdapat dalam RPJPD Kota Serang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RTRW. RTRW berfungsi sebagai panduan dalam menentukan lokasi pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Pendekatan ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan, di mana perhatian khusus diberikan pada pembangunan di kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan pada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu, mempertimbangkan kondisi dan potensi wilayah, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dengan RPJMD Kota Serang

Dokumen RPJPD memberikan arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD. Visi, misi, dan program prioritas kepala daerah harus memedomani RPJPD, dengan demikian tetap terjaga kesinambungan pembangunan daerah selama 20 tahun walaupun terdapat pergantian kepala daerah. RPJMD akan menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah

dimuat dalam RPJPD, sehingga visi RPJPD dapat diwujudkan di akhir masa pembangunan jangka panjang. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diturunkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RPJPD Kota Serang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Serang sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan dengan masing-masing menegaskan prioritas.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

LAMPIRAN

Memuat Definisi Operasional Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan seluruh daerah merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hierarki dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD menjadi bagian tertinggi dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebab dokumen ini sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan yang lain. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki periode pembangunan 20 tahun. Hal tersebut menjadikan dokumen RPJPD ini sebagai dasar serta menjadi acuan relevansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan hingga mewujudkan harapan dari masyarakat daerah.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Serang menyajikan kondisi capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum namun tetap komprehensif dengan menampilkan tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah diselesaikan. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada tahun akhir perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Serang. Selanjutnya, analisis gambaran umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang tahun 2025-2045 dengan tetap memperhatikan berbagai pedoman dan acuan dari peraturan maupun kajian atau dokumen penting lainnya.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Keterkaitan yang erat antara aspek geografis dan demografis menjadi landasan vital bagi perencanaan masa depan Kota Serang. Dimensi geografis memberikan dasar fisik, sementara dimensi demografis menggambarkan perincian karakteristik penduduk. Kedua aspek ini menjadi poin sentral dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang substansial dan berkelanjutan untuk pengembangan Kota Serang.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi merinci peran strategis suatu daerah, mengidentifikasi potensi sumber daya alam, dan memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup serta ancaman kebencanaan, termasuk ancaman perubahan iklim.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Serang sebagai salah satu kota dari 8 (delapan) kota/kabupaten di Provinsi Banten, memiliki luas wilayah 265,787 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau. Kota Serang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Serang yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan terbagi atas 67 (enam puluh tujuh) kelurahan, dengan rincian luas wilayah menurut kecamatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

Tabel II.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan (km²) Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah
Kecamatan Curug	38,96
Kecamatan Walantaka	36,56
Kecamatan Cipocok Jaya	34,10
Kecamatan Serang	26,55
Kecamatan Taktakan	61,16
Kecamatan Kasemen	68,85

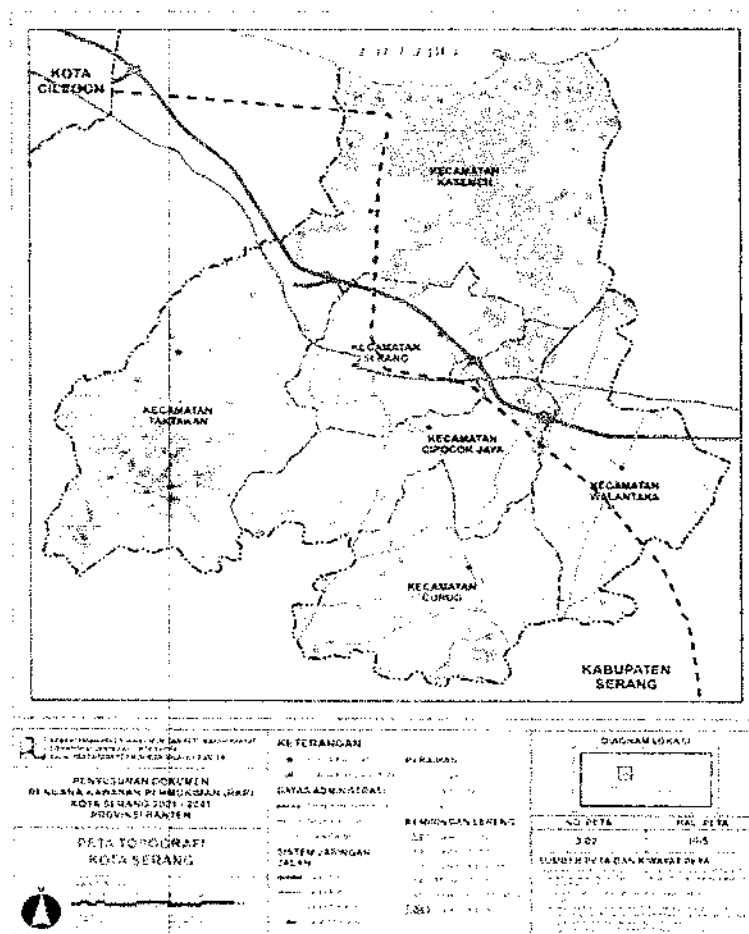
Sumber: RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040, 2020

Distribusi luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu: Kecamatan Curug 38,96 km², Kecamatan Walantaka 36,56 km², Kecamatan Cipocok 34,10 km², Kecamatan Serang 26,55 km², Kecamatan Taktakan 61,16 km², dan Kecamatan Kasemen 68,85 km². Secara administratif batas-batas wilayah Kota Serang meliputi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringinkurung, dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

banyak terdapat pada 8-15% dengan luas sebesar 5.873,31 Ha, kemiringan lahan tersebut paling banyak berada di Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug. Kemiringan paling banyak kedua yaitu dengan kemiringan sebesar 0-3% dengan luas sebesar 3.020,72 Ha, kemiringan tersebut paling banyak tersebar di Kecamatan Kasemen. Kemudian untuk kemiringan lahan yang curam dengan kemiringan >45 % memiliki luasan sebesar 134,75 Ha, kemiringan lahan ini hanya ada di Kecamatan Taktakan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Gambar II.2
Peta Topografi Kota Serang



Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2021-2041

4. Kondisi Geologi

Kota Serang sebagian besar wilayahnya terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai. Secara geologis Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan. Bagian terbesar adalah jenis batuan *pretertiary sediments* dan batuan aluvium, selain itu terdapat sedikit daerah termasuk batuan *Young Quaternary Volcanic Products*. Adapun jenis tanah yang terdapat di Kota Serang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis tanah Aluvial yang merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan, jenis tanah ini paling banyak berada di wilayah Serang Utara dan memiliki manfaat untuk bidang pertanian. Kemudian paling banyak tersebar di wilayah Serang Barat

yaitu tanah regosol yang merupakan tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Terakhir tanah Padsolik merupakan tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah. Tanah Padsolik berada di seluruh wilayah Kota Serang dengan mayoritas berada di Wilayah Serang Selatan.

5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kota Serang meliputi sistem air bawah tanah dan air permukaan. Potensi sumber air bawah tanah di Kota Serang di kelompokkan berdasarkan kelompok akuifer. Pertama, kelompok akuifer air tanah tertekan, yang dapat dijumpai pada kedalaman sampai lebih dari 100 m di bawah permukaan laut. Kedua, kelompok akuifer tanah jarang yang mana akuifer ini umumnya kurang produktif dan berkeluhusan rendah. Ketiga, kelompok akuifer produktif yang merupakan gabungan antara sistem akuifer menerus dan tidak menerus. Wilayah Kota Serang umumnya termasuk akuifer produktif dengan debit air 5-10 liter/detik.

Adapun potensi air permukaan di wilayah Kota Serang bersumber dari sungai yang mengalir di wilayah Kota Serang seperti sungai Cibanten (5 Km). Kondisi Hidrologi di Kota Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam pengelolaan sungai dikenal sebagai bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS). Sungai-sungai yang terdapat di kota Serang memiliki lebar yang relatif kecil dan pendek. Salah satu DAS yang terdapat di Kota Serang yaitu DAS Cibanten yang merupakan bagian dari SWS Ciujung - Ciliman. Di samping keberadaan sungai, di Kota Serang terdapat pula jenis air permukaan berupa rawa, situ dan waduk.

Secara umum baik air bawah tanah maupun air permukaan tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Kota Serang yang berada di dataran rendah dan cukup berdekatan dengan pantai, serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya.

6. Kondisi Klimatologi

a. Curah Hujan

Sepanjang tahun 2023, tingkat curah hujan di Kota Serang bervariasi dengan curah hujan tertinggi pada bulan Agustus yaitu 8.888,00 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu 0,50 mm. Adapun dari total 155 hari hujan di Kota Serang, hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali di bulan Oktober. Selengkapnya jumlah curah hujan, jumlah hari hujan dan rata-rata harian penyinaran matahari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	148,70	27	3,9
Februari	310,90	24	3,2
Maret	276,50	18	5,9
April	130,10	12	6,5
Mei	69,10	7	5,3
Juni	151,30	17	5,0
Juli	89,00	9	5,3
Agustus	8.888,00	8	7,4
September	0,50	3	7,9
Oktober	8.888,00	2	7,9
November	138,20	16	4,7
Desember	77,80	12	5,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

b. Suhu

Suhu Kota Serang selama tahun 2023 memiliki rata-rata suhu udara sebesar 28,1° Celcius. Suhu tertinggi Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 37,4°C di bulan Oktober dan suhu minimum 20,6°C di bulan Desember. Suhu yang relatif tinggi umum dimiliki oleh suatu wilayah yang sebagian besarnya berada di dataran rendah. Untuk melihat kondisi suhu rata-rata di Kota Serang selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3
Suhu Udara Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Celcius)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Januari	27,40	34,60	22,80
Februari	27,10	33,80	23,00
Maret	27,60	34,30	22,40
April	28,30	35,00	23,00
Mei	28,60	35,30	23,50
Juni	27,90	34,40	22,40
Juli	27,60	33,80	22,40
Agustus	27,80	34,60	22,10
September	28,30	36,50	21,80

Bulan	Suhu Udara Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Celcius)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Oktober	29,20	37,40	23,00
November	28,60	36,20	23,00
Desember	28,70	36,50	20,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024.

c. Kelembaban

Kelembapan udara relatif mengukur seberapa banyak uap air yang ada di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum yang dapat diampuni udara pada suhu tertentu. Kelembapan udara Kota Serang pada tahun 2023 memiliki kelembapan tertinggi pada bulan Januari hingga Maret, Juni, Juli, dan November yaitu sebesar 99%, sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 31%. Kondisi kelembapan udara rata-rata di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 77,275%.

Tabel II.4
Kelembapan Udara Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Kelembapan Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Persen)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Januari	79,30	99,00	47,00
Februari	81,90	99,00	46,00
Maret	81,30	99,00	49,00
April	77,80	98,00	48,00
Mei	79,00	98,00	48,00
Juni	81,20	99,00	53,00
Juli	79,30	99,00	45,00
Agustus	75,00	95,00	45,00
September	68,50	93,00	31,00
Oktober	70,20	92,00	36,00
November	78,40	99,00	44,00
Desember	75,40	98,00	34,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data di bawah, penggunaan lahan di Kota Serang pada tahun 2021 hingga 2023 terbagi menjadi wilayah hutan, industri/perdagangan, tanah jasa, tanah perumahan, tanah perusahaan, dan pertanian. Diidentifikasi bahwa guna lahan terbesar pada tahun 2023 adalah untuk tanah perumahan yaitu

seluas 2.594.742,64 m². Guna lahan terbesar kedua yaitu hutan seluas 1.773.800 m². Adapun guna lahan pertanian yang memiliki luas yang cukup kecil yaitu 733.846,19 m². Berikut rincian guna lahan di Kota Serang.

Tabel II.5

Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2021 – 2023 (m²)

Penggunaan	2021	2022	2023
Hutan	1.773.800	1.773.800	1.773.800
Industri/Pergudangan	673.153	79.781	939
Perairan	-	-	-
Tanah Jasa	1.755	47.001	15.726
Tanah Perumahan	622.979	1.602.628	2.594.742,64
Tanah Perusahaan	-	-	-
Pertanian	-	462.343	733.846,19
Kota Serang	3.071.687	3.965.553	5.119.054

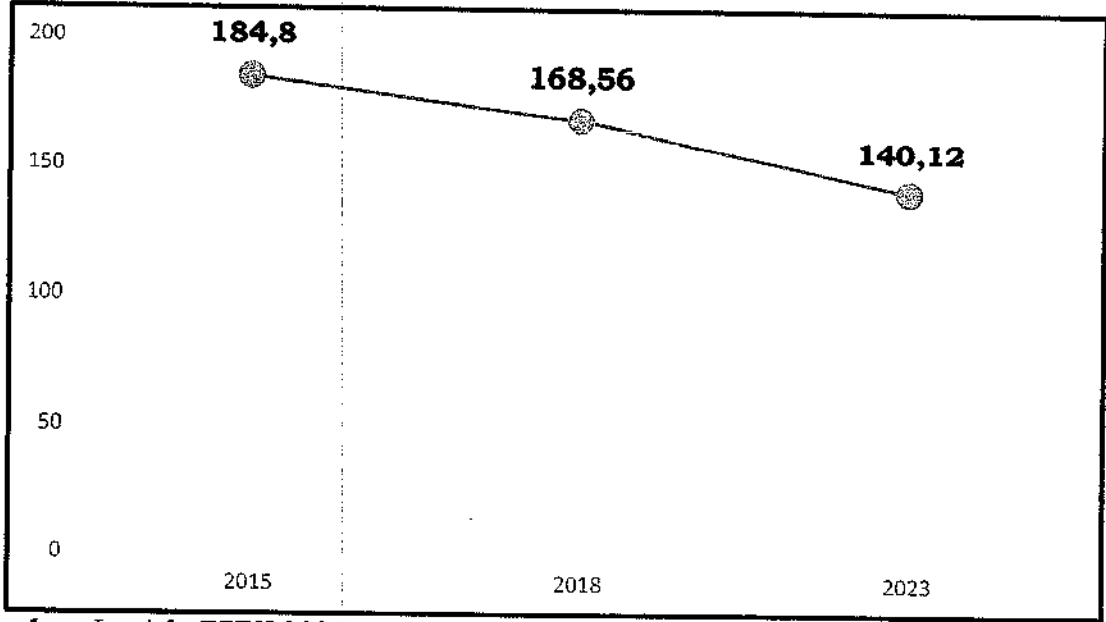
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Serang memiliki potensi bencana antara lain banjir cuaca ekstream. Gel. Ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, hingga tsunami. Untuk potensi rawan bencana tsunami serta gel. Ekstrim dan abrasi hanya berada di Kecamatan Kasemen. Begitu pula dengan potensi rawan tanah longsor, hanya terjadi di Kecamatan Cipocok jaya dan Kecamatan Taktakan. Sedangkan potensi bencana banjir, cuaca ektrim, gempa bumi dan kekeringan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana BPBD Kota Serang meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Adapun risiko bencana di Kota Serang terlihat dari capaian Indeks Risiko Bencana Kota Serang di Tahun 2023 yang menurun hingga 140,12 dari capaian tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 pernah memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 184,8.

Gambar II.3
Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2015-2023



Sumber: Inarisk, BPN 2024

Tabel II.6
Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
Curug	Kemanisan	Curug	• Sukajaya • Tinggar • Cilaku • Curug	Curug	• Cilaku • Sukajaya
Cipocok Jaya	• Dalung • Galem	Walantaka	• Kalodran • Kapuren • Teritih	Walakanta	• Pargeragung • Kapuren • Kalodran • Pipitan Kiara
Taktakan	• Sayar • Cilowong	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Banjar Sari • Dalung • Cipocok Jaya • Penancangan	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Penancangan • Cipocok Jaya • Gelam • Banjar Sari
		Serang	• Sukawana • Terondol • Kaligandu • Unyur	Serang	• Terondol • Kaligandu • Lopang • Unyur • Kota Baru • Cipare Cimuncang
		Taktakan	• Taman Baru • Lialang • Cilowong	Taktakan	• Cilowong
		Kasemen	• Sawah Luhur • Bendung • Warung Jaud • Kilasah	Kasemen	• Warung Jaud • Margaluyu • Kasemen • Banten

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
			• Terumbu • Priyayi		• Kasunyatan • Kilasah • Masjid Priyayi • Bendung • Sawah Luhur • Terumbu

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041

Kelas risiko bencana yang merupakan rangkuman dokumen BPBD Kota Serang dalam menghasilkan kelas risiko untuk potensi bencana di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7

Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan

Kecamatan	Kapabilitas							
	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gel. Ekstrem dan Abrasi	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
Curug	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Walantaka	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Cipocok Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Serang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Taktakan	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Kasemen	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	-	Sedang
Kota Serang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041

9. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Serang. Keamanan pangan dan kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Serang.

Berdasarkan capaian pembangunan ketahanan pangan daerah, Kota Serang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terlihat dari peningkatan ketahanan pangan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan beberapa indikator pangan mengalami progres positif seperti persentase cadangan pangan masyarakat yang mencapai pertumbuhan 13,30 maupun skor

pola pangan harapan yang tumbuh rata-rata 2,5 persen dalam lima tahun terakhir. Adapun secara rinci, gambaran kondisi terkait pembangunan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.8
Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	-	24,49	29,07	34,88	34,88	40,00	13,30
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	-	15	15	20	20	45,00	39,6
3	Skor pola pangan harapan	79,00	87,80	87,70	88,65	88,65	88,80	2,5
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	-	15	15	68	68	71,00	89,4
5	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/%)	-	2.420; 141.1	2.598; 154.08	2.649; 155.62	2.289; 66.3	2.729; 113,58	3,70; 6,00
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	66,67	85	69	84,60	75,00	5,00
7	Indeks ketahanan pangan	59,16	61,40	61,22	61,24	59,88	71,42	4,1
8	Capaian ketersediaan pangan utama	-				81,72	93,91	

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 serta LKJIP DKP3, IKD dan IKK Kota Serang Tahun 2023

10. Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 50,61 poin. Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kota Serang pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Serang dalam kategori sedang. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Provinsi. Hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan harus secara region dan menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Adapun penjelasan masing-masing komponen pembentuk IKLH diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas mutu udara tahun 2023 mencapai 65,97 poin. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Serang tahun 2023 mengalami penurunan untuk jumlah poinnya dan statusnya, yaitu dari baik menjadi sedang.

b. Indeks Kualitas Air

Kualitas mutu air tahun 2023 mencapai 50,00 poin, yang mana capaian ini sudah melebihi dari target RPJMD. Tercapainya target dari kualitas mutu air disebabkan karena curah hujan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, sehingga mempengaruhi hasil pengujian.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 23,26 poin dan masuk ke dalam status sangat kurang baik.

d. Capaian penanganan sampah

Capaian penanganan sampah masih di bawah target RPJMD yakni sebesar 68,15 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya timbulan sampah yang ada dan tidak dibarengi dengan cara penanganannya dimana sarana dan prasarana masih kurang untuk menangani sampah.

Tabel II.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Capaian kualitas mutu udara	Poin	67	67,20	72,46	74,136	74,65	65,97
2	Capaian kualitas mutu air	Poin	56	51,05	43,33	53,077	50,00	50,00
3	Capaian kualitas mutu tutupan lahan	Poin	25,32	29,70	39,71	23,14	24,38	23,26
4	Capaian penanganan sampah	Persen	50	55,58	61,6	52,30	55,72	68,15
5	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	47,35	47,35	54,34	55,05	54,37	50,61
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	2	4	6.1	14	6.44	9,48

Sumber: LKJIP Kota Serang, 2023

11. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dianalisis menggunakan pendekatan ilmiah seperti pendekatan stok, supply-demand, jasa ekosistem, dan lain-lain. Selain dari hasil analisis, daya dukung air juga dapat didekati menggunakan hasil pengukuran seperti volume air PDAM, debit mata air, dan lain-lain.

Dalam analisis DDDTLH juga diperlukan adanya data kebutuhan/konsumsi sumber daya alam sehingga dapat diketahui apakah ketersediaan sumber daya alam mampu mencukupi kebutuhan/konsumsi. Hasil dari analisis DDDTLH berupa gambaran kondisi ketercukupan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan penduduk.

Untuk aspek Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup lahan untuk penyediaan pangan, jika hasil perhitungan $\sigma > 1$, maka Kota Serang mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum, jika hasil perhitungan $\sigma=1$, maka Kota Serang memiliki daya dukung lahan pertanian optimal, dan jika hasil perhitungan $\sigma < 1$, Kota Serang tidak mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung (Lahan-Pangan)

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tamping pangan adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung lahan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan pangan, dan hasil panen atau hasil produksi lahan pertanian per hektar per tahun.

Tabel II.10
Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pangan
Kota Serang Tahun 2018-2023

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas lahan panen	Ha	20.493	20.493	20.319	20.461	20.077	15.256
Produksi lahan rata-rata (gabah)	Kg/Ha	5.360	5.490	5.530	6.300	5.400	4.954
Produksi lahan rata-rata (beras)	Kg/Ha	3.216	3.294	3.318	3.780	3.240	2.171
Jumlah penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362	723.794
Kebutuhan fisik minimum	(kg/kapita /thn)	115	115	115	115	115	115
Daya dukung lahan pangan		0,85	0,86	0,85	0,96	0,79	

Sumber: KLHS RPJPD Kota Serang, 2023

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tamping lahan-pangan, yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang tidak mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2023.

Kondisi ini berpotensi semakin memburuk mengingat isu strategis daya dukung daya tampung lahan-pangan juga mengalami:

1. Perubahan tata guna lahan pertanian terus terkonversi;
2. Karakteristik tanah di Kota Serang yang tidak terlalu subur;
3. Penurunan kualitas tanah karena pola pemanfaatan selama ini;
4. Iklim yang semakin tidak terprediksi akibat perubahan iklim;
5. Ketersediaan air yang semakin terbatas karena sistem drainase dan pemanfaatan;
6. Teknologi yang dinamis namun sulit diterapkan karena skala ekonomi; dan
7. Kebijakan alih fungsi lahan yang belum implikatif.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung (Air Minum)

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tampung air minum adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung air dengan mempertimbangkan Ketersediaan Air (SA) dan Kebutuhan Air (DA) bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah.

Tabel II.11
Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Kota Serang Tahun 2018-2022

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Air		3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553
- SBS	M ³ /tahun	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031
- Dalung	M ³ /tahun	780.362	780.362	780.362	780.362	780.362
- Teritih	M ³ /tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
- IPA Banten	M ³ /tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
- Sindang Heula 1	M ³ /tahun					
- Sindang Heula 2	M ³ /tahun					
- Waduk Karian	M ³ /tahun					
Jumlah Penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362
Koefisien	M ³ /jiwa/tahun	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Kebutuhan air	M ³ /tahun	14.843.908	15.080.406	15.157.012	15.431.134	15.775.928
D3TLH		0,25	0,24	0,24	0,24	0,23

Sumber: KLHS RPJPD, 2022

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung air domestik Kota Serang, yang disajikan pada tabel 3.73 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang tidak mampu memenuhi kebutuhan air domestiknya, atau jumlah

penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2022.

Kondisi ini berpotensi semakin memburuk mengingat isu strategis daya dukung daya tampung air domestik juga mengalami:

1. Curah hujan, merupakan sumber air utama untuk kota. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar ketersediaan air untuk kota, dan Kota Serang mengalami penurunan jumlah hujan per tahunnya;
2. Pola iklim, seperti musim kemarau dan musim hujan, juga mempengaruhi ketersediaan air. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air, fenomena El Nino yang dialami Kota Serang, menyebabkan suhu permukaan laut meningkat, arah angin pasat melemah, curah hujan meningkat di wilayah tropis bagian barat dan selatan namun, menurun di wilayah tropis bagian timur, dan mengakibatkan kekeringan di wilayah tropis bagian timur, banjir di wilayah tropis bagian barat;
3. Topografi, dimana kemiringan lahan dan ketinggian lahan, mempengaruhi ketersediaan air, lahan yang datar dan memiliki ketinggian yang rendah akan lebih mudah untuk memperoleh air, dan Kota Serang berada di posisi topografi yang landai;
4. Kualitas air, juga mempengaruhi ketersediaan air, air permukaan (DAS Cibanten dan Ciwaka) yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, setidaknya untuk dapat dipergunakan, membutuhkan biaya pengolahan yang tidak murah;
5. Jumlah penduduk, yang semakin bertambah akan meningkatkan kebutuhan air;
6. Pola konsumsi air, yang boros akan meningkatkan kebutuhan air yang berlebih dan mengurangi ketersediaan air; dan
7. Pemanfaatan air untuk keperluan industri, pertanian, dan pariwisata juga akan meningkatkan kebutuhan air, semakin banyak aktivitas yang harus dipenuhi, semakin mengurangi ketersediaan air.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Persampahan

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tampung air minum adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung sampah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan, dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Tabel II.12
Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah
Kota Serang Tahun 2018-2023

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas TPA	Ton/Ha	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996
Jumlah timbunan di TPA	Ton/Ha	4.402.814	4.402.814	4.490.723	4.578.632	4.666.541	4.754.450
Jumlah penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362	723.794
Sampah perkapita/thn	Ton/orang/tahun	0,2738	0,2738	0,2738	0,2738	0,2738	0,3011
D3TLH TPA		4,26	4,20	3,71	3,19	2,67	2,02

Sumber: KLHS RPJPD, 2023

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung persampahan Kota Serang yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang mampu menampung produksi sampah Kota Serang, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2022, meskipun daya dukung dan daya tampung persampahan khususnya TPA semakin berkurang kemampuan daya tampungnya.

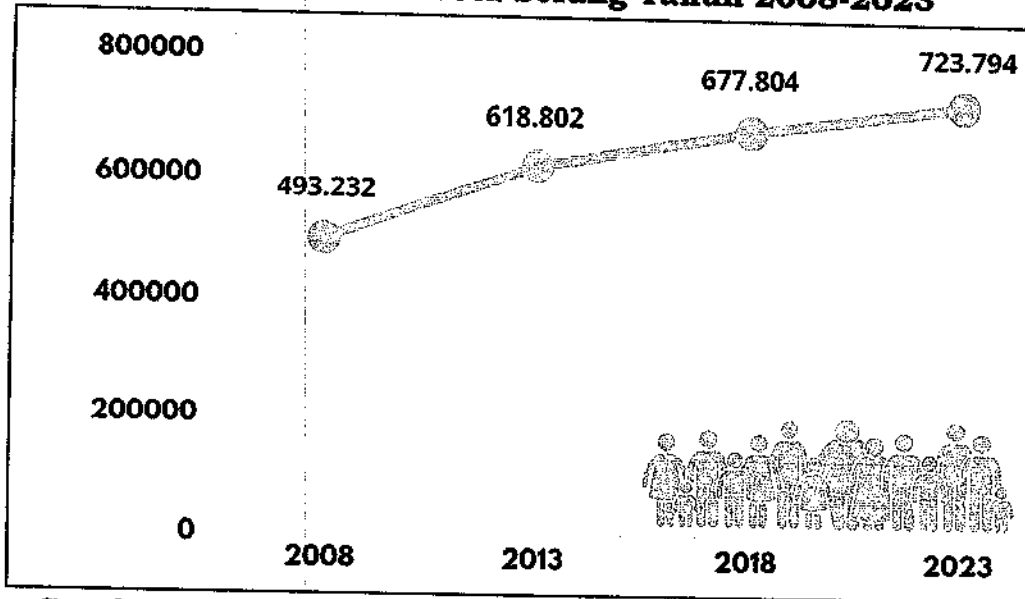
2.1.2 Demografi

Karakteristik demografi khususnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada proses pembangunan. Hal tersebut termasuk jumlah penduduk, kelompok usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi populasi. Dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan.

1. Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kota Serang dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kota Serang dapat dianalisis dengan melihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.4
Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI dan BPS Kota Serang, 2023

Perkembangan jumlah penduduk Kota Serang yang digambarkan pada grafik tersebut terlihat bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2023, Kota Serang mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pada tahun 2008, jumlah penduduk mencapai 493.232 jiwa, meningkat menjadi 618.802 pada tahun 2013, kemudian mencapai 677.804 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk tertinggi tercatat pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk meningkat hingga mencapai 723.794 jiwa, menunjukkan dinamika pertumbuhan populasi yang terus berlanjut.

Jumlah penduduk Kota Serang yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, kemudian dibarengi dengan peningkatan kepadatan penduduk yang ada. Peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di suatu wilayah menjadi tantangan dalam melakukan pembangunan.

Di Kota Serang dengan luas wilayah 266,189 km², rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2008 yaitu 1.849 jiwa/km. Kepadatan penduduk di Kota Serang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023, dimana pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.719,19 jiwa/km yang tersebar dalam 6 kecamatan. Dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Serang yaitu terdapat 229.739 jiwa. Adapun informasi perkembangan kependudukan di Kota Serang disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel II.13
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023

Uraian	2008	2013	2018	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	493.232	618.802	677.804	723.794
Rata-rata Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	1.849	2.320	2.541	2.719
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	NA	2,06	1,68	2,59
Jenis Kelamin				
a. Laki-Laki	252.181	317.501	347.305	369.567
b. Perempuan	241.051	301.301	330.499	354.227

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2008-2023

Kecamatan	2008	2013	2018	2023
Kecamatan Curug	42.346	49.181	51.204	60.111
Kecamatan Walantaka	61.451	83.078	94.487	111.022
Kecamatan Cipocok Jaya	62.293	93.081	114.162	103.922
Kecamatan Serang	185.627	217.504	228.563	229.739
Kecamatan Taktakan	63.762	84.106	92.550	106.874
Kecamatan Kasemen	77.753	91.852	96.838	112.126
Kota Serang	493.232	618.802	677.804	723.794

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2008-2024

Penduduk Kota Serang jika dilihat dari tabel di bawah memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64). Dengan jumlah usia produktif yang mencapai 69,32 persen di tahun 2023, kondisi ini tentunya akan menjadi bonus demografi yang akan berdampak baik bagi pembangunan. Namun alih-alih kuantitas, diperlukan juga kualitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar dapat mencapai tujuan pembangunan. Pengelompokan penduduk sesuai umur secara rinci terdapat pada tabel dibawah.

Tabel II.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023 (Jiwa)

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	32.073	30.649	62.722
5-9	33.917	32.333	66.250
10-14	33.057	31.408	64.465
15-19	31.754	29.678	61.432
20-24	32.701	30.815	63.516
25-29	33.204	31.837	65.041
30-34	31.974	30.771	62.745

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
35-39	29.853	28.411	58.264
40-44	26.171	24.936	51.107
45-49	23.736	22.947	46.683
50-54	19.965	19.504	39.469
55-59	15.862	15.226	31.088
60-64	11.421	10.962	22.383
65-69	7.527	7.359	14.886
70-74	4.083	4.353	8.436
75+	2.269	3.038	5.307
Jumlah	369.567	354.227	723.794

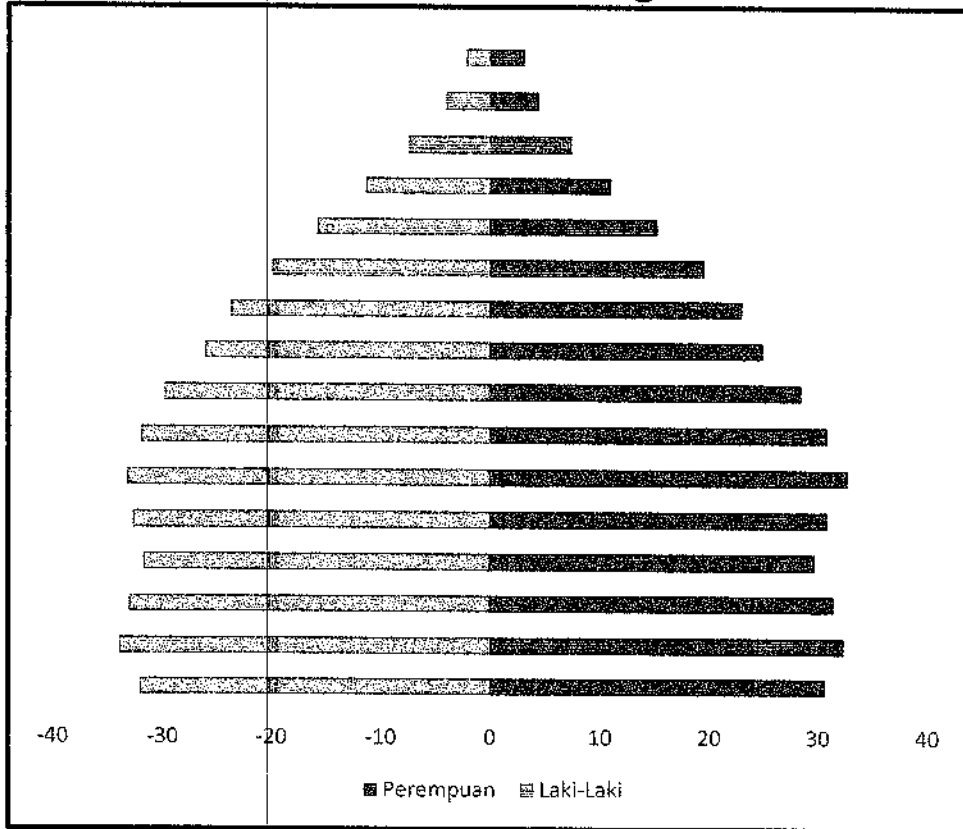
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

Dari total populasi Kota Serang yang mencapai 723.794 jiwa, mayoritas dihuni oleh penduduk berusia muda dan produktif. Dalam kerangka klasifikasi generasi yang diusung oleh Badan Pusat Statistik, yang meliputi Generasi Baby Boomers (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau millennials (Kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi Alpha (Kelahiran 2013-2025), dapat disimpulkan bahwa Kota Serang didominasi oleh Generasi Y atau millennials, Gen Z, dan Gen Alpha.

Keadaan demografi ini membuka peluang bagi Kota Serang untuk memanfaatkan penduduk usia produktif melalui adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang tinggi guna mengakselerasi pembangunan Kota Serang.

Dalam konteks analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan representasi visual yang menyajikan gambaran awal mengenai struktur umur suatu populasi. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan analisis terhadap produktivitas umur, tetapi juga memberikan pandangan mendalam terkait keberhasilan program kependudukan, terutama program Keluarga Berencana, yang mencerminkan dampaknya pada distribusi usia penduduk.

Gambar II.5
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

Berdasarkan analisis piramida penduduk Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa secara umum, masyarakat di Kota Serang memiliki cukup banyak penduduk usia muda dan sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun usia non produktif muda juga cukup mendominasi dibandingkan usia non produktif tua yang sangat kecil jumlah penduduknya.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Serang merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan dinamis. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja pemerintahan Kota Serang dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisa perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. Gambaran perekonomian daerah di Kota Serang memberikan pemahaman yang berkaitan

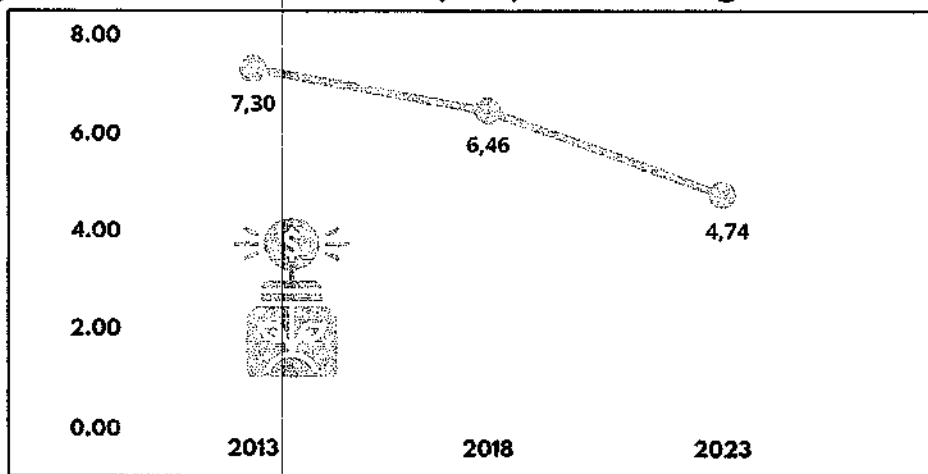
dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, laju inflasi, dan tingkat kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Hal ini mencerminkan pertambahan dalam output ekonomi suatu daerah yang biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu daerah, yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Gambar II.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Perekonomian Kota Serang selama periode 2013 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan perlambatan. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,30%, namun mengalami perlambatan pada tahun 2018 menjadi 6,4%. Hal serupa tercatat pada tahun 2023, di mana pertumbuhan ekonomi kembali melambat hingga mencapai angka 4,74%.

Tabel II.16

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha atau Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%)

No	Kategori Lapangan Usaha	2013	2018	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,31	1,80	3,66
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,16	0,13	-0,63
3	Industri Pengolahan	8,00	3,13	5,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,78	5,14	2,97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,06	7,17	5,56
6	Konstruksi	8,78	8,33	2,44

No	Kategori Lapangan Usaha	2013	2018	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	6,28	4,69
8	Transportasi dan Pergudangan	9,24	7,11	5,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,39	9,01
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	9,02	8,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,07	6,25	3,79
12	Real Estate	7,28	6,93	3,65
13	Jasa Perusahaan	8,86	6,20	7,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	4,97	-0,02
15	Jasa Pendidikan	5,48	6,59	6,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,44	5,90	7,58
17	Jasa lainnya	7,96	7,15	10,57
Produk Domestik Regional Bruto		7,30	6,46	4,74

Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Penurunan kasus pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas masyarakat kembali normal dan tentunya berpengaruh positif pada kegiatan perekonomian di Kota Serang. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sebagian beberapa lapangan usaha seperti, Jasa Lainnya sebesar 10,57%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,01%; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,11%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,5%; dan Jasa Perusahaan sebesar 7,47%. Sementara itu, terdapat dua kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yakni pertambangan dan penggalan mengalami pertumbuhan -0,63% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan ekonomi -0,02%.

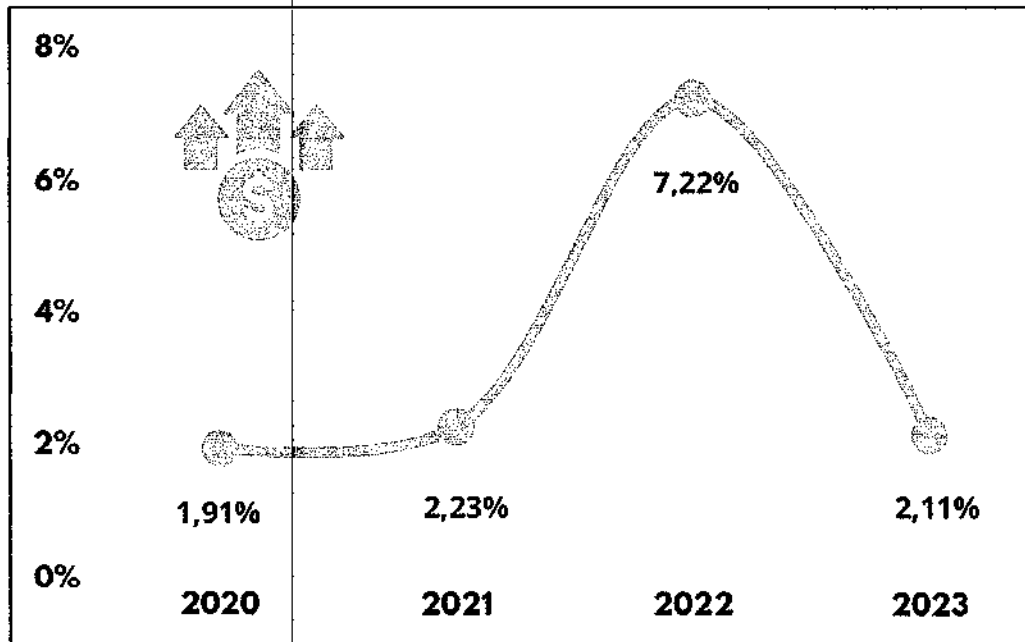
2. Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi *policy makers* dalam mengendalikan inflasi daerah.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga

barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Gambar II.7
Inflasi di Kota Serang Tahun 2020-2023 (%)



Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Inflasi Kota Serang mengalami perkembangan tren positif pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 7,22% yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 2,11% di tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya anomali pada tahun 2022 dimana angka inflasi meningkat hingga mencapai 7,22%. Adapun tingkat inflasi yang menjadi andil signifikan dalam peningkatan angka inflasi di Kota Serang adalah kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 2,46% dan makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,16%.

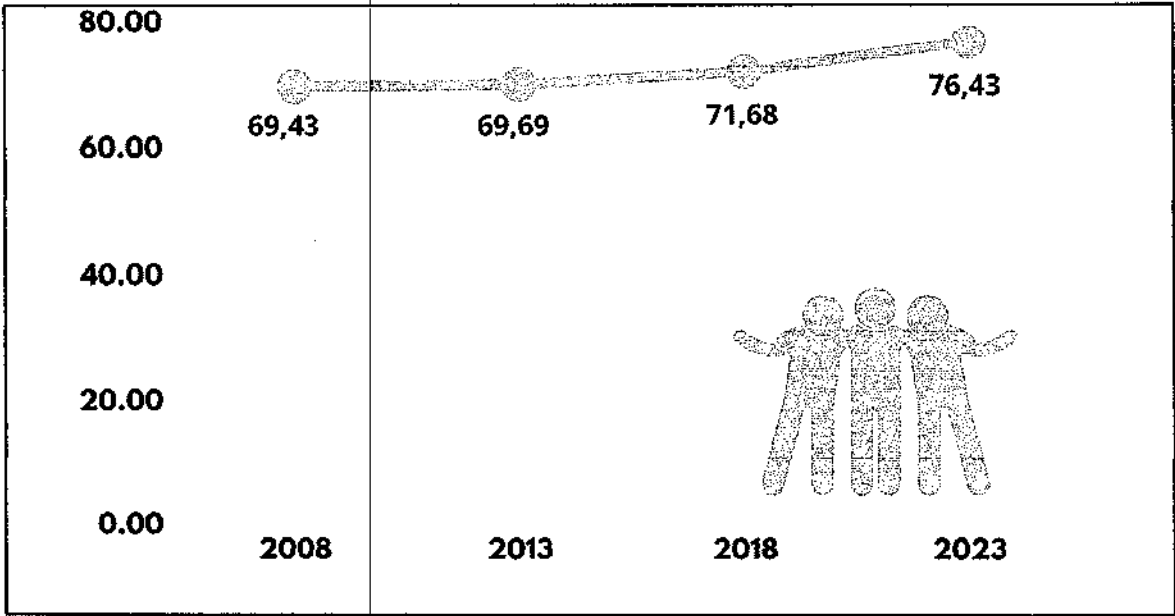
3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia di suatu wilayah. IPM dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan manusia, yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdiri dari dimensi harapan hidup yang sehat dan panjang, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma dimana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan

hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Gambar II.8
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Serang Tahun 2008-2023



Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai IPM di Kota Serang dari tahun 2008 sampai tahun 2023 mengalami tren meningkat pada setiap tahunnya. Menurut data BPS, nilai IPM di Kota Serang pada tahun 2008 mencapai 69,43. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan IPM hingga menjadi 69,69. Kemudian pada tahun 2018, IPM mengalami kenaikan yang signifikan hingga berada di angka 71,68 dan meningkat kembali pada tahun 2023 hingga mencapai angka 76,43. Peningkatan IPM di Kota Serang didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.17
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kota Serang Tahun 2008-2023

Indikator	2008	2013	2018	2023
Indeks Pembangunan Manusia	69,43	69,69	71,68	76,43
a. Rata-rata Lama Sekolah	7,01	8,56	8,62	8,91
b. Harapan Lama Sekolah	NA	11,92	12,65	12,82
c. Umur Harapan Hidup*	64,12	67,23	67,58	75,13
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	NA	11.950	13.261	14.088

Ket: *Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020

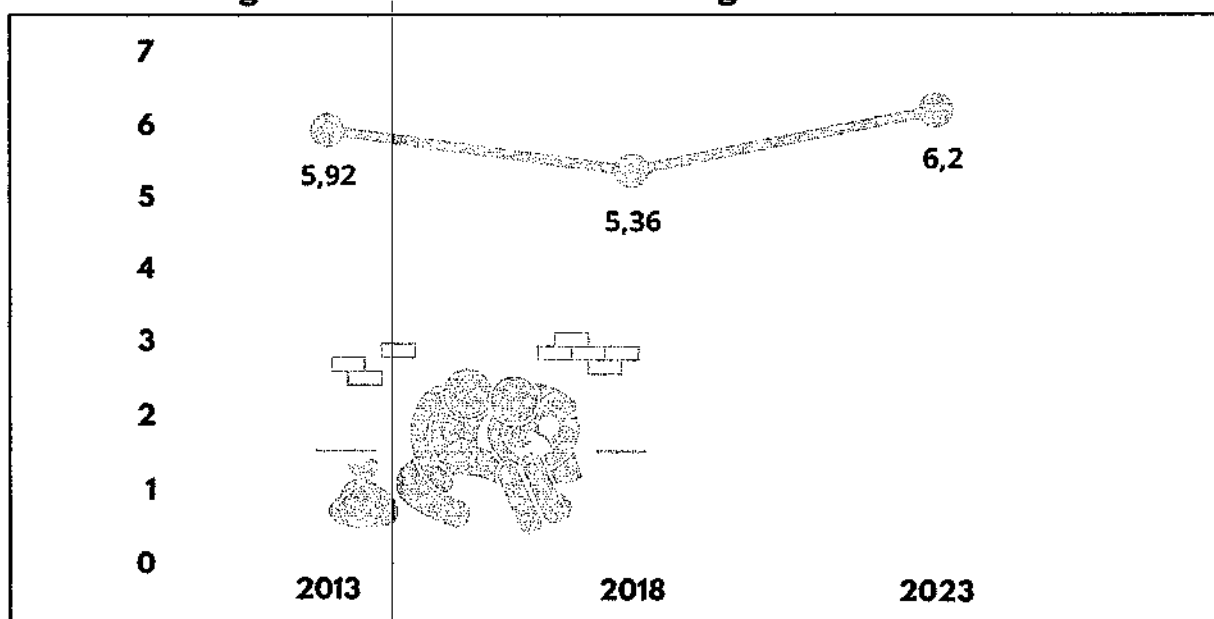
Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Indeks pembangunan manusia di Kota Serang mengalami peningkatan, IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Serang yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin baik. IPM Kota Serang telah mencapai kategori tinggi dengan angka capaian 76,43 pada tahun 2023. Angka tahun 2023 diambil dari komponen penyusun IPM yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 8,91 tahun; harapan lama sekolah sebesar 12,82 tahun; umur harapan hidup sebesar 75,13 tahun; dan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 14.088 ribu rupiah/kapita/tahun.

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya terbatas pada persoalan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya finansial. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang mencakup beragam aspek dan memengaruhi kehidupan seseorang secara menyeluruh. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi, tetapi juga meresap ke dalam bidang pendidikan, kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar, dan hak-hak dasar lainnya.

Gambar II.9
Tingkat Kemiskinan Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023

Kemiskinan menjadi tantangan signifikan dalam agenda pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kota Serang. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, tingkat kemiskinan di Kota Serang mengalami penurunan dari 5,92 persen pada tahun 2013 menjadi 5,36 persen pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang mencapai 6,2 persen. Fenomena peningkatan kemiskinan pada tahun 2023 dapat disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga awal 2022 yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi sehingga melahirkan peningkatan angka kemiskinan di Kota Serang.

Meskipun begitu, pemetaan kemiskinan tidak hanya terbatas pada persentase penduduk miskin saja. Melainkan pemerintah perlu mengetahui lebih jauh mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Serang Tahun 2013-2023

Tahun	Jml Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2013	36,70	5,92	0,74	0,16	236.039
2018	36,21	5,36	0,60	0,10	350.237
2023	44,99	6,20	0,75	0,16	511.575

Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Serang menjadi 44,99 ribu jiwa, daripada tahun 2018 yang berjumlah 36,21 ribu jiwa dan tahun 2013 yang berjumlah 36,70 ribu jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa perekonomian di Kota Serang mengalami penurunan performa sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga mempersulit rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Serang mengalami penurunan mencapai sebesar 0,14 poin pada tahun 2018 menjadi 0,60 dibandingkan kondisi di tahun 2013 yang sebesar 0.74. Adapun nilai indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 berada pada angka 0,75. Selanjutnya, Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0,06 poin mencapai dari 0,16 pada tahun 2013 menjadi 0,10. Sedangkan pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan berada pada angka 0,16.

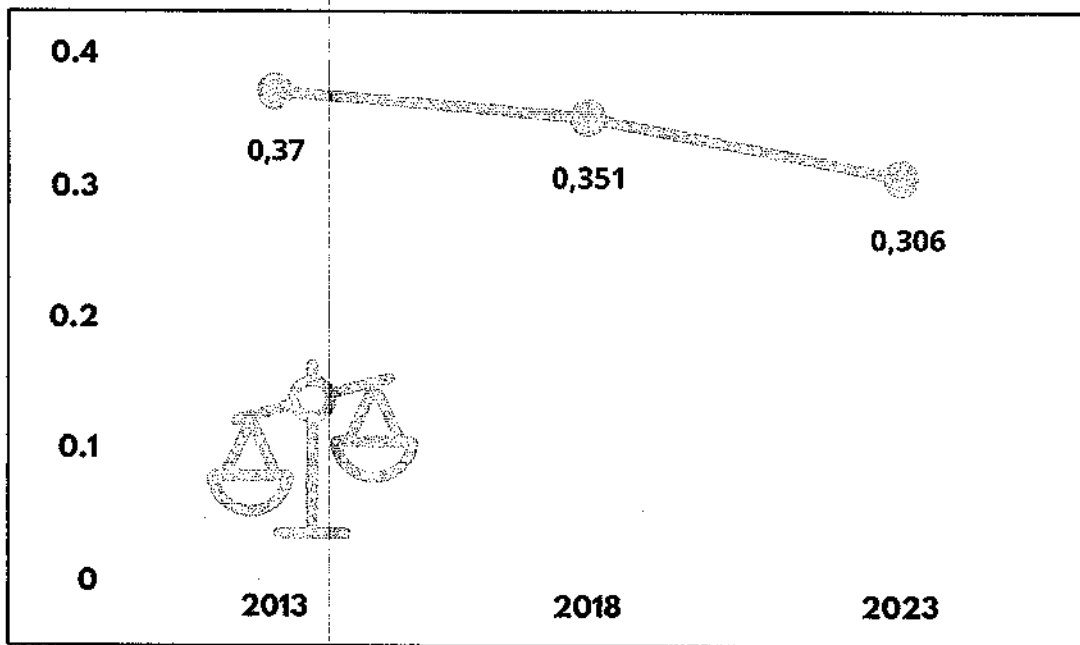
Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2013-2018, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin pada periode tersebut semakin mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin. Begitu pula tingkat

kesenjangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskinnya, yang pada saat bersamaan semakin menyempit, dengan ditandai oleh menurunnya indeks keparahan kemiskinan.

5. Indeks Gini

Indeks gini atau gini ratio merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasar pada distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi yang diukur dengan gini ratio akan menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (nol) atau 0 persen sampai 1 (satu) atau 100 persen. Nilai 0 (nol) menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 (satu) menggambarkan ketidaksetaraan yang sempurna.

Gambar II.10
Indeks Gini Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023

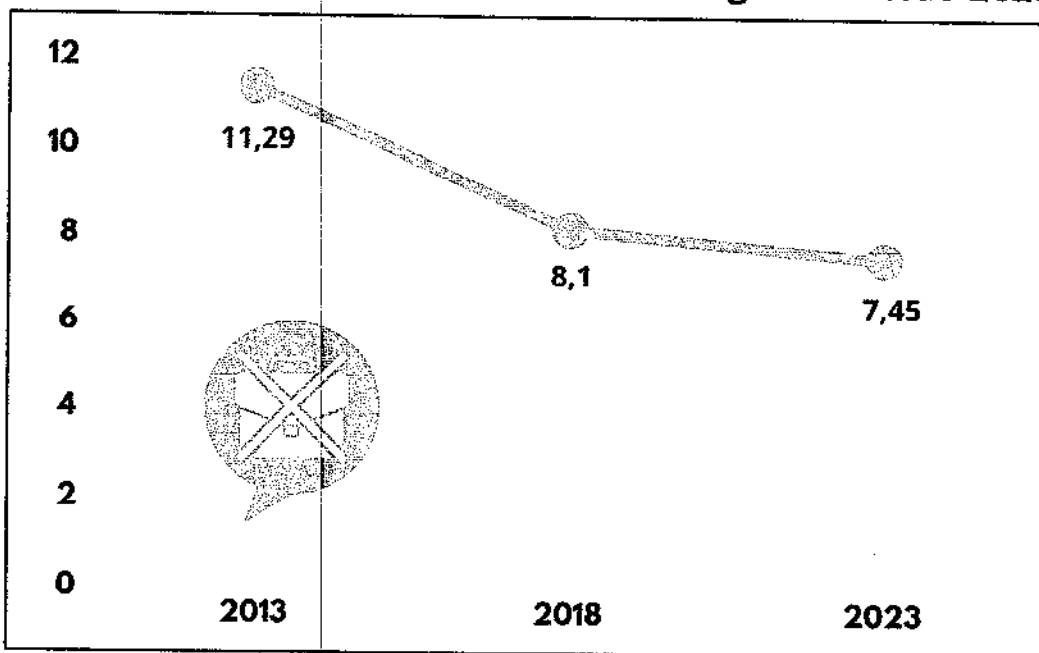
Berdasarkan analisis terhadap grafik di atas, dapat dicatat bahwa pergerakan Indeks Gini Kota Serang menunjukkan tren menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Pada tahun 2013, Indeks Gini mencapai 0,370, dan pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 0,306, yang mengindikasikan bahwa Kota Serang mengalami ketimpangan ekonomi dengan kategori sedang dan hampir berada di bawah 0,300 (kategori rendah). Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Serang untuk menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi atau ketidaksetaraan pendapatan di Kota Serang sudah cukup baik.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu indikator signifikan dalam pemantauan kondisi ketenagakerjaan, yang mengukur proporsi dari angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya. Dalam konteks ini, angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja dan mereka yang secara aktif terlibat dalam pencarian pekerjaan.

TPT menjadi cermin dari dinamika pasar tenaga kerja, mencerminkan tingkat ketersediaan lapangan kerja dan kesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar. Pemahaman mendalam akan TPT memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang efektif.

Gambar II.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan analisis grafik yang disajikan, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Serang menunjukkan tren menurun selama periode yang diamati. Pada tahun 2013, capaian TPT Kota Serang berada pada angka 11,29%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,1%, dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 7,45%. Dinamika ini mencerminkan tren positif dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kota Serang sehingga pasar kerja mampu menyerap angkatan kerja lebih baik di setiap periode pembangunan.

7. NTP dan NTN

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah suatu indikator ekonomi yang mencerminkan hubungan antara harga yang diterima oleh petani dari hasil

pertanian mereka dengan harga barang-barang yang harus mereka beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. NTP dapat memberikan gambaran tentang daya beli petani dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Tabel II.19
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan
Kota Serang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,49	NA	101,1	98,68	93,98
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	102,94	98,8	95,24	100,00	99,64

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 2023

NTP Kota Serang pada tahun 2023 mengalami penurunan 4,7 poin dari tahun 2022 yang mencapai 98,68. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Kota Serang mengalami penurunan.

Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan suatu indikator ekonomi yang mengukur tingkat kesejahteraan nelayan di suatu daerah. NTN Kota Serang pada tahun 2023 juga mengalami penurunan 0,36 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 100 poin. Ini artinya kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual nelayan tidak lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan di Kota Serang dapat dikatakan belum memperoleh kehidupan yang sejahtera.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan keluarga atau bisa disebut iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk

mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga Kota Serang di tahun 2023 sebesar 53,41 atau masuk dalam kategori yang cukup baik (berkembang). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masuk dalam wilayah dengan status pembangunan keluarga berkembang.

2. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai dimensi Pembangunan, seperti pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan ekonomi. IPG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang setara dalam masyarakat. Nilai IPG berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketidaksetaraan gender yang lebih rendah.

Tabel II.20
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender, Kota Serang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,96	92,28	92,47	92,63	92,49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	62,10	61,26	61,66	62,39	62,98
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,549	0,508	0,521	0,544	0,530

Sumber: BPS RI, 2024

Indeks pembangunan gender menunjukkan penurunan sebesar 0,14 poin di tahun 2023 (92,49) dibandingkan tahun 2021 (92,63). Meskipun menurun, namun capaian IPG di Kota Serang sudah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi cukup kecil untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu indeks yang menggambarkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan dalam parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi. Nilai IDG Kota Serang meningkat 0,59 poin dari tahun 2022 (62,39) menjadi 62,98 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kota Serang mulai mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kondisi ideal.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia

yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketimpangan gender di Kota Serang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, IKG Kota Serang sebesar 0,549 dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,508. Namun penurunan ketimpangan ini tidak berlangsung lama dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali IKG menjadi sebesar 0,521 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 0,544. Adapun pada tahun 2023, IKG kembali mengalami penurunan menjadi 0,530 yang mengindikasikan bahwa terjadi penurunan ketimpangan gender dibanding tahun sebelumnya.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu akselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, dan struktur tersendiri yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi suatu daerah menjadi kunci utama dalam menentukan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Keunggulan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayah menjadi landasan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Analisis PDRB dapat membantu pemerintah dan pelaku ekonomi setempat untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Dengan memahami struktur ekonomi regional, pihak berwenang dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dan menciptakan program-program pengembangan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah tersebut. PDRB dapat dianalisis dalam dua pendekatan yang berbeda, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Kedua jenis PDRB ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap kesejahteraan ekonomi suatu wilayah.

Lebih jelasnya, perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun juga sebagai sarana untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB.

Tabel II.21
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)

Kategori PDRB	2013	2018	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.047.312,29	1.627.429,72	2.022.166,94
Pertambangan dan Penggalian	1.380,49	1.807,97	2.008,42
Industri Pengolahan	888.344,26	1.334.704,86	1.812.020,42
Pengadaan Listrik dan Gas	24.001,46	51.252,12	65.703,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.130,79	6.834,20	10.065,04
Konstruksi	3.029.543,74	5.573.700,57	8.094.074,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.236.686,65	8.133.282,01	10.934.730,24
Transportasi dan Pergudangan	771.216,26	1.390.419,89	2.094.060,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.027.104,62	1.826.407,78	2.429.232,78
Informasi dan Komunikasi	698.811,28	1.130.193,88	1.608.446,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	494.505,43	883.146,00	1.236.756,88
Real Estate	1.548.424,00	2.609.911,27	3.546.602,90
Jasa Perusahaan	151.356,69	266.665,18	342.533,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.107.819,02	1.765.521,60	2.253.728,28
Jasa Pendidikan	728.642,77	1.263.801,64	1.632.655,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	353.175,46	603.416,94	949.283,46
Jasa lainnya	340.165,35	583.218,04	804.301,75
PDRB	17.452.620,58	29.051.713,66	39.838.189,82

Sumber: BPS Kota Serang, 2024

Perekonomian Kota Serang memiliki tren meningkat selama periode 2013-2023, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai PDRB yang terus bertambah. Nilai PDRB ADHB pada tahun 2013 memiliki nilai 17.452.620,58 juta rupiah yang kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga pada tahun 2023, PDRB ADHB Kota Serang mencapai 39.838.189,82 juta rupiah. Adapun tiga besar kategori lapangan usaha yang berkontribusi pada perekonomian Kota

Serang yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2023 memiliki nilai 10.934.730,24 juta rupiah. Diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi dengan kontribusi senilai 8.094.074,04 juta rupiah dan kategori ketiga yaitu lapangan usaha Real Estate yang memiliki nilai sebesar 3.546.602,90 juta rupiah.

Tabel II.22
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%)

No	Kategori	2013	2018	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,00	5,60	5,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	5,09	4,59	4,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,18	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,03
6	Konstruksi	17,36	19,19	20,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,01	28,00	27,45
8	Transportasi dan Pergudangan	4,42	4,79	5,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,29	6,10
10	Informasi dan Komunikasi	4,00	3,89	4,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	3,04	3,10
12	Real Estate	8,87	8,98	8,90
13	Jasa Perusahaan	0,87	0,92	0,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,08	5,66
15	Jasa Pendidikan	4,17	4,35	4,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,08	2,38
17	Jasa lainnya	1,95	2,01	2,02
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Serang, 2024

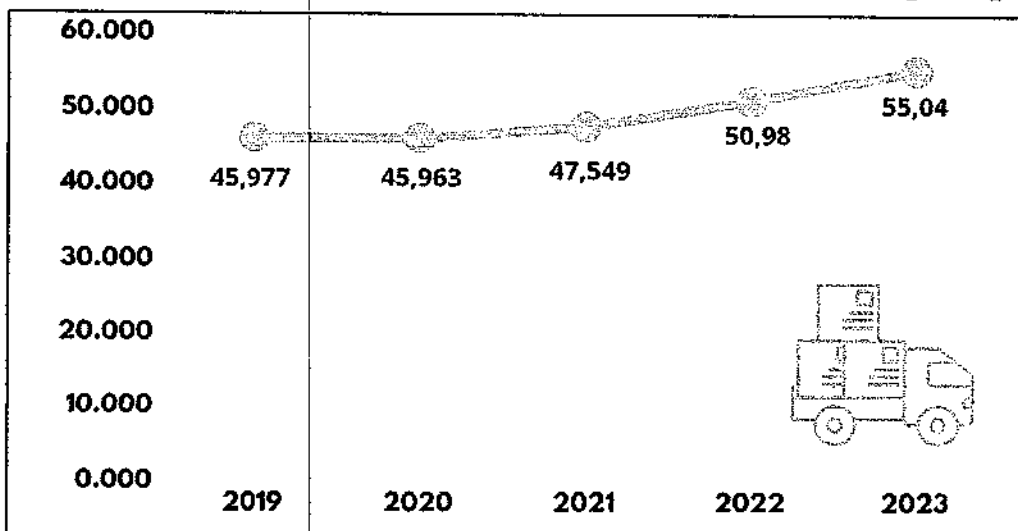
Distribusi PDRB ADHB menggambarkan struktur dan pergeseran jenis lapangan usaha yang sedang mendominasi suatu daerah. Kota Serang selama ini memiliki keunggulan ekonomi di sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Lapangan Usaha Konstruksi, dan sektor Lapangan Usaha Real Estate. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut, memiliki dominasi dalam membentuk struktur ekonomi di Kota Serang selama pelaksanaan pembangunan ini.

2. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Gambar II.12

PDRB per Kapita Kota Serang Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Kapita)



Sumber: BPS Kota Serang, 2023

PDRB per kapita Kota Serang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, yaitu dari 45,977 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 45,963 juta rupiah pada tahun 2020, namun PDRB per kapita kembali tumbuh pada tahun 2021 mencapai 47,549 juta rupiah. Pada tahun 2022, PDRB Kota Serang mencapai 50,98 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 3,431 juta dibandingkan tahun 2021 dan meningkat kembali hingga mencapai titik tertinggi selama lima tahun terakhir yakni sebesar 55,04 juta rupiah.

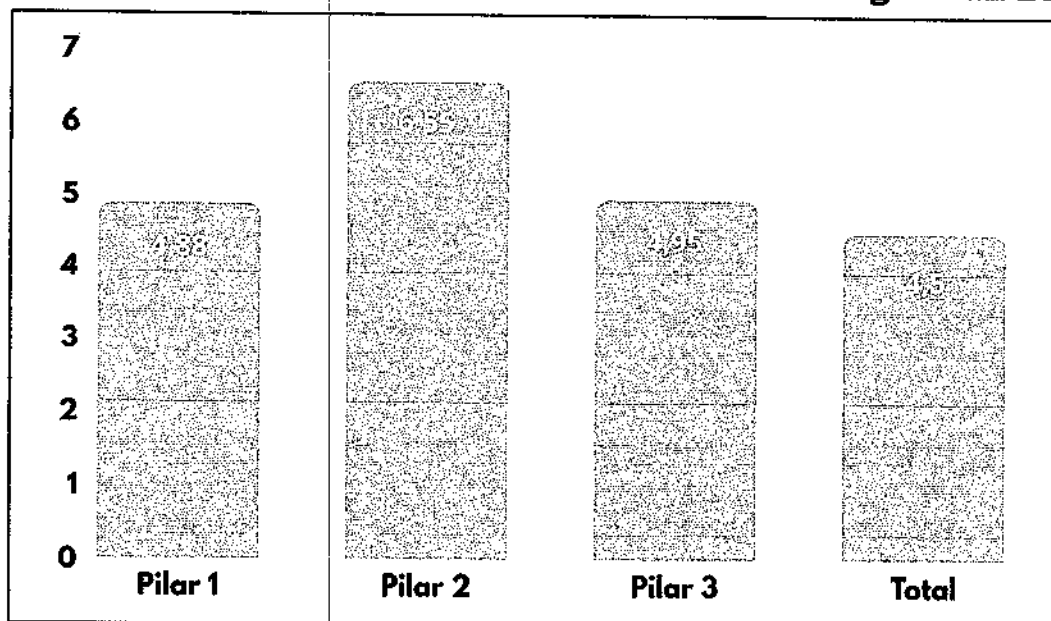
3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif memiliki tujuan untuk mendukung pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan

dan inklusif, yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin penduduk. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat diukur melalui berbagai pilar atau dimensi yang mencerminkan karakteristik inklusivitas ekonomi. Bappenas menggunakan tiga pilar untuk mengukur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, tiga pilar tersebut yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan yang ketiga perluasan akses dan kesempatan.

Adapun Indeks Perkembangan Ekonomi Inklusif Kota Serang tahun 2021 memiliki nilai 4,50. Lebih rinci pada pilar pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Kota Serang mendapatkan nilai 4,88. Kemudian pada pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan memperoleh nilai 6,55, dan pada pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan, Kota Serang mendapatkan nilai 4,95.

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Serang Tahun 2021



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

1. Indeks Pendidikan

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait

kompetensi masyarakat Kota Serang. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Indeks Pendidikan.

Indeks pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pendidikan di suatu wilayah. Berbagai indikator dapat digunakan dalam menyusun indeks pendidikan. Adapun indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Serang untuk mengukur indeks pendidikan di Kota Serang yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Tabel II.23
Indeks Pendidikan Kota Serang Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,76	8,89	8,90	8,91
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,79	12,81	12,82
3	Indeks Pendidikan	Poin	64,70	65,16	65,25	65,31

Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024, diolah

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan pada setiap tahun yang diamati. Pada tahun 2023, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Serang mencapai 8,91 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SMP. Adapun harapan lama sekolah menunjukkan angka 12,82 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk baru lahir di Kota Serang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga lulus SMA. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Serang tentunya juga berdampak pada peningkatan indeks pendidikan Kota Serang dimana pada tahun 2023 mencapai 65,31.

2. Indeks Kesehatan

Bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat melalui capaian Angka Harapan Hidup

(AHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel II.24
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan di Kota Serang
Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,54	74,84	75,13
2	Indeks Kesehatan	Poin	83,74	83,91	84,37	84,82

Sumber: BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024, diolah

Adapun capaian angka harapan hidup di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 75,13 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 75-76 tahun. Adapun indeks kesehatan juga memiliki capaian cukup tinggi hingga mencapai 84,82 pada tahun 2023.

3. Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi numerasi, atau kemampuan dalam membaca dan memahami informasi numerik, memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing sumber daya manusia. Meningkatkan angka literasi numerasi di masyarakat dapat mendukung perkembangan pribadi individu, dan juga berkontribusi pada peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Tabel II.25
Angka Literasi dan Numerasi untuk Satuan Pendidikan dan Peserta Didik
di Kota Serang Tahun 2021-2023

Indikator		2021	2022	2023
Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Literasi Membaca	15,83	21,35	29,68
	Numerasi	2,9	8,03	21,02
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Literasi Membaca	27,69	36,47	52,16
	Numerasi	45,81	50,88	58,56

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2023

Angka literasi dan numerasi Kota Serang menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Angka tersebut setiap tahunnya dilaporkan melalui rapor pendidikan untuk melihat kompetensi SDM di kota Serang terutama untuk di tingkat SD dan SMP. Persentase peserta didik

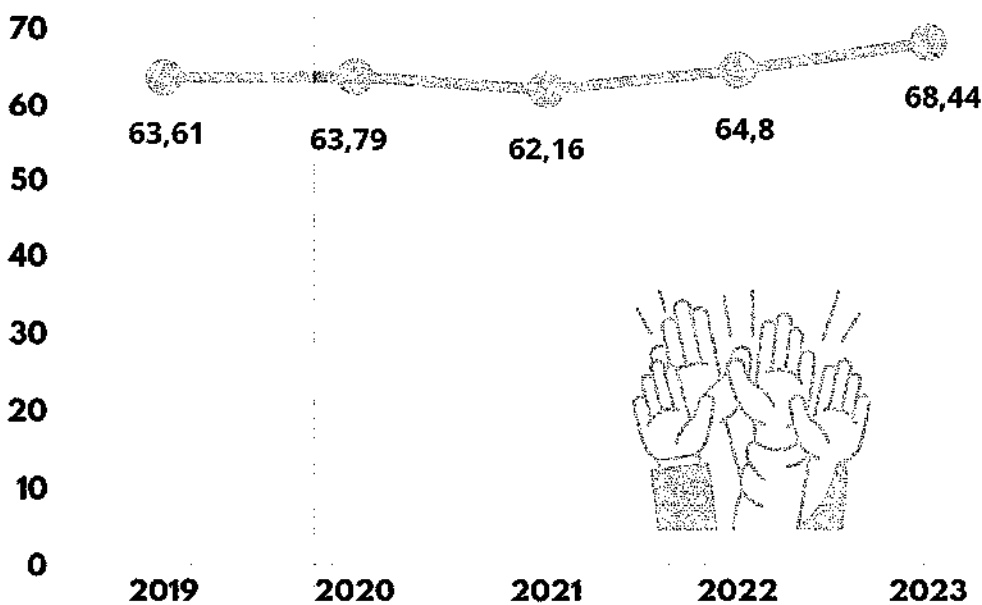
yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pada tahun 2021 tercatat di angka 27,69 persen, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 52,16 persen. Sedangkan pada numerasi meningkat dari 45,81 persen pada tahun 2021 menjadi 58,96 persen pada tahun 2023.

Pada indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pada tahun 2021 tercatat angka sebesar 15,83 persen, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 29,68 persen. Sedangkan pada numerasi meningkat dari 2,9 persen pada tahun 2021 menjadi 21,02 persen pada tahun 2023.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki dampak signifikan terhadap daya saing sumber daya manusia pada suatu wilayah. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif.

Gambar II.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Serang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Serang, 2023

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Serang memiliki tren yang cukup baik selama lima tahun terakhir walaupun pada tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan. Dimulai pada tahun 2019 sebesar 63,61 dan di tahun terakhir mencapai 68,44 pada tahun 2023. Kondisi tingkat partisipasi

angkatan kerja yang meningkat menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik walaupun demikian tetap perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat kedepannya.

5. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menggambarkan hubungan antara jumlah orang yang tidak bekerja dengan jumlah orang yang sedang bekerja atau yang dapat bekerja. Jumlah orang tidak bekerja biasanya mencakup anak-anak (di bawah usia produktif) dan orang lanjut usia (di atas usia produktif). Jumlah orang yang bekerja melibatkan mereka yang berada dalam usia produktif, yang secara umum dianggap antara 15 dan 64 tahun. Rasio ini dapat mempengaruhi produktivitas dan potensi pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi faktor penting dalam menilai daya saing sumber manusia di Kota Serang.

Tabel II.26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)
0 – 14 tahun	193.437
15 – 64 tahun	501.728
>65 tahun	28.629
Angka ketergantungan	44,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

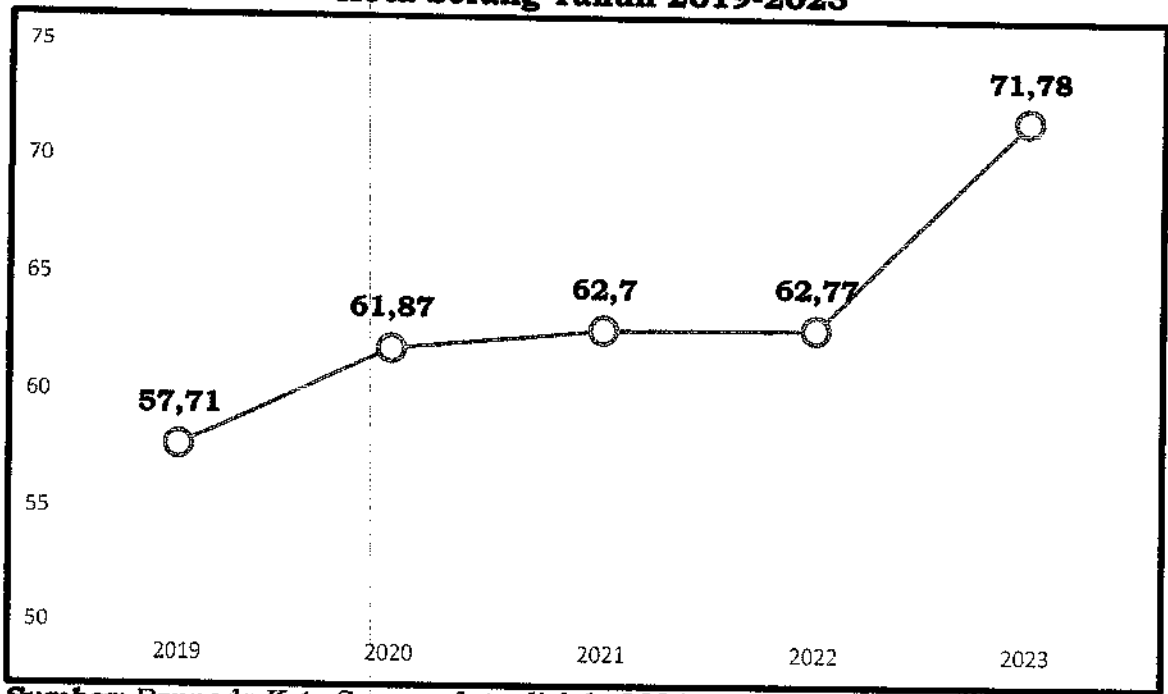
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, Kota Serang memiliki 501.728 jiwa penduduk usia produktif dan 222.066 jiwa usia non-produktif, baik itu penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun penduduk usia tidak lagi produktif atau lansia (65 tahun ke atas). Dari jumlah kependudukan tersebut, rasio ketergantungan Kota Serang yaitu sebanyak 44,26 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif, terdapat 44-45 penduduk usia non produktif yang ditanggung beban kehidupannya.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Untuk menilai kualitas infrastruktur di Kota Serang, setiap tahunnya Kota Serang menghitung Indikator Kualitas Layanan

Infrastruktur untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kota Serang.

Gambar II.15
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Kota Serang Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda Kota Serang, data diolah, 2024

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Di tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang menunjukkan angka 71,78 atau masuk kategori puas. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Serang semakin puas dengan layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang baik kondisi dan pelayanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, maupun prasarana dasar.

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merujuk pada fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung proses pembelajaran dan pengajaran di institusi pendidikan. Ini mencakup bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif. Kondisi ideal ini diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

Tabel II.27
Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kota Serang Tahun 2023

Indikator	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Jumlah Sekolah (unit)	289	147	106
Jumlah Guru (guru)	3.927	2.462	2.440
Jumlah Murid (siswa)	84.309	35.450	36.345

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024

Kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Serang saat ini, terdapat 263 unit sekolah dasar dengan tenaga pengajar sebanyak 3.927 guru; 147 unit sekolah menengah pertama dengan tenaga pengajar sebanyak 2.462 guru; dan 106 unit sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan dengan tenaga pengajar sebanyak 2.440 guru.

2. Infrastruktur Kesehatan

Perkembangan infrastruktur kesehatan yang berupa rumah sakit dan puskesmas cenderung stabil dalam kurun waktu mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Jumlah rumah sakit sebanyak 10 pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian berkembang menjadi 11 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit kembali bertambah menjadi 12, sedangkan pada tahun 2023 jumlah rumah sakit berkurang menjadi 11 unit. Jumlah puskesmas sepanjang tahun 2019 hingga 2023 tetap stabil berjumlah 16.

Tabel II.28
Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	10	10	11	12	11
	Jumlah Puskesmas	16	16	16	16	16
Jumlah Tenaga Kesehatan						
2	Jumlah Dokter	40	40	616	623	785
	Jumlah Perawat	82	70	1050	1050	85
	Jumlah Bidan	154	141	567	567	275
	Jumlah Farmasi	12	12	567	567	31
	Jumlah Ahli Gizi	12	12	203	203	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2019-2024

Peningkatan yang signifikan terjadi pada jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020. Dimana jumlah dokter yang awalnya sebanyak 40 orang meningkat menjadi 616 pada tahun 2021, menjadi 623 pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 785 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi di Kota Serang sepanjang tahun 2019 hingga 2022, namun pada tahun 2023 jumlah perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi mengalami penurunan.

3. Infrastruktur Prasarana Dasar

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara.

Tabel II.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Serang Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pekerjaan Umum							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	65,3	65,5	65,85	71,83	70,59	49,07
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,03	0,032	0,05	0,03	0,07	0,57
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	71.804	71,804	71,804	93,69	69	71.804
Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	89,98	91	90,43	94,94	97	98,59
tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	23	26	28	31	16	32,99
Penataan Ruang							
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit	Persen	47	47	47	47	47	47
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	55	51	51	52	57	56,00
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	NA	0,00596	0,00688	7,5	3,04	3,07

Sumber: IKK Kota Serang, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya meningkat. Seperti pada indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, terjadi peningkatan capaian pada tahun 2023. Penurunan ruang terbuka hijau ini tentunya dapat menimbulkan potensi permasalahan lingkungan. Selain itu, pada indikator persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak terjadi perubahan capaian pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kondisi drainase di Kota Serang tidak mengalami perubahan kualitas.

Pembangunan perumahan dan pemukiman terus dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Serang secara optimal. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun cakupan kegiatannya antara lain, yaitu penanganan rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga yang menggunakan listrik, penanganan pemukiman yang

tertata, penanganan lingkungan pemukiman kumuh, rasio rumah dan pemukiman layak huni. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh, yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,867	0,871	0,871	0,874	0,878
2	Rasio pemukiman layak huni	Rasio	0,992	0,955	0,965	0,966	0,97
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	86,7	66,32	87,11	87,44	87,80
4	Persentase pemukiman tertata	Persen	99,19	93,18	96,57	96,58	97,01
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	6,82	6,5	6,08	2,52	4,10
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1,44	2	2,71	0,56	4,10
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	13,3	2,8	5,69	5,69	3,72
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	79,27	69,33	88,75	78	70,00
9	Persentase penduduk berakses air bersih	Persen	38,95	39,63	43,44	53,44	57,42
10	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Per 1000	1048,09	1037,56	927,66	927,66	1.037.56

Sumber: IKK Kota Serang, 2023

Adapun Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPPTL) menggambarkan total biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan listrik dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah). Nilai ini merepresentasikan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk konsumsi listrik (dalam kilowatt-hour atau kWh), yang bisa dipengaruhi oleh tarif listrik per kWh dan jumlah konsumsi listrik itu sendiri. Berdasarkan data di tabel, terlihat adanya peningkatan bertahap dalam konsumsi listrik (kWh) dan RPPTL dari tahun 2019 hingga 2023. Konsumsi listrik meningkat dari 579,6 juta kWh pada tahun 2019 menjadi 699,6 juta kWh di tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sekitar 20,7%. Seiring dengan itu, RPPTL juga mengalami kenaikan dari Rp639 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp808 triliun pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 26,4%. Kenaikan ini mungkin mencerminkan peningkatan tarif listrik atau penggunaan listrik yang lebih tinggi oleh konsumen. Kenaikan

terbesar terlihat pada tahun 2023, baik dalam konsumsi maupun RPPTL, yang dapat menandakan adanya lonjakan penggunaan atau penyesuaian tarif listrik di tahun tersebut.

Tabel II.31
Pemakaian Tenaga Listrik Kota Serang Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	Pemakaian (KWh)	Pemakaian RPPTL (Rp)
2019	579.629.003	639.046.566.111
2020	619.667.128	623.481.422.154
2021	634.364.947	661.190.318.678
2022	647.753.455	734.029.389.336
2023	699.684.653	807.991.601.070

Sumber: PT. PLN Kota Serang, 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim investasi biasanya dipengaruhi oleh angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Investasi terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

1. Investasi dan Perijinan

Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator makro yang penting. Investasi atau penanaman modal memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah yang menjadi magnet bagi investasi memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan yang pesat.

Kota Serang mempunyai posisi yang strategis di sekitar wilayah metropolitan Jakarta. Lokasi yang dekat dengan pusat bisnis dan aksesibilitas yang baik tentunya dapat menjadi daya tarik bagi investor yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi di Kota Serang. Jumlah arus kas bersih aktivitas investasi di Kota Serang pada tahun 2022 sebesar Rp216.956.069.707,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.701.896.472,00 atau 11,68 persen dari tahun 2021. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32
Posisi Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2021 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Pendapatan penjualan atas tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan penjualan atas peralatan dan mesin	0,00	19.720.000,00	(19.720.000,00)	0,00
Pendapatan penjualan atas Gedung dan bangunan	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari penjualan aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari penjualan aset lainnya	0,00	270.748.894,00	(270.748.894,00)	0,00
Jumlah arus kas masuk	17.200.000,00	290.468.894,00	(273.268.894,00)	0,00
Arus Kas Keluar:				
Perolehan tanah	834.377.600,00	2.557.713.360,00	(1.723.335.760,00)	(67,38)
Perolehan peralatan dan mesin	39.232.751.365,00	47.432.138.118,00	(8.199.386.753,00)	(17,29)
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.237.542.334,00	57.957.932.938,00	(16.720.390.604,00)	(28,85)
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	127.257.403.784,00	71.820.656.982,00	55.436.746.802,00	77,19
Perolehan aset tetap lainnya	10.809.516.232,00	11.228.098.288,00	(418.582.056,00)	(3,73)
Perolehan Aset Lainnya	476.840.000,00	0,00	476.840.000,00	0,00
Pembentukan dana cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan modal pemerintah daerah	0,00	9.999.998.915,00	(9.999.998.915,00)	0,00
Jumlah arus keluar	236.098.431.315,00	217.246.538.601,00	18.851.892.714,00	8,68
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi	(236.081.231.315,00)	(216.956.069.707,00)	(19.125.161.608,00)	8,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang, 2022

Investasi jangka panjang pada tahun 2022 sebesar Rp9.999.998.915,00 merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Serang ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah daerah kepada PT. Bank BJB dalam bentuk investasi langsung berupa penyertaan modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank BJB ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00. Dalam penganggarannya penyertaan modal dibagi menjadi dua tahap yakni dimulai dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan tahap selanjutnya untuk pemenuhan penyertaan modal yang dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

Selain itu, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Serang telah menerima hibah aset yang berasal dari PT. Tirta Serang Madani, yang sebelumnya merupakan investasi perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bidang pelayanan pemrosesan air bersih yang berlokasi di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, sebagaimana tercantum dalam Akta Serah Terima Aset PT. Tirta Serang Madani Kepada Pemerintah Kota Serang Nomor 49 tanggal 23 Desember 2021. Aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 2.852 m² beserta bangunan di atasnya dalam bentuk gedung dan bangunan berupa instalasi air.

Berkaitan dengan investasi, kemudahan perizinan merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi suatu daerah. Kemudahan perizinan dalam proses urusan persoalan investasi seperti tidak memerlukan waktu yang lama, persyaratan dokumen yang mudah serta biaya yang terjangkau. Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Proses kemudahan perizinan di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

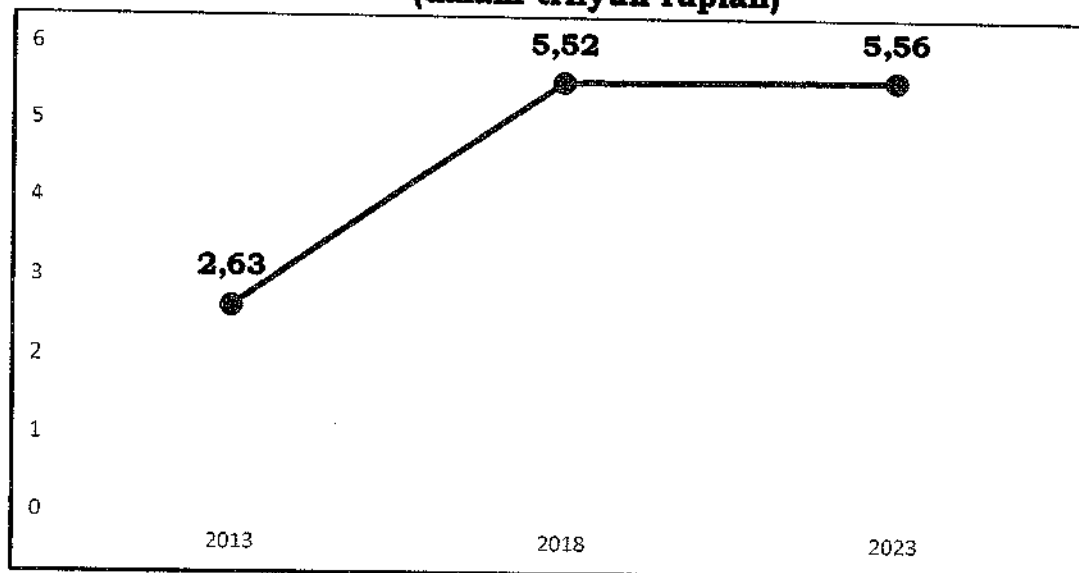
Tabel II.33
Lama Proses Perizinan Kota Serang

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dok)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rph)
1	SIUP	hari	sudah OSS	Gratis
2	TDP	Hari	sudah OSS	Gratis
3	IUI	Hari	sudah OSS	Gratis
4	TDI	Hari	sudah OSS	Gratis

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dok)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rph)
5	IMB	7 hari		L x Index X HSB untuk Semua IMB 1. Sektor IMB Rumah Tinggal. Jasa. Sosial Budaya 2. Khusus Tempat Ibadah Rp = 0

Sumber: DPMPSTSP Kota Serang, 2023

Gambar II.16
Nilai Total Investasi di Kota Serang Tahun 2013-2023
(dalam trilyun rupiah)



Sumber: Bappeda Kota Serang, data diolah, 2023

Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan investasi di Kota Serang mencapai 17 persen. Sedangkan nilai investasi yang ditanamkan di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai Rp5.568.325.102.524,00. Nilai investasi ini meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2013 yang pada saat itu memiliki nilai investasi di Kota Serang sebesar Rp2.631.707.634.615,00.

2. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi keamanannya. Perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2018-2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.34
Angka Kriminalitas Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	65	98	107	87	82
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	4	0	0	1	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	2	0	0	40	NA
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	82	87	25	109	NA
5	Jumlah Kasus Pencurian	278	327	70	119	253
6	Jumlah Kasus Penipuan	75	99	23	34	-
7	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	NA
8	Jumlah Kasus Penggelapan	21	49	8	20	-
9	Lainnya	NA	NA	NA	63	5
10	Total Tindak Kriminal Selama 1 tahun	532	762	251	473	342
11	Jumlah Penduduk	652.192	681.012	702.228	724.552	723.794
	Angka Kriminalitas	8.16	11.19	3.57	6,52	4,72

Sumber: Polres Kota Serang, 2023

Secara umum, terjadi peningkatan kondisi keamanan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir, khususnya pada tahun 2021 yang memiliki angka kriminalitas terendah dalam lima tahun terakhir. Adapun angka kriminalitas pada tahun 2019 mencapai 8,16 dan meningkat hingga 11,19 di tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada angka kriminalitas di Kota Serang hingga mencapai tingkat kejahatan 3-4 kasus di setiap 100.000 penduduk, meskipun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 6,52 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali angka kriminalitas menjadi 4,72 per 100.000 penduduk.

Dari sisi kerukunan masyarakat, tercermin dari indeks kerukunan umat beragama. Indikator ini mencerminkan bagaimana hubungan antaragama terjalin, meliputi aspek toleransi, kerja sama, dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Pada tahun 2019, Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 88,00 dengan kategori rukun sangat tinggi. Walaupun menurun pada tahun 2023 menjadi 85,80 namun tetap berada di kategori rukun sangat tinggi. Hal tersebut perlu dipertahankan dengan kerja sama baik dari pemerintahan serta masyarakat.

Tabel II.35
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Serang
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	88,00	85,00	89,00	86,05	85,80

Sumber: Kementerian Agama Kota Serang, 2023

3. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.36
Jumlah Demonstrasi di Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Demonstrasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Politik	3	8	26	0	0	1
2	Ekonomi	8	13	-	0	0	4
3	Kasus Pemogokan Kerja	2	-	10	0	0	2
4	Bidang Agama	4	-	12	0	0	-
5	Lainnya	5	5	85	105	6	10
	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	22	26	133	105	6	17

Sumber: Polres Serang Kota, 2024

Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah demonstrasi. Sebagian besar demonstrasi terjadi di KP3B, DPRD, dan Ciceri. Demonstrasi yang sering terjadi mengenai ekonomi dan lainnya berkaitan dengan demonstrasi buruh biasanya menuntut kenaikan upah minimum regional sedangkan demonstrasi yang berkaitan politik, kasus pemogokan kerja dan bidang agama tidak terlalu signifikan terjadi di Kota Serang.

4. Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah merupakan iuran wajib daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jumlah insentif pajak yang mendukung investasi di Kota Serang pada tahun 2021 sebesar Rp222.535.674,00, sedangkan retribusi daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu oleh pemerintah daerah. Kota Serang menghasilkan retribusi yang mendukung iklim ekonomi sebanyak Rp1.976.679.093,00 pada tahun 2020.

Tabel II.37
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pajak yang dikeluarkan (Rp Juta)	129.994.111.102	145.581.543.385	139.179.329.606	143.125.000.000	42.176.353.437	192.901.866.052
Jumlah Insentif Pajak yang Mendukung Iklim Investasi	-	-	-	222.535.674	-	-
Jumlah Retribusi yang Dikeluarkan (Rp Juta)	8.560.072.708	13.732.010.605	15.346.436.105	36.099.200.000	27.965.103.050	8.835.467.587
Jumlah Retribusi yang Mendukung Iklim Investasi	-	-	1.976.679.093	-	-	-

Sumber: SIPD Kota Serang, 2024

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah berperan sangat penting terhadap jalannya aktivitas perekonomian, salah satunya iklim usaha. Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yaitu berkaitan dengan perizinan, terkait lalu lintas barang dan jasa, terkait ketenagakerjaan, Berikut tabel yang menampilkan jumlah perda yang mendukung iklim usaha tahun 2018-2022.

Tabel II.38
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda terkait Perijinan	13	13	14	14	1	1
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	5	5	5	5	1	-
3	Jumlah Perda terkait Ketenagakerjaan	1	1	1	1	0	-

Sumber: SIPD Kota Serang, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Serang dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

1. Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Kota Serang telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30.

Tabel II.39
Nilai IKM Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,80	77,74	77,68	78,61	82,29
Indeks Pelayanan Publik	-	-	2,83	3,49	3,65

Sumber: LKE IRB, LKJIP Kota Serang, 2022

Capaian indeks kepuasan masyarakat di Kota Serang semakin meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 82,29 pada tahun 2023. Selain itu, kualitas pelayanan publik Kota Serang menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023. Dimana di tahun 2023 kualitas pelayanan publik Kota Serang sebesar 3,65 yang merupakan peningkatan indeks pelayanan publik pada beberapa tahun terakhir.

2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2023 adalah 60,02 atau kategori B. Peningkatan ini menjadikan Kota Serang mengalami kenaikan kategori capaian akuntabilitas kinerja dari CC menjadi B. Meskipun begitu, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Serang masih belum berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel II.40
Capaian Realisasi AKIP Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	54,64	55,33	58,68	59,04	60,02
Kategori AKIP	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: LKJIP Kota Serang, 2023

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian PAN dan BR melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kota Serang. Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan.

Tabel II.41
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,18	58,30	57,69	60,91	70,97
Kategori IRB	CC	CC	CC	B	BB

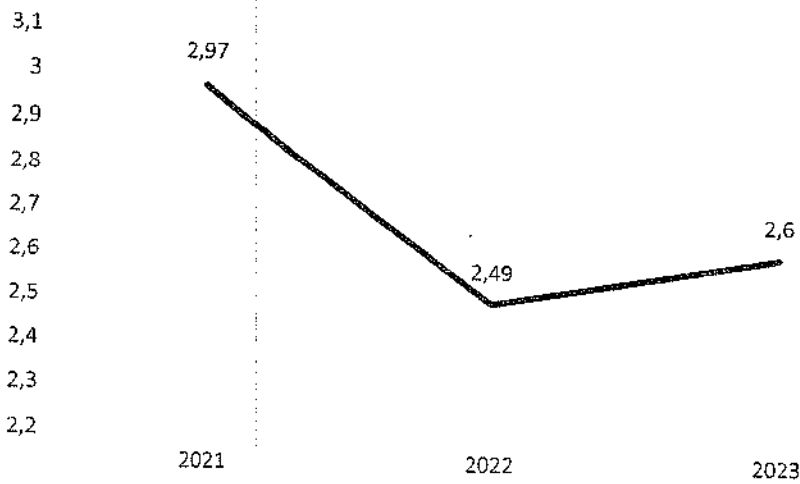
Sumber: LKJIP Kota Serang, 2023

Capaian indeks reformasi birokrasi dengan predikat B diperoleh pada tahun 2022 (60,91) dan meningkat signifikan di tahun 2023 menjadi 70,97 dengan kategori BB. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Serang menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Meskipun masih terdapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Serang, tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik baik kepada masyarakat maupun internal pemerintah merupakan salah satu akselerator dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi berbagai pelayanan dan kinerja dalam era reformasi birokrasi saat ini. Dalam melihat capaian implementasi digitalisasi pemerintahan, maka dirumuskan Indeks SPBE yang merupakan ukuran untuk mengevaluasi dan memantau implementasi *e-Government* di seluruh elemen pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar II.17
Capaian Indeks SPBE Kota Serang Tahun 2021 – 2023



Sumber: LKJIP Kota Serang, 2023

Capaian kinerja terkait *e-Government* di Kota Serang masih belum terlihat progres positifnya dimana pencapaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021. Terlebih pada tahun 2022, Indeks SPBE juga menurun cukup drastis hingga 2,49. Kondisi ini tentu memerlukan adanya akselerasi dalam mewujudkan implementasi digitalisasi kinerja Pemerintah Kota Serang pada kebijakan pembangunan yang akan datang.

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SERANG TAHUN 2008-2025

Pemerintah Kota Serang melaksanakan evaluasi berkenaan dengan pembangunan jangka panjang sebagai upaya dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan ke depan yang maju dan berkelanjutan. Evaluasi ini dilaksanakan di seluruh periode pembangunan dimana pada tahap terakhir dilakukan evaluasi hingga tahun 2022. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tersebut, Kota Serang memiliki visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 adalah:

“Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025”

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang Kota Serang dengan rincian sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berkualitas dan berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang mandiri, unggul dan berdaya saing.

Misi 3: Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas.

Misi 4: Mewujudkan keserasian tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan yang asri.

Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan berwibawa.

Dokumen RPJPD Tahun 2008-2025 Kota Serang masih bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kota Serang tahun 2008 sebagai awal periode RPJPD.

Tabel II.42
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Serang
Tahun 2008-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan	Capaian pada Tahun Kinerja (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Status
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,99 (2008)	76,43	12,41	Pertumbuhan Positif
2	Angka kemiskinan	6,19 (2008)	6,20	0,16	Pertumbuhan Positif
3	Angka pengangguran	17,55 (2009)	7,45	-57,54	Pertumbuhan Positif
4	Pertumbuhan ekonomi	5,63 (2008)	4,74	-15,81	Pertumbuhan Negatif
5	PDRB per kapita (jt rupiah)	8,83 (2008)	55,04	523,33	Pertumbuhan Positif
6	Ketimpangan pendapatan	0,398 (2016)	0,306	-23,12	Pertumbuhan Positif

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Serang 2008-2025

Berdasarkan data yang disajikan, tergambar bahwa dari enam capaian indikator makro, terdapat satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu pada Pertumbuhan Ekonomi. Adapun pada Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, PDRB per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan peningkatan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren positif dimana dari 67,99 pada tahun awal periode perencanaan menjadi 72,98 pada tahun 2022. Tren positif juga ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan yang meningkat dari 6,19 pada tahun 2008 menjadi 5,94 pada tahun 2022. Angka pengangguran menunjukkan penurunan capaian yang dapat diartikan menjadi pertumbuhan positif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai penurunan capaian yang diartikan sebagai pertumbuhan negatif, pada capaian tahun kinerja 2022 sebesar 4,71 yang turun sebanyak 16,34 persen dari capaian pada awal tahun perencanaan. PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2022.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2008-2013, tahap kedua pada periode 2014-2018, tahap ketiga pada periode 2018-2023, dan tahap keempat pada periode 2024-2026. Kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.

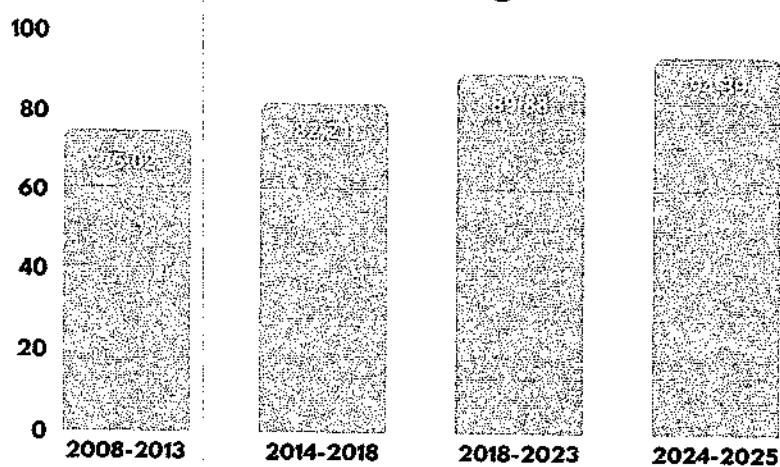
Tabel II.43
Kriteria Penilaian Kinerja

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66 \leq 75\%$
4	Rendah	$51 \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian "TINGGI". Indikator dengan predikat ini berada pada kisaran 85,37 persen dari total keseluruhan indikator di tiap periode RPJMD Kota Serang.

Gambar II.18
Rata-rata Hasil Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode RPJMD Kota Serang



Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Serang, 2008-2025

Jika dirata-rata, tingkat capaian kinerja RPJMD akan menghasilkan persentase sebagai berikut. Untuk periode I, rata-rata capaian kinerja indikator

berada pada angka 75,02% dimana masuk predikat Tinggi. Sementara itu, terjadi peningkatan pada capaian kinerja RPJMD periode II, rata-rata capaian kinerja indikator berada pada angka 82,21% dimana masuk predikat Tinggi, dan terus meningkat hingga periode III yaitu sebesar 89,88% dengan predikat Tinggi. Pada periode IV, kembali terjadi peningkatan capaian kinerja RPJMD menjadi 94,39%.

Sebagaimana hasil rata-rata capaian kinerja tiap periode, adapun faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan RPJPD Kota Serang berdasarkan tiap periode tahapan, antara lain sebagai berikut:

Tabel II.44
Periode I RPJPD (RPJMD Tahun 2008-2013)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
• Program penataan administrasi kependudukan berjalan lancar dibarengi kesadaran masyarakat	
Infrastruktur Berkelanjutan	
• Program peningkatan jalan terlaksana dengan baik	• Belum optimalnya jumlah sarana penghubung • Belum adanya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan • Belum optimalnya pengelolaan air bersih
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Program pengembangan wawasan kebangsaan berjalan efektif • Program pengembangan peran kepemudaan dan manajemen olahraga berjalan dengan baik • Adanya peningkatan sarana prasarana sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif	
Perekonomian	
• Adanya peningkatan produksi perikanan	• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan • Kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti kelompok budidaya • Belum optimalnya kompetensi SDM • Kurangnya promosi pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan koperasi

Tabel II.45
Periode II RPJPD (RPJMD Tahun 2014-2018)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan • Program penertiban administrasi kependudukan terlaksana dengan baik • Adanya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan • Adanya program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Adanya upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik • Terdapat program perbaikan sistem administrasi kearsipan • Upaya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan berjalan dengan optimal	• Belum adanya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan • Upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan • Adanya ketersediaan dokumen perencanaan yang diperlukan maupun perijinan yang diharuskan/berlaku	• Adanya permasalahan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan • Program perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tidak optimal • Integrasi aplikasi layanan e-government dan aplikasi layanan publik tidak terealisasi dengan baik • Adanya permasalahan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan • Fasilitasi dan koordinasi perencanaan drainase tidak berjalan dengan baik • Perbaikan sarana irigasi dan pengaturan pengairan tidak berjalan secara optimal • Upaya membangun fasilitas sarana sanitasi tidak terealisasi dengan baik • Kurangnya penerapan program penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat • Program penyediaan dan pengelolaan air tidak berjalan dengan optimal • Program pengelolaan areal pemakaman tidak berjalan dengan optimal • Membangun, memelihara, dan mendayagunakan taman kota / RTH

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat
		sebagai ruang publik yang memiliki nilai guna tinggi bagi pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat tidak berjalan dengan optimal • Kurangnya penataan dan pengembangan perumahan serta permukiman layak bagi masyarakat • Proses pengelolaan siklus air berkelanjutan serta penyusunan kerangka aturan dan perencanaan strategis pada pengelolaan aset, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan sanitasi belum berjalan dengan baik
Pengembangan Sumber Daya Manusia		
• Penuntasan buta aksara berjalan dengan maksimal • Adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung partisipasi peserta didik • Adanya fasilitasi secara bertahap kebutuhan gedung perpustakaan • Adanya peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat dan pengembangan sistem kesehatan • Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) • Adanya upaya perlindungan anak dan perempuan yang bekerja secara optimal • Terlatihnya perempuan di pedesaan bidang usaha ekonomi produktif • Adanya implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat • Adanya peningkatan pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional • Adanya pengembangan potensi dan prestasi melalui pembinaan organisasi		• Terdapatnya pekerjaan yang gagal lelang, seperti pada Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. • Masih kurangnya tenaga pendidik/guru khususnya yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal • Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah atas • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat di bidang kesehatan belum berjalan dengan optimal • Tidak optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak • Pelaksanaan imunisasi belum berjalan dengan optimal • Belum optimalnya program mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat • Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tidak berjalan secara menyeluruh

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	• Kurangnya penertiban administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran • Tidak adanya upaya melakukan pembinaan secara rutin dan pelatihan secara bertahap kepada kader perempuan. • Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait peran perempuan dalam lembaga swasta • Kurangnya minat terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat • Kurangnya upaya pembangunan sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat • Peningkatan upaya penegakan hukum tidak optimal • Pembinaan kelembagaan masyarakat belum berjalan dengan optimal • Pengembangan prestasi pemuda belum dibarengi dengan peningkatan jumlah organisasi olahraga • Peningkatan potensi dan prestasi pemuda dengan mengadakan kegiatan event belum berjalan dengan optimal
Perekonomian	
• Dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan padat karya, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha baru serta layanan perkantoran • Pembinaan maupun pendataan sinergitas hubungan industrial terlaksana dengan baik • Adanya upaya melakukan pembinaan kepada pedagang pasar serta melakukan peningkatan SDM yang tidak stabil • Pemantapan sistem agribisnis pertanian dan perikanan • Adanya upaya pengembangan inkubator bisnis UMKM dan Koperasi • Adanya pemantapan kinerja pemangku kepentingan	• Belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian • Belum maksimalnya identifikasi, pengumpulan data dan analisis data produksi dan data pengeluaran pangan serta data cadangan pangan kota. • Upaya peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi belum terealisasi dengan baik

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; Penataan destinasi pariwisata • Adanya peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing	

Tabel II.46
Periode III RPJDP (RPJMD Tahun 2018-2023)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
Sistem pelaporan dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah berjalan dengan baik	• Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tidak berjalan dengan optimal • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik serta Pengembangan budaya organisasi berorientasi pelayan tidak dijalankan secara berkesinambungan • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik kurang dimanfaatkan • Pemantapan profesionalitas aparatur didukung oleh penataan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan tidak optimal
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan telah terlaksana dengan baik	• Upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan tidak berjalan dengan optimal • Belum optimalnya penuntasan wajib belajar dua belas tahun • Belum optimalnya peningkatan kualitas lembaga formal dan nonformal serta peningkatan pendidikan berbasis kompetensi belum berjalan dengan baik
Perekonomian	
• Upaya memperluas kerja sama investasi dan pemantapan kompetensi dan daya saing tenaga kerja berjalan secara optimal	• Belum adanya konsistensi dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian • Tidak berjalannya pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	• Pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri belum berjalan dengan optimal. Ini berdampak pada peningkatan kualitas, daya saing serta kehandalan UMKM dan Koperasi • Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dan peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat tidak berjalan secara efektif • Upaya pengembangan industri kecil dan pemantapan sistem agribisnis tidak terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan	
• Adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan	• Percepatan pembangunan dan pemerataan prasarana, sarana dan fasilitas kota tidak berjalan dengan optimal • Belum adanya peningkatan perilaku ramah lingkungan di lingkungan masyarakat • Tidak adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya dalam penanganan timbunan sampah • Belum berjalannya pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang dengan baik

Tabel II.47
Periode IV RPJPD (RPJMD Tahun 2024-2026)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
	• Upaya pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih belum terealisasikan dengan baik dan berkelanjutan • Belum optimalnya penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan serta budaya organisasi • Penanaman budaya taat hukum di masyarakat khususnya pada budaya korupsi belum terealisasi dengan baik • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya terealisasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Adanya upaya pemantapan daya saing sumber daya manusia dengan adanya program penuntasan wajib belajar dua belas tahun; perintisan wajib belajar lima belas tahun; peningkatan pendidikan keterampilan IPTEK • Telah berjalannya pengembangan dan penguatan sistem kesehatan dengan optimal • Pembangunan sudah melibatkan partisipasi kepemudaan dan perempuan	• Upaya pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gender belum terealisasi dengan baik
Perekonomian	
• Berjalannya jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin • Adanya program pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja	• Perkuatan potensi industri strategis tidak berjalan secara efektif • Pemantapan sistem agribisnis pertanian serta pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tidak ditindaklanjuti dengan baik • Tidak adanya program Perluasan jaringan perdagangan luar negeri • Tidak adanya program pengungkit jasa real estate dan konstruksi • Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; penataan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	destinasi pariwisata tidak diimplementasikan dengan baik • Tidak optimalnya pendayagunaan potensi lokal dan pengembangan UMKM serta koperasi • Belum optimalnya pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja • Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga belum terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan	
	• Kurangnya pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang • Kurangnya upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan

Dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan maupun capaian hasil pelaksanaan pembangunan jangka Panjang Kota Serang, maka kesimpulan dari evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang yang dijabarkan dalam poin-poin kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan tahapan RPJPD Kota Serang telah dilaksanakan selama empat tahapan dan saat ini sedang masa pembangunan tahap IV yakni RPD Kota Serang 2024-2026.
2. Terdapat empat komponen visi dalam RPJPD yakni komponen visi terkait terdepan pendidikan (IPM) terdepan jasa (kontribusi sektor jasa), terdepan perdagangan (kontribusi sektor perdagangan), dan Serang SMART (LPE).
3. Capaian makro Kota Serang mengalami peningkatan positif dari tahun dasar 2008. Dari lima indikator antara lain IPM, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita serta Indeks Gini, hanya terdapat satu indikator yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang mengalami perlambatan dimana di tahun 2008 data awal sebesar 5,63%, sedangkan di tahun 2022 sebesar 4,71 dengan pertumbuhan -16,34 persen. Hal ini dikarenakan Covid-19 yang melanda seluruh wilayah sehingga membuat perekonomian di

hampir semua daerah turun drastis. Sedangkan Capaian tertinggi adalah PDRB per kapita dengan data awal 8,83 juta rupiah per kapita mengalami pertumbuhan 477,24% dengan realisasi 50,97 juta rupiah per kapita.

4. Sasaran pokok Kota Serang diukur menggunakan 4 periode RPJMD antara lain: RPJMD tahun 2008-2013, RPJMD 2014-2018, RPJMD 2018-2023 serta RPD 2024-2026
5. Pada periode I RPJMD (2008-2013), memiliki capaian sebesar 75,02 persen dengan kategori Tinggi. Indikator yang memiliki capaian cukup rendah terkait Jumlah Pembinaan kelompok budidaya ikan/nelayan, Persentase cakupan pelayanan air bersih, Luas wilayah banjir dan Luas wilayah kumuh.
6. Pembangunan di Tahap ke II (2014-2018) memiliki capaian sebesar 82,21 persen dengan kategori Tinggi. Indikator yang memiliki capaian cukup rendah terkait Angka Kematian Bayi, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Persentase penanganan PMKS, Persentase Anak memiliki Akta Lahir, Luas irigasi Kota dalam kondisi baik dan luas RTH.
7. Sedangkan pada tahap III, terjadi Pandemi COVID-19 yang merupakan permasalahan global sehingga terjadi gejolak perekonomian dan sosial masyarakat yang menyebabkan berbagai capaian pembangunan tidak optimal, namun capaian periode ke III sebesar 89,88% dengan kategori Tinggi.
8. Tahun 2025 akan memiliki rata-rata capaian pembangunan sebesar 94,39%. Indikator pembangunan yang memiliki capaian Sedang yakni LPE Sektor Jasa, Real Estate dan Konstruksi.
9. Kota Serang masih memiliki sisa 3 tahun untuk mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan ekonomi di sektor Jasa, Real Estate dan Konstruksi.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan kesimpulan evaluasi RPJMD ini akan menyempurnakan kekurangan pada perumusan dokumen perencanaan, utamanya perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai dokumen induk bagi daerah. Rekomendasi yang tepat sasaran dan memiliki relevansi yang positif akan memberikan dampak signifikan dalam pencapaian setiap sasaran pembangunan daerah karena semakin terarah dan efektif dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan. Berikut rekomendasi dari hasil evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang:

1. Optimalisasi dalam peningkatan perekonomian terutama di sektor unggulan Serang yaitu Sektor Jasa, *Real Estate* dan Konstruksi.
2. Kondusivitas wilayah serta upaya pemerintah dengan menyediakan kemudahan perizinan dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan dapat meningkatkan potensi investasi di Kota Serang.
3. Perlu adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian daerah mengingat sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan daerah Kota Serang.
4. Perlu adanya sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus mengoptimalkan dan mengefektifkan setiap penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik dari skala kelurahan hingga perangkat daerah
5. Dengan adanya fokus anggaran pada komponen visi terkait peningkatan ekonomi sektor perdagangan dan jasa, diharapkan pencapaian visi "TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG SMART 2025".

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Dalam demografi terdapat aspek kependudukan yang statis dan dinamis sifatnya. Aspek statis ditunjukkan oleh komposisi penduduk misalnya. Komposisi penduduk merupakan gambaran kondisi penduduk pada suatu titik tertentu, yaitu pada saat dilaksanakan sensus atau survei. Sesudah tanggal atau hari tersebut, komposisi penduduk akan berubah. Perubahan komposisi ini terjadi karena perubahan kelahiran, kematian dan migrasi. Jadi dalam demografi juga dipelajari aspek statis dan aspek dinamis, yang keduanya saling mempengaruhi.

Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sarana (infrastruktur) suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan sarana pembangunan baik transportasi, perumahan hingga air minum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana pembangunan menjadi salah satu domain utama perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus

disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

Kota Serang didominasi oleh sektor ekonomi perdagangan, konstruksi, dan *real estate*, sektor ini memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan, khususnya bagaimana peningkatan kompetensi angkatan kerja yang mampu diserap oleh lapangan usaha berdasarkan *skill*/keterampilan yang tersedia.

Tabel II.48
Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah

Penduduk Kota Serang diproyeksikan mencapai 926.232 jiwa pada tahun 2045, Angka ini meningkat kisaran 202.438 jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kota Serang jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kota Serang dalam menyejahterakan kehidupannya.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kota Serang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2025, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 104,07 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 100,83. Adanya penurunan rasio jenis kelamin mendekati angka 100 ini mengindikasikan semakin berimbang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah proyeksi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Serang hingga tahun 2045.

Tabel II.49
Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045 berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	369.567	380.210	405.069	427.671	447.733	465.027
Perempuan	354.227	365.347	391.999	417.117	440.332	461.205
Sex Ratio	104,33	104,07	103,33	102,53	101,68	100,83

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi.

Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk di Kota Serang adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi *aging population*. Fenomena ini terlihat dari semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda mengalami penurunan dari awal pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045.

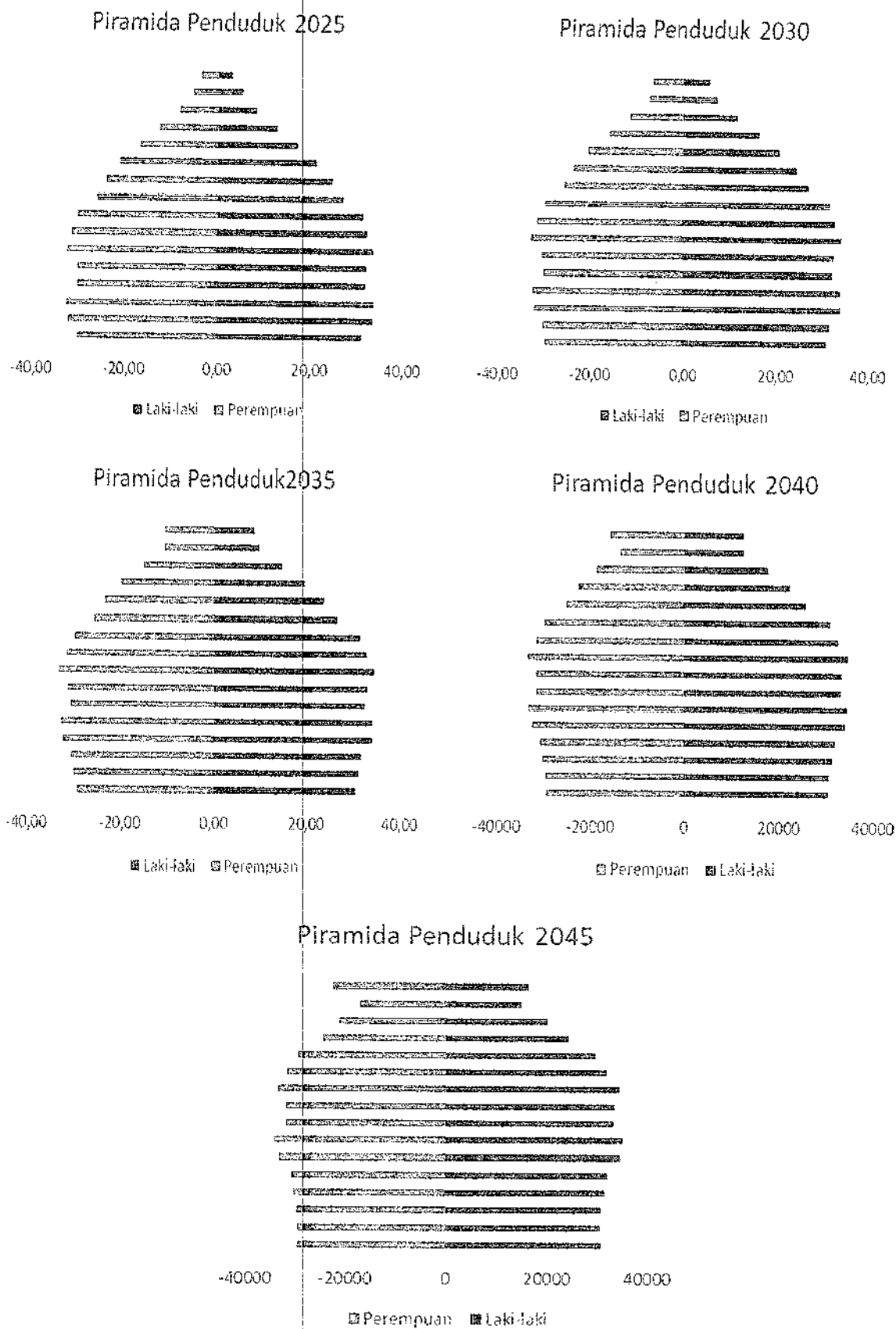
Tabel II.50
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang

PARAMETER	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Komposisi Umur (Jiwa)						
0-14	193.437	193.241	188.555	183.144	181.651	181.567
15-64	501.728	518.562	558.654	592.334	615.407	632.024
65+	28.629	33.754	49.859	69.310	91.007	112.641
Dependency Ratio	44,26	43,77	42,68	42,62	44,31	46,55

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 44,26 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 penduduk usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kota Serang berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi jangka panjang. Adapun jendela bonus demografi di Kota Serang akan terus terlaksana hingga periode ketiga dan pada periode keempat.

Gambar II.19
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (data diolah)

Dari piramida penduduk Kota Serang, terlihat bahwa semakin mendekati tahun 2045, maka piramida penduduk semakin memiliki distribusi yang tidak jauh berbeda antar kelompok umur. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat semakin baik dengan semakin tingginya usia penduduk

tua. Namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Serang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di usia tua sehingga tidak menjadi beban bagi usia produktif lainnya.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kota Serang, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun

pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, Tim Penyusun melakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk, secara umum dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya meliputi:

1. Rumah/Tempat Tinggal

Pada Kawasan urban seperti Kota Serang, pertumbuhan populasi memberikan wujud nyata pada tantangan yang mendesak yaitu kebutuhan akan rumah. Fenomena ini dikenal dengan istilah "*backlog* perumahan" yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan rumah yang memadai. Tingginya *backlog* perumahan menjadi refleksi dari keinginan masyarakat yang berusaha mencari tempat tinggal yang layak. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat, permintaan akan tempat tinggal yang terjangkau dan berkualitas meningkat secara signifikan. Namun, ketersediaan rumah belum mampu mengejar lajunya. Rumah merupakan kebutuhan primer terkait papan yang wajib dimiliki oleh masyarakat.

Dalam dinamika perkotaan yang kompleks, tergambar kebutuhan mendesak akan solusi perumahan yang inovatif dan terjangkau. Rumah tangga yang menghadapi fenomena *backlog* perumahan sering kali menghadapi keterbatasan ekonomi, memaksa mereka tinggal di lingkungan yang kurang berkualitas. Dampaknya tak hanya terbatas pada kondisi perumahan yang tidak layak, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Pentingnya mengatasi *backlog* perumahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga menyangkut aspek-aspek sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perumahan yang terjangkau, masyarakat dapat lebih stabil secara ekonomi dan lebih baik mengakses peluang-peluang pendidikan serta pekerjaan. Ini dapat menciptakan efek domino positif yang pada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Serang.

Tabel II.51
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Kebutuhan Rumah	116.101	122.543 - 157.565	138.649 - 173.670	154.754 - 189.775	170.859 - 205.881	186.965 - 221.986

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023

Pada Tahun 2023, tingkat *backlog* perumahan Kota Serang berada di angka 116.161 rumah tinggal. Jumlah ini relatif tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat membutuhkan fasilitasi rumah tinggal yang sesuai dengan profil ekonomi yang dimiliki. Permasalahan perumahan selain disebabkan nilai properti yang tinggi, juga dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan lahan. Maka itu pola pembangunan yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada model tapak namun juga pembangunan vertikal yang memiliki daya serap hunian lebih tinggi. Apabila tidak didukung dengan partisipasi yang komprehensif dari Pemerintah terutama lewat kebijakan yang bersifat intervensi maka angka *backlog* perumahan akan terus meningkat. Diprediksi seiring penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga pada kondisi normal, angka akan mencapai 186.965 – 221.986 rumah tinggal pada Tahun 2045.

2. Air Bersih

Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan ketersediaan air minum di Kota Serang, analisis proyeksi kebutuhan air menjadi landasan penting bagi perencanaan dan tindakan ke depan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan air di masa mendatang adalah kunci untuk merancang kebijakan dan infrastruktur yang responsif. Proyeksi kebutuhan air bersih dimulai dengan memahami tren pertumbuhan populasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sanitasi, dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan proporsional. Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup skenario pertumbuhan populasi yang realistis. Pada kawasan urbanisasi seperti Kota Serang, aspek seperti profil penduduk dan entitas ekonomi akan mempengaruhi permintaan air yang ditujukan untuk kebutuhan domestik, industri, dan perdagangan.

Pemetaan ketersediaan sumber daya air menjadi bagian penting dari proyeksi. Proyeksi harus memperhitungkan ketersediaan air permukaan dan air tanah serta risiko kekeringan atau penurunan kualitas air. Analisis ini memberikan pemahaman apakah sumber daya air yang ada dapat memenuhi

kebutuhan yang diproyeksikan. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berkaitan dengan kebutuhan air, terutama di sektor industri dan komersial. Proyeksi kebutuhan air harus mencakup evaluasi dampak pertumbuhan ekonomi dan perluasan industri terhadap konsumsi air, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan ekonomi. Apabila mengacu pada struktur ekonomi Kota Serang, sektor konstruksi dan real estate menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam data pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Kedua sektor ini cenderung memiliki korelasi dengan kebutuhan konsumsi air.

Tabel II.52
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (SR)	50.693	52.414-53.120	57.201-59.281	62.425-66.155	68.127-73.827	74.349-82.388

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023

Proyeksi kebutuhan air harus mencakup upaya konservasi dan peningkatan efisiensi penggunaan air. Implementasi teknologi dan praktik-praktik konservasi dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya air, memastikan bahwa kebutuhan dapat dipenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kesiapan Infrastruktur air juga patut diperhitungkan terutama dalam menjawab tantangan kecukupan kapasitas dan kualitas yang tersedia.

Pada Tahun 2023, kebutuhan air minum di Kota Serang mencapai 50.693 sambungan rumah (SR). Kebutuhan air di Kota Serang diperoleh dari PDAM Tirta Albantani dan PDAB Tirta Madani, dimana pengembangan sistem penyediaan air minum adalah salah satu program prioritas. Cakupan peningkatan pipanisasi saluran air diharapkan terus meningkat untuk membuka akses terhadap distribusi air bersih kepada seluruh rumah secara merata. Kebutuhan tingkat SR dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, Pada Tahun 2045 diprediksi kebutuhan SR meningkat hampir 2 kali lipat di kisaran 74.349 - 82.388. Dibutuhkan partisipasi banyak pihak, termasuk Pemkot Serang, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menyusun langkah integral dalam memenuhi kebutuhan air. Keterlibatan ini memastikan bahwa solusi-solusi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

3. Energi/listrik

Dalam upaya merencanakan kebutuhan listrik di masa depan, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi permintaan energi dan ketersediaan sumber daya listrik sangat penting. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi berdampak signifikan pada kebutuhan listrik. Proyeksi harus mempertimbangkan pergeseran pola konsumsi energi seiring dengan proses urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Dengan perkembangan teknologi, sektor-sektor seperti transportasi, industri, dan teknologi informasi semakin mengadopsi elektrifikasi. Proyeksi kebutuhan listrik perlu memperhitungkan dampak dari elektrifikasi sektor-sektor baru ini. Pertumbuhan teknologi memiliki peran kunci dalam proyeksi kebutuhan listrik. Inovasi dalam efisiensi energi dan perkembangan teknologi penyimpanan energi dapat memengaruhi cara kebutuhan listrik diproyeksikan di masa mendatang. Langkah-langkah konservasi dan peningkatan efisiensi energi merupakan strategi krusial dalam manajemen kebutuhan listrik. Inovasi teknologi yang mendukung penggunaan energi yang lebih efisien dapat membantu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Kondisi infrastruktur energi juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik. Proyeksi perlu mempertimbangkan investasi dalam pengembangan pembangkit, jaringan distribusi, dan teknologi penyimpanan energi untuk memastikan pasokan yang andal.

Tabel II.53
Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Jumlah Rumah	116.101	122.543 - 157.565	138.649 - 173.670	154.754 - 189.775	170.859 - 205.881	186.965 - 221.986
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KWh)	647.753.455	769.225.780	974.838.196	1.235.410.374	1.565.632.942	1.984.123.301

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023

Pada Tahun 2022, tingkat konsumsi listrik di Kota Serang mencapai 647.753.455 Kwh. Angka ini diprediksi akan terus tumbuh seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi hingga diprediksi kebutuhan listrik mencapai 1.984.123.301 Kwh di tahun 2045. Penggunaan alat kelistrikan yang efisien dan perubahan perilaku konsumsi listrik akan menjadi katalisator penting untuk mengendalikan konsumsi listrik di Kota Serang sehingga mampu mengurangi kebutuhan listrik yang tidak efisien.

4. Persampahan

Timbunan sampah mengacu pada jumlah total sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau komunitas dalam periode waktu tertentu. Sampah ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, perdagangan, dan sektor layanan. Timbunan sampah menjadi indikator utama aktivitas konsumsi dan produksi dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbunan sampah melibatkan berbagai aspek, seperti pola konsumsi masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah, infrastruktur daur ulang, dan kesadaran lingkungan. Semakin meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup cenderung meningkatkan timbunan sampah.

Penting untuk mengelola timbunan sampah dengan bijak guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Praktik pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan energi dari sampah menjadi pendekatan yang umum digunakan untuk mengelola timbunan sampah secara berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mengurangi timbunan sampah dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan.

Tabel II.54
Proyeksi Timbunan Sampah Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Timbunan Sampah (kg)	219.503.030	208.026.640	217.703.520	232.750.280	246.684.520	258.146.798

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan>

Tata kelola timbunan sampah saat ini menjadi permasalahan laten pada banyak kota-kota besar termasuk Kota Serang. Produksi sampah cenderung terus meningkat seiring penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil survei nasional. Setiap penduduk menghasilkan rerata sampah sebanyak 0,8 kg per hari. Pada Tahun 2023, produksi timbunan sampah Kota Serang mencapai 219.503,03 ton. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong menjadi tujuan akhir pembuangan sampah yang diproduksi Kota Serang. Diindikasikan bahwa TPA ini sudah mencapai *over capacity* dan diperlukan revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya manfaat dari TPA Cilowong. Masalah sampah tidak hanya terjadi pada TPA Cilowong namun juga adanya masalah sampah liar yang tersebar di beberapa

titik di wilayah Kota Serang. Pemkot Serang berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan sampah secara bijak dan komprehensif.

5. Sarana Kesehatan

Infrastruktur di bidang kesehatan merupakan upaya dalam mewujudkan standar pelayanan minimal pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Adapun upaya mencapai SDM Kota Serang yang unggul di tahun 2045, maka dibutuhkan unit kesehatan rumah sakit sebanyak 16 unit, 1 rumah sakit bersalin, 21 unit puskesmas, 46 unit poliklinik, 9 puskesmas pembantu, 34 unit apotek, dan 664 unit posyandu.

Tabel II.55
Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
• Rumah sakit	11	12	13	14	15	16
• Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	1	1	1
• Puskesmas	16	17	18	19	20	21
• Poliklinik	35	36	38	41	43	46
• Puskesmas Pembantu	7	7	8	8	9	9
• Apotek	26	27	29	30	32	34
• Posyandu	648	648	648	648	648	648

Sumber: data diolah

6. Sarana Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan merupakan modal dasar dalam membangun SDM Kota Serang yang berkualitas. Berbagai upaya terus dilakukan khususnya dalam meningkatkan mutu dan inklusifitas pendidikan. Dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045, maka Kota Serang membutuhkan sarana prasarana pendidikan yang ideal dimana diharapkan terdapat 228 unit TK/RA; 286 unit SD/MI; 150 unit SMP/MTS dan 115 unit SMA/MA/SMK.

Tabel II.56
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
• TK/RA	228	228	228	228	228	228
• SD/MI	289	289	289	289	289	289
• SMP/MTS	147	147	150	150	150	150
• SMA/MA/SMK	106	108	115	115	115	115

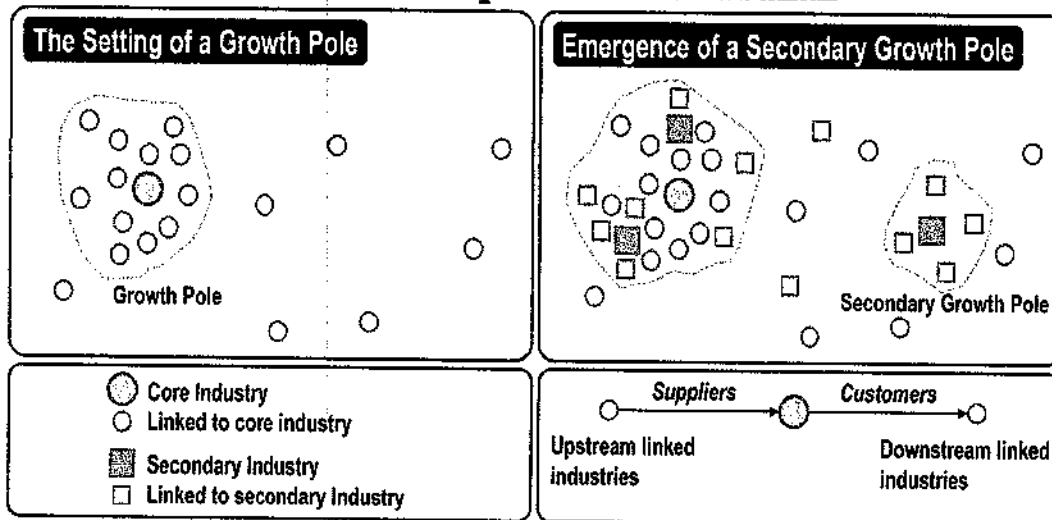
Sumber: data diolah

2.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA SERANG

Pusat pertumbuhan, atau dikenal sebagai konsep growth pole, merupakan suatu kerangka yang memiliki peran penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Teori Growth Pole, yang pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan dan menganalisis pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks daerah atau wilayah tertentu, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai penggerak bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya, baik melalui investasi, inovasi, maupun pertumbuhan pesat dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Pusat pertumbuhan tersebut umumnya menjadi fokus pengembangan ekonomi, menampung sektor-sektor kunci seperti industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang berkembang dengan baik, termasuk sistem transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, mendukung pertumbuhan pusat tersebut dan memfasilitasi integrasi kegiatan ekonomi di seluruh wilayah.

Gambar II.20
Ilustrasi Konsep Pusat Pertumbuhan



Sumber: data diolah

Karakteristik pusat pertumbuhan juga disesuaikan dengan kondisi empiris wilayah yang dimaksud. Wilayah Kabupaten dengan ciri khas kombinasi aktivitas urban dan dominasi aktivitas pertanian tentunya memiliki potensi pusat pertumbuhan yang berbeda dengan wilayah kota. Di wilayah kota, Simpul pusat pertumbuhan suatu kota adalah area di dalam kota yang menjadi fokus utama untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Simpul ini umumnya memiliki karakteristik sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan hiburan yang ramai dan beragam. Simpul pusat pertumbuhan kota biasanya terdiri dari distrik perkantoran, pusat perbelanjaan, area hiburan, serta *landmark* penting seperti pusat kebudayaan atau bangunan bersejarah.

Di samping itu, simpul pusat pertumbuhan kota juga sering menjadi tempat dengan infrastruktur transportasi yang sangat baik, termasuk stasiun kereta api, terminal bus, dan akses mudah ke jalan raya utama. Hal ini membuatnya menjadi titik penting dalam distribusi barang dan mobilitas penduduk.

Selain itu, simpul pusat pertumbuhan kota juga merupakan tempat di mana kegiatan keuangan dan investasi berkumpul, dengan konsentrasi bank, perusahaan besar, dan lembaga keuangan lainnya. Secara keseluruhan, simpul pusat pertumbuhan kota adalah jantung dari kehidupan ekonomi dan sosial kota tersebut, yang menarik orang untuk tinggal, bekerja, dan berkunjung.

Pusat pertumbuhan di wilayah Kota Serang dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan perkembangan awal pusat-pusat pertumbuhan yang umumnya telah menunjukkan ciri-ciri empiris sebagai pusat pertumbuhan. Sementara itu, perspektif identifikasi pusat pertumbuhan dapat dilihat dari struktur penataan ruang dan penetapan kawasan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan kota, yang menjadi dasar hukum untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi posisi Kota Serang dengan mempertimbangkan konteks nasional dan regional secara konstelasi. Evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi pusat-pusat pertumbuhan dalam skala wilayah administrasi Kota Serang.

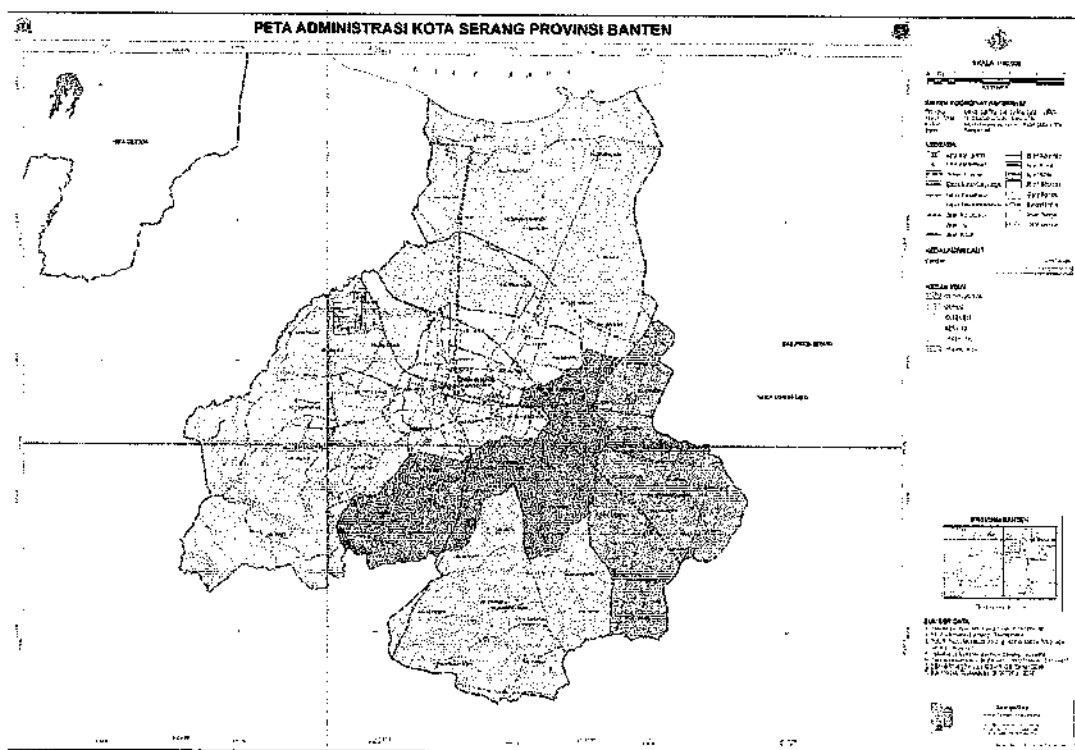
2.7.1 Kedudukan Kota Serang Secara Regional

Kota Serang merupakan salah satu wilayah kota yang berada di lingkup administrasi Provinsi Banten. Secara geografis, Kota Serang terletak di antara 5°99' – 6°22' Lintang Selatan dan 106°07' 106°25' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Serang adalah sebesar 266,189 km² yang terbagi menjadi 6 wilayah

kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 723.294 jiwa. Kota Serang juga merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sehingga dapat dikatakan bahwa kota ini merupakan bagian dari Kabupaten Serang. Batas-batas wilayah Kota Serang adalah sebagai berikut:

Bagian Utara	: Laut Jawa
Bagian Timur	: Kabupaten Serang
Bagian Barat	: Kabupaten Serang
Bagian Selatan	: Kabupaten Serang

Gambar II.21
Peta Administrasi Kota Serang



Sumber: RTRW Kota Serang, diolah 2024

Berkaitan dengan kedudukan Kota Serang di ranah Provinsi Banten, telah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 bahwa Kota Serang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama dengan Kabupaten Serang dengan fokus pelayanan pada kegiatan pemerintahan, pendidikan, industri, jasa, perdagangan, energi, permukiman dan transportasi laut.

Selain memiliki peran sebagai PKN, Kota Serang dalam hal perannya di Provinsi Banten adalah juga sebagai bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari berbagai sektor yaitu:

1. Kawasan strategis provinsi Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di arahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang
2. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon
3. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu diarahkan di Kabupaten Serang dan Kota Serang
4. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama diarahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ini merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kota Serang

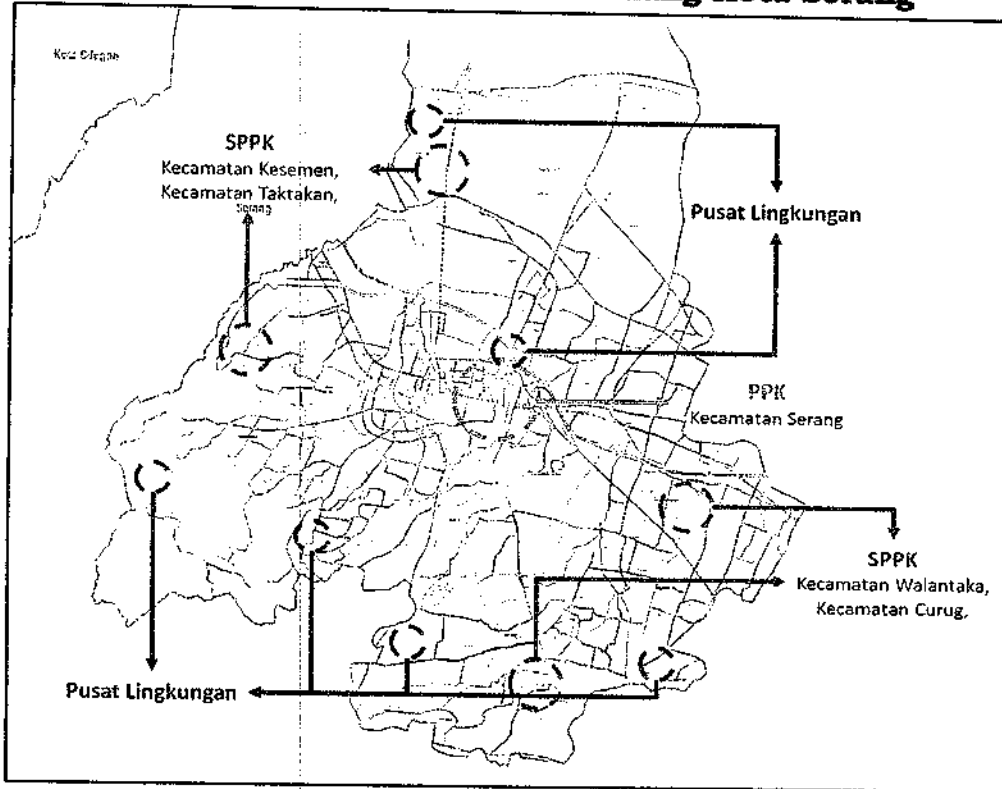
Dalam konteks kebijakan pengembangan wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan wilayah di Kota Serang juga dapat dianalisis berdasarkan hierarki sistem pemukiman yang ada dalam wilayah tersebut. Sesuai dengan norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 - 2040, pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kota Serang meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota yang terletak di Kecamatan Serang dengan fungsi utama yaitu pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai pusat perumahan dan pariwisata.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota yang terletak di:
 - a. Kecamatan Kasemen, dengan fungsi utama sebagai kawasan pariwisata, pertanian berkelanjutan, perdagangan dan jasa, industri serta fungsi sekunder sebagai kawasan perumahan.
 - b. Kecamatan Taktakan, dengan fungsi utama sebagai resapan air dan kawasan agribisnis serta fungsi sekunder sebagai kawasan perumahan, militer, perdagangan dan jasa.
 - c. Kecamatan Walantaka, dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, industri, perdagangan dan jasa
 - d. Kecamatan Curug, dengan fungsi utama sebagai kawasan pemerintahan, pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai kawasan pariwisata buatan.

3. Pusat Lingkungan yang terletak di:

- a. Kelurahan Kasunyatan
- b. Kelurahan Kemanisan
- c. Kelurahan Nyapah
- d. Kelurahan Cilowong
- e. Kelurahan Gelam
- f. Kelurahan Kaligandu

Gambar II.22
Peta Hierarki Struktur Ruang Kota Serang



Sumber: RTRW Kota Serang, diolah 2024

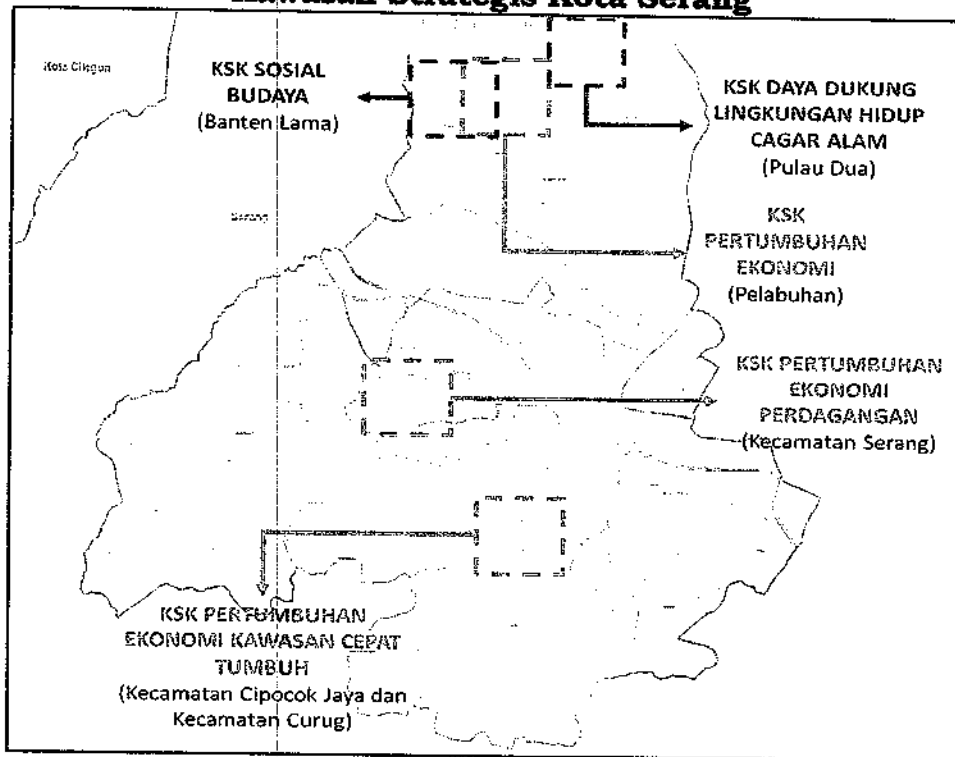
Selain wilayah yang teridentifikasi berdasarkan struktur penataan ruang, perhatian terhadap pusat pertumbuhan juga dapat difokuskan pada kawasan Strategis di Kota Serang. Kawasan Strategis Kota merujuk pada bagian wilayah kota yang mendapat prioritas dalam perencanaan tata ruang karena memiliki dampak yang sangat penting pada berbagai aspek di wilayah kota, seperti ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi, serta/atau lingkungan hidup. Pembatasan kawasan strategis kota diwujudkan dalam bentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis yang berada di Kota Serang terdiri dari:

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang meliputi:
 - a. Kawasan perdagangan pusat kota di Kecamatan Serang
 - b. Kawasan Pelabuhan Karangantu

- c. Kawasan Cepat Tumbuh di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terletak di Kawasan Banten Lama
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terletak di Kawasan Cagar Alam Pulau Dua

Gambar II.23
Kawasan Strategis Kota Serang



Sumber: RTRW Kota Serang, diolah 2024

Selain adanya orientasi pusat pertumbuhan Kota Serang baik sebagai Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi “Kawasan Cepat Tumbuh” di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug, pada KSK Pertumbuhan Ekonomi di atas juga akan didukung oleh rencana pengembangan transportasi darat yang meliputi pengembangan *interchange* jalan tol yang berlokasi di Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya serta pengembangan jaringan jalan kolektor berupa Jalan Lingkar Kota.

Adapun secara detail perencanaan pengembangan jaringan transportasi darat dapat ditinjau pada tabel berikut ini:

Tabel II.57
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat sebagai Penunjang
Pusat Pertumbuhan

Kegiatan	Tempat	Dinas Pengampu
Pengembangan Interchange Jalan Tol	Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang
Jalan Kolektor Sekunder Berupa Jalan Lingkar Kota	Kalodran-Jengkol, Bendung-Mesjid Priyayi, Mesjid Priyayi-Kasemen, Keganteran-Taman, Taman-Umbul Tengah, Umbul Tengah-Soyog, Soyog-Cilowong, Cilowong-Sayar, Sayar-Pabuaran, Palima-Andemoui-Curug, Curug-Cisangku, Ciwiru-Lipatik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang

Sumber: RTRW Kota Serang, diolah 2024

Dapat disimpulkan bahwa dari sisi potensi pusat pertumbuhan di Kota Serang ditekankan pada aspek pertumbuhan wilayah untuk menstimulus simpul pusat pertumbuhan ekonomi. Intervensi secara perencanaan spasial diidentifikasi pada penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK). oleh karenanya orientasi pengembangan Kota Serang dari aspek penataan ruang termasuk dalam hal ini struktur ruang dan kawasan strategis, secara umum bertumpu pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta penguatan peran pada sektor pemerintahan sebagai bagian dari peran Kota Serang sebagai PKN. Dari segi geografis, pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat kegiatan wilayah yang berlokasi di Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya serta Kecamatan Curug.

Berdasarkan analisa terhadap pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, perencanaan pembangunan diatas, maka sinkronisasi antara RPJPD dan Perencanaan Spasial, daerah harus memperhitungkan potensi pusat pengembangan wilayah tersebut. Dari segi geografi-ekonomi, pengaturan spasial-aspasial di Kota Serang perlu didasarkan atas potensi eksisting wilayah yang ada, terutama di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Integrasi diperlukan sampai pada tahun 2045 mendatang dengan mempertimbangkan aktualitas pemanfaatan ruang dan wilayah.

Berdasarkan Hasil Penelitian berupa *Policy Brief* Arah Kebijakan Tata Ruang di Kota Serang, nilai perwujudan struktur ruang baru mencapai perwujudan struktur ruang sebesar 12,8% (Nurfindarti,et.al, 2024), sebagai berikut:

Tabel II.58
Capaian Target Komponen, Sub Komponen, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikasi Program RTRW

Komponen Perwujudan Struktur Ruang	Jumlah Sub Komponen	Arahan Pembiayaan
Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan	6 Sub Komponen	APBD Kota, 5 terlaksana, 1 belum terlaksana
	7 Sub Komponen	
Transportasi	Pengembangan jalan nasional/arteri primer	APBN
	Pengembangan jalan kolektor primer	APBD Provinsi
	Pengembangan jalan kolektor sekunder	APBD Kota
		15 sub kegiatan pembangunan jalan kolektor sekunder telah terlaksana, dari 23 rencana
		32 sub kegiatan pembangunan jalan lokal sekunder telah terlaksana dari 57 rencana
		148303 m2 jalan lingkungan perumahan telah terbangun
	Pengembangan jaringan sungai, danau penyeberangan	APBN
	Pengembangan jaringan transportasi darat kota	5 APBN, 9 APBD Provinsi, 3 APBD Kota
	Pengembangan jaringan transportasi laut	1 APBN, 1 APBD Provinsi, 1 APBD Kota (belum)
	Arahan pengembangan jaringan transportasi kota	3 APBN, 4 APBD Provinsi, 4 APBD Kota (1 tahap rencana, 3 belum)
Perwujudan Sistem Jaringan Energi Telekomunikasi	3 sub komponen	APBN dan APBD Provinsi
	6 sub komponen	1 APBN, 2 APBD Provinsi, 5 APBD Kota (2 terlaksana, 3 belum)
	2 sub komponen	3 APBN, 3 APBD Provinsi, 2 APBD Kota(1 terlaksana (FS)
	7 sub komponen	

Komponen Perwujudan Struktur Ruang	Jumlah Sub Komponen	Arahan Pembiayaan
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Penyediaan Air Minum	9 APBD Kota (1 terlaksana), 1 APBD provinsi, 1 APBN
	Sistem Pengelolaan Air Limbah	6 APBD Kota (1 terlaksana)
	Sistem Pengelolaan Limbah B3	4 APBD Kota
	Sistem Pengelolaan Persampahan	9 APBD Kota (3 terlaksana)
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	3 APBD Kota
	Sistem Drainase	3 APBD Kota (2 terlaksana), 1 APBD Provinsi, 2 APBN
	Sistem Jaringan Pejalan Kaki	8 APBD Kota

Sumber : (Nurfindarti,et.al, 2024)

Tingkat perwujudan struktur ruang di atas masih sangat rendah yaitu kurang dari 85%. Namun demikian, pada prinsipnya, apabila ditinjau dari aspek Pusat Pertumbuhan wilayah di Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa dari sisi potensi pusat pertumbuhan di Kota Serang ditekankan pada aspek pertumbuhan wilayah yang menstimulus simpul pusat pertumbuhan ekonomi.

Intervensi secara perencanaan spasial diidentifikasi pada penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK). Orientasi pengembangan Kota Serang dari aspek penataan ruang termasuk dalam hal ini struktur ruang dan kawasan strategis, secara umum bertumpu pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta penguatan peran pada sektor pemerintahan sebagai bagian dari peran Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi geografis, pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat kegiatan wilayah yang berlokasi di Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya serta Kecamatan Curug.

Berdasarkan analisa terhadap pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, perencanaan pembangunan diatas, maka sinkronisasi antara RPJPD dan Perencanaan Spasial, daerah harus memperhitungkan potensi pusat pengembangan wilayah tersebut. Dari segi geografi-ekonomi, pengaturan spasial-aspasial di Kota Serang perlu didasarkan atas potensi eksisting wilayah yang ada, terutama di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Integrasi diperlukan sampai pada tahun 2045 mendatang dengan mempertimbangkan aktualitas pemanfaatan ruang dan wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan pembangunan daerah selalu diarahkan untuk bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga dalam perjalanannya muncul beragam permasalahan, isu, dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan secara baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat capaian-capaian pembangunan yang belum optimal atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam perencanaan. Berdasarkan kerangka kebutuhan ini, suatu pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk dijadikan sebagai fondasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang efektif.

Dalam konteks pencapaian kinerja yang optimal ini, diperlukan upaya perumusan dan analisis permasalahan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Secara teoritis, Permasalahan pembangunan daerah didasarkan kepada kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan pada saat ini dengan harapan yang ingin dicapai sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perumusan analisis permasalahan merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketidaksesuaian ini dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun RPJPD Kota Serang, proses perumusan masalah dan isu strategis harus menelaah dan mengombinasikan sudut pandang dari seluruh pemangku kebijakan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu isu strategis yang dimunculkan adalah hasil dari pertimbangan kondisi daerah yang berpotensi terdampak oleh dinamika nasional dan global. Melalui skema yang kolaboratif dan holistik ini, arah pembangunan dapat terbentuk secara komprehensif dan antisipatif terhadap perubahan dan juga tantangan di masa yang akan datang.

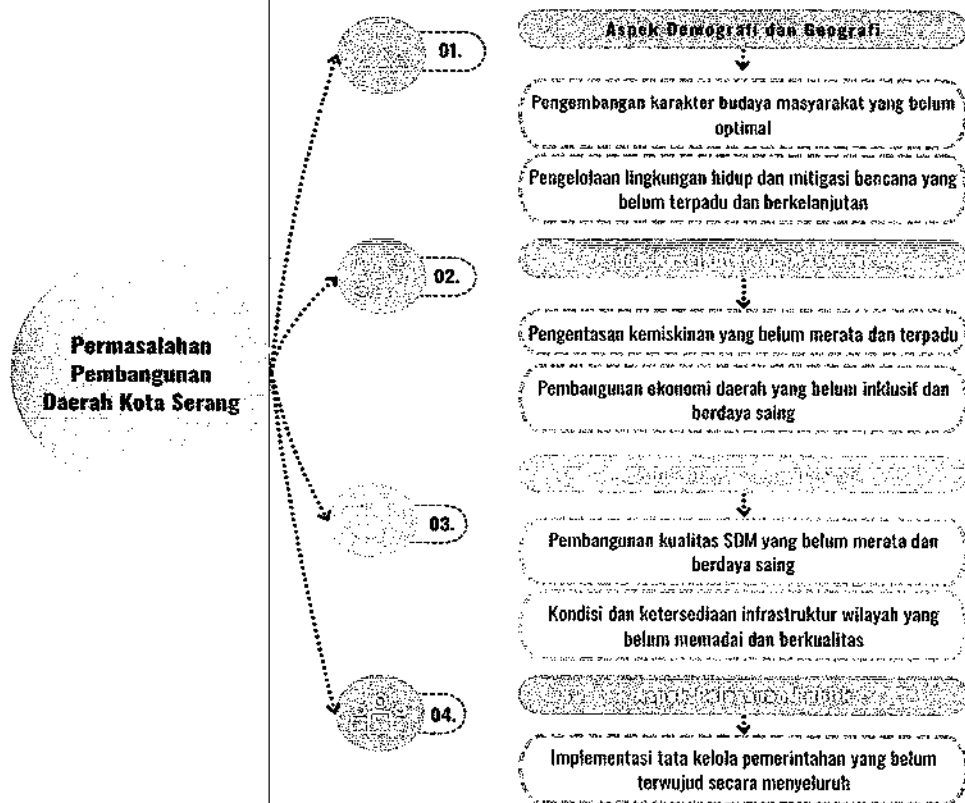
Untuk mewujudkan capaian pembangunan yang ideal, peluang-peluang yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memicu akselerasi dalam mencapai target pembangunan daerah. Begitu pula semua tantangan yang muncul harus dijadikan sebagai sistem peringatan atas potensi hambatan sehingga dapat diantisipasi dengan tepat. Selanjutnya permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Serang yang secara linier akan bermuara pada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Usaha untuk merumuskan permasalahan dalam konteks pembangunan daerah bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami kendala, hambatan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dalam periode sebelumnya. Analisis identifikasi ini terfokus pada evaluasi kemampuan manajerial pemerintahan dalam mengoptimalkan pemberdayaan wewenang yang dimilikinya. Dalam kerangka makro, pengkajian permasalahan pembangunan daerah jangka panjang diimplementasikan melalui pendekatan yang sistematis, dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel kunci yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, sebagaimana terdokumentasi dalam Bab II, akan menjadi landasan untuk menetapkan permasalahan dalam konteks pembangunan daerah. Proses ini melibatkan tinjauan yang cermat terhadap kondisi obyektif daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip analitis dan prediktif, sekaligus mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dari fenomena eksisting serta dampaknya ke masa depan. Pendekatan ini dijalankan secara terstruktur, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan persoalan yang melibatkan seluruh bidang urusan. Kemudian, hasil tersebut dibandingkan dengan kondisi obyektif daerah, yang pada gilirannya menghasilkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kota Serang secara komprehensif. Berikut ini adalah gambar mengenai permasalahan-permasalahan di Kota Serang.

Gambar III.1
Permasalahan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah, 2024

Untuk mendapatkan penjabaran yang lebih komprehensif, berikut ini adalah penjelasan mengenai permasalahan Kota Serang secara lebih rinci.

3.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan aspek Demografi dan Geografi

A. Pengembangan karakter budaya masyarakat yang belum optimal

Karakter budaya di tengah masyarakat berkaitan erat dengan kualitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam konteks kualitas pembangunan daerah, penguatan karakter masyarakat ini akan berkesinambungan dengan potensi-potensi yang akan muncul. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan kondisi yang disebutkan di atas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpotensi memberi dampak pada berbagai aspek pembangunan, seperti meningkatnya kebutuhan akan perumahan, transportasi, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Laju pertumbuhan di Kota Serang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)	
	2023	2024
Kab Pandeglang	1,13	1,10
Kab Lebak	1,22	1,18
Kab Tangerang	1,30	1,25
Kab Serang	1,32	1,28
Kota Tangerang	1,05	0,95
Kota Cilegon	1,29	1,25
Kota Serang	1,64	1,61
Kota Tangerang Selatan	0,99	0,88
Provinsi Banten	1,22	1,16

Sumber: BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel, persentase laju pertumbuhan penduduk di Kota Serang pada tahun 2024 mencapai 1,61 persen, menjadikannya sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Banten. Angka ini lebih besar dari Kota Tangerang Selatan yang hanya mencapai 0,88 persen dan Kota Tangerang dengan 0,95 persen, serta bahkan berada di atas rata-rata Provinsi Banten sebesar 1,16 persen. Dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan daerah lain, Kota Serang akan menghadapi tantangan dalam upaya penyediaan fasilitas publik yang memadai dan berkelanjutan. Begitu pula permasalahan ini akan membutuhkan kebijakan yang tepat pada pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kondisi kependudukan yang dinamis di Kota Serang, beserta potensi permasalahan yang timbul dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, diperkirakan akan mempengaruhi produktivitas dan daya kreatif masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembangunan suatu daerah akan lebih efektif jika dilakukan dalam kondisi ideal yang minim hambatan. Faktor-faktor seperti kemacetan, keterbatasan infrastruktur, serta peningkatan kebutuhan sosial dapat mengurangi daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan tepat untuk mencegah potensi masalah tersebut agar tidak memperlambat kemajuan.

B. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana yang belum terpadu dan berkelanjutan

Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat berimplikasi terhadap lingkungan karena berpotensi mempengaruhi kondisi keberlanjutan. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas danantisipasi degradasi lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan daerah. Lingkungan juga berkaitan erat dengan bencana, karena penyebab bencana adalah manusia yang tidak bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk mendapatkan gambar awal mengenai potensi bencana di Kota Serang, berikut adalah Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2023.

Tabel III.2
Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana
	2023	2023
Kab Pandeglang	0,77	169,21
Kab Lebak	0,63	172,98
Kab Tangerang	0,69	141,43
Kab Serang	0,68	136,82
Kota Tangerang	0,59	104,55
Kota Cilegon	0,56	119,49
Kota Serang	0,58	140,12
Kota Tangerang Selatan	0,58	73,06

Sumber: InaRisk, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa IRB Kota Serang berada di atas angka Kota se-Provinsi Banten. Dengan angka sebesar 140,12 menandakan bahwa upaya penanganan dan mitigasi bencana di Kota Serang belum optimal. Perlu kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis Kota Serang dalam menangani kebencanaan. Sedangkan IKD Kota Serang berada di bawah rata-rata IKD Provinsi Banten. Dengan angka sebesar 0,58, IKD Kota Serang masih berada di bawah Kabupaten Pandeglang dengan capaian sebesar 0,77, Kabupaten Tangerang sebesar 0,69, Kabupaten Lebak sebesar 0,63, dan Kabupaten Serang sebesar 0,68. Dengan kondisi yang seperti ini, bisa dikatakan bahwa peningkatan ketahanan masyarakat di Kota Serang harus segera ditingkatkan meskipun secara keseluruhan angka yang didapatkan masih tergolong sedang.

Selain memantau risiko bencana dan kualitas mitigasinya melalui IRB, kondisi pengelolaan lingkungan hidup juga mesti mendapatkan perhatian agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana. Berikut ini adalah kondisi eksisting Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten/Kota yang ada di sekitar Kota Serang,

Tabel III.3
IKLH Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	2023	
Kab Pandeglang	73,09	
Kab Lebak	73,48	
Kab Tangerang	61,07	
Kab Serang	67,35	
Kota Tangerang	40,76	
Kota Cilegon	66,16	
Kota Serang	64,11	
Kota Tangerang Selatan	47,64	
Provinsi Banten	66,41	

Sumber: Proyeksi IKLH KemenLHK, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mampu menunjukkan kondisi dan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. IKLH Kota Serang terindikasi rendah jika dibandingkan dengan capaian IKLH Provinsi Banten, yaitu hanya berada di angka 64,11 pada tahun 2023. Untuk di level Kota di Provinsi Banten, IKLH Kota Serang di bawah nilai IKLH Kota Cilegon.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat

A. Pengentasan kemiskinan yang belum merata dan terpadu

Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang kompleks yang memerlukan perhatian serius dari setiap pemerintah daerah. Dalam menangani kemiskinan, penting untuk memahami bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga berdampak signifikan kondisi-kondisi sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk merancang kebijakan yang efektif dan inklusif guna mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi terkini persentase penduduk miskin di Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Tabel III.4
Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	9,92	10,72	9,32	9,27
Kab Lebak	9,24	10,29	8,91	8,68
Kab Tangerang	6,23	7,12	6,92	6,93
Kab Serang	4,94	5,49	4,96	4,85
Kota Tangerang	5,22	5,93	5,77	5,89
Kota Cilegon	3,69	4,24	3,64	3,98
Kota Serang	6,06	6,79	5,94	6,20
Kota Tangerang Selatan	2,29	2,57	2,50	2,57
Provinsi Banten	5,92	6,66	6,16	6,17

Sumber: BPS, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki persentase penduduk miskin yang berada di atas sebagian besar Kota di wilayah tersebut pada rentang tahun 2020-2023. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, persentase kemiskinan Kota Serang sebesar 6,20% masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Tangerang (5,89%), Kota Cilegon (3,98%), dan Kota Tangerang Selatan (2,57%). Perbedaan yang mencolok ini menyoroti tantangan yang signifikan yang dihadapi Kota Serang dalam menangani tingkat kemiskinan dan memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti struktur ekonomi lokal, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Diperlukan pendekatan yang holistik dalam perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Serang.

Perbandingan dengan wilayah-wilayah seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang dapat memberikan pandangan berharga untuk merumuskan strategi yang efektif. Menjadi suatu langkah yang penting bagi pemerintah Kota Serang untuk memastikan adanya jaringan keamanan sosial yang kuat, termasuk program bantuan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan. Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memperkuat program-program ini dapat memberikan perlindungan ekonomi kepada mereka yang membutuhkan.

Tabel III.5
Rata-rata Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Rata-rata
	Pertanian	Industri	Jasa	
Kabupaten Pandeglang	1.328.483	1.694.872	1.876.518	1.671.329
Kabupaten Lebak	959.241	2.052.854	1.959.084	1.690.186
Kabupaten Tangerang	2.399.380	2.941.238	2.747.733	2.746.669
Kabupaten Serang	1.588.780	2.193.677	2.596.414	2.268.500
Kota Tangerang	2.724.923	5.319.570	3.838.571	4.039.890
Kota Cilegon	1.439.287	2.161.303	2.305.247	2.199.518
Kota Serang	1.878.860	2.652.076	2.523.484	2.492.711
Kota Tangerang Selatan	1.012.094	2.604.409	3.571.625	3.389.666
Provinsi Banten	1.517.393	2.657.281	2.795.954	2.545.184

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pendapatan pekerja informal di Kota Serang pada tahun 2023 adalah Rp. 2.492.711. Angka ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan pekerja di Kota Tangerang yaitu sebanyak Rp. 4.039.890 dan Kota Tangerang Selatan dengan rata-rata sebanyak Rp. 3.389.666. Begitu pula, rata-rata pendapatan pekerja di Kota Serang juga masih berada di bawah angka rata-rata se-Provinsi Banten yaitu sebanyak Rp. 2.545.184.

B. Pembangunan Ekonomi daerah yang belum inklusif dan berdaya saing

Kemandirian perekonomian di suatu daerah menunjukkan kualitas dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Kondisi ini berkaitan langsung dengan diversifikasi sektor-sektor ekonomi dan bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu keoptimalan pengembangan ekonomi akan berkaitan dengan pengembangan model investasi dan juga pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai laju pertumbuhan, berikut ini adalah data yang menunjukkan kondisi eksisting kemampuan ekonomi di Kota Serang dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar.

Tabel III.6
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	-0,67	3,10	3,42	2,53
Kabupaten Lebak	-0,91	3,18	3,86	2,80
Kabupaten Tangerang	-3,76	4,70	5,47	5,18
Kabupaten Serang	-2,73	3,74	5,04	4,80
Kota Tangerang	-7,36	3,90	5,98	5,57
Kota Cilegon	-1,23	5,24	4,50	4,82
Kota Serang	-1,29	3,88	4,71	4,74
Kota Tangerang Selatan	-1,01	4,81	5,82	5,36
Provinsi Banten	-3,39	4,49	5,03	4,81

Sumber: BPS, 2024

Capaian dalam laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Serang masih berada di bawah beberapa kabupaten dan kota sekitarnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Serang sebesar 4,74%, sementara Kota Tangerang mencapai 5,57%, Kota Tangerang Selatan 5,36%, Kabupaten Tangerang 5,18%, Kota Cilegon 4,82%, dan Kabupaten Serang 4,80%. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi antara Kota Serang dengan beberapa wilayah di sekitarnya.

Persoalan kemiskinan yang cukup tinggi, potensi terjadinya ketimpangan juga menjadi besar. Berikut ini adalah data yang menunjukkan kondisi eksisting dari ketimpangan di Kota Serang dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitar.

Tabel III.7
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten		
	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	0,266	0,302	0,243
Kab Lebak	0,332	0,312	0,271
Kab Tangerang	0,294	0,282	0,286
Kab Serang	0,264	0,284	0,274
Kota Tangerang	0,343	0,383	0,379
Kota Cilegon	0,363	0,318	0,362
Kota Serang	0,340	0,354	0,306
Kota Tangerang Selatan	0,370	0,359	0,359
Provinsi Banten	0,365	0,363	0,368

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gini ratio atau rasio Gini adalah ukuran ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase antara 0 hingga 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata, sementara 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang ekstrem, di mana satu individu atau kelompok memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ketidaksetaraan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilai Gini ratio, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan.

Berdasarkan tabel di atas, Gini Ratio di Kota Serang pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 menjadi 0,306, namun masih berada di atas Kabupaten Pandeglang (0,243), Kabupaten Lebak (0,271), Kabupaten Serang (0,274), dan Kabupaten Tangerang (0,286). Dengan adanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan rasio Gini yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan ekonomi di Kota Serang memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan. Upaya-upaya strategis dibutuhkan untuk dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif, untuk memahami faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan tersebut.

Tabel III.8
Jumlah Tamu Asing dan Domestik Berdasarkan Akomodasi di
Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Tamu Asing dan Domestik pada Usaha Akomodasi (Ribuan Orang)								
	Hotel Bintang			Hotel Non Bintang			Gabungan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	42,96	56,65	58,04	65,03	85,72	54,32	107,98	142,37	112,36
Kab Lebak	-	0,00	0,00	1.62,76	80,75	22,43	162,76	80,75	22,43
Kab Tangerang	3,68	314,38	449,06	0,18	27,83	21,46	3,86	342,21	470,52
Kab Serang	1,64	186,07	238,44	1,91	55,02	36,53	3,54	241,09	274,97
Kota Tangerang	1.268,13	655,19	934,96	2,90	89,31	76,23	1.271,02	744,50	1.011,19
Kota Cilegon	269,36	85,51	132,10	0,85	59,86	87,62	270,21	145,37	219,72
Kota Serang	1,77	144,02	219,86	1,12	29,81	26,69	2,89	173,83	246,55
Kota Tangerang Selatan	79,40	410,52	397,92	49,06	32,51	1,14	128,46	443,03	399,06
Provinsi Banten	1.666,94	1.852,34	2.430,38	283,81	460,81	326,42	1.950,75	2.313,15	2.756,80

Sumber : BPS, Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bulanan (VHT-S)

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kedatangan atau kunjungan wisatawan pada tahun 2022. Sementara itu daerah yang mendapat kunjungan terbanyak adalah Kota Tangerang sebanyak 1.011,19 ribu orang, selanjutnya adalah Kabupaten Tangerang dengan total kunjungan sebanyak

470.52 ribu orang, dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 399,06 ribu orang. Capaian ini adalah perbedaan yang jauh mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Serang pada tahun 2022 hanya sebanyak 246,55 ribu orang.

Kondisi masih tingginya ketimpangan dan juga belum kuatnya daya saing dari sektor ekonomi alternatif seperti pariwisata kemudian memberikan pengaruh kepada naiknya tingkat pengangguran. Kondisi eksisting dari tingkat pengangguran di Kota Serang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2017-2023

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	8,30	8,19	8,67	9,15	7,70	9,24	9,05
Kab. Lebak	8,88	7,57	7,96	9,63	7,86	8,55	7,57
Kab. Tangerang	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88	6,94
Kab. Serang	13,00	12,63	10,58	12,22	10,58	10,61	9,94
Kota Tangerang	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16	6,76
Kota Cilegon	11,88	9,21	9,64	12,69	10,13	8,10	7,25
Kota Serang	8,43	8,10	8,07	9,26	9,41	8,17	7,45
Kota Tangerang Selatan	6,83	4,67	4,78	8,48	8,60	6,59	5,81
Provinsi Banten	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017-2023 di atas, terlihat bahwa Kota Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar Kota di Provinsi Banten. Selisih TPT antara Kota Serang dengan nilai sebesar 7,45% cukup mencolok jika dibandingkan dengan TPT Kota Tangerang Selatan (6,81%), Kota Tangerang (6,76%), dan Kabupaten Tangerang (6,94%). Fenomena ini menunjukkan adanya kondisi yang bervariasi terkait dengan kondisi lapangan pekerjaan dan dukungan perekonomian antar wilayah. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tingkat pengangguran di Kota Serang, serta potensi dampak dari kebijakan pemerintah dan perbedaan struktural ekonomi.

3.1.3. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek daya saing daerah

A. Pembangunan SDM yang belum merata, berkualitas, dan berdaya saing

Kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merata, berkualitas, dan berdaya saing menjadi krusial bagi suatu daerah karena memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. SDM yang merata menciptakan inklusivitas dan mengurangi kesenjangan sosial, sementara kualitas SDM yang tinggi menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Ketika SDM memiliki daya saing, suatu daerah dapat menarik investasi, mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan SDM yang holistik tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang dinamis dan berkelanjutan untuk seluruh komunitas kota.

Belum optimalnya kualitas SDM di Kota Serang menjadi suatu tantangan, terutama dalam menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi ini membuat Kota Serang kurang optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang kuat. Secara mendasar, perbaikan mendalam untuk kualitas pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan adalah suatu keharusan agar dapat menghasilkan SDM yang mampu bersaing secara global dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah cuplikan dari progres capaian IPM Kota Serang.

Tabel III.10
IPM Kota Serang dibandingkan dengan wilayah sekitar
Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	64,91	65,00	65,17	65,84	70,28
Kab Lebak	63,88	63,91	64,03	64,71	67,68
Kab Tangerang	71,93	71,92	72,29	72,97	75,56
Kab Serang	66,38	66,70	66,82	67,75	72,63
Kota Tangerang	78,43	78,25	78,50	78,90	80,98
Kota Cilegon	73,01	73,05	73,35	73,95	78,24
Kota Serang	72,10	72,16	72,44	72,98	76,43
Kota Tangerang Selatan	81,48	81,36	81,60	81,95	83,57
Provinsi Banten	72,44	72,45	72,72	73,32	75,77

Sumber: BPS, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, melalui analisis data yang dapat dilihat dalam tabel,

dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang menunjukkan tren penurunan dan berada pada posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ketiga kota lainnya selama rentang waktu 2019-2023. Pencapaian IPM Kota Serang secara konsisten berada di bawah pencapaian IPM Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Pencapaian IPM Kota Serang pada tahun 2023, mencatatkan nilai sebesar 76,43, sementara Kota Tangerang Selatan berhasil mencapai angka 83,57, Kota Tangerang berada pada angka 75,56, dan Kota Cilegon mencapai 78,24.

Salah satu faktor penentu dari kualitas pembangunan manusia adalah kualitas pendidikan yang dimulai dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang memperlihatkan daya serap masyarakat terhadap pendidikan. APS juga bisa mengindikasikan kualitas masyarakat terkait dengan potensi keahlian yang ada di tengah masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang Angka Partisipasi Sekolah di Kota Serang dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Tabel III.11
Angka Partisipasi Sekolah Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019-2021

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten														
	7-12					13-15					16-18				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	99.47	99.38	99.51	99.85	99.62	94.94	95.47	95.03	97.66	96.15	57.32	56.74	58.36	48.51	50.61
Kab Lebak	98.29	98.21	98.11	99.57	99.43	92.99	93.10	93.07	91.18	91.65	50.02	50.29	51.59	56.79	57.62
Kab Tangerang	99.80	99.70	99.83	98.68	99.39	95.49	94.30	97.90	97.02	97.49	67.50	67.78	67.77	69.95	69.94
Kab Serang	99.30	98.94	99.26	99.99	99.76	95.37	95.08	96.27	96.24	97.08	72.89	74.61	74.22	79.04	79.35
Kota Tangerang	99.71	99.38	99.70	99.45	99.34	98.40	97.91	98.64	98.13	99.45	75.34	73.01	76.57	74.09	74.85
Kota Cilegon	99.79	99.19	99.51	99.72	99.57	98.01	98.22	97.97	97.89	98.49	75.54	73.53	75.19	72.94	73.01
Kota Serang	99.68	99.54	99.64	98.54	98.32	94.14	93.97	94.88	91.16	91.51	62.76	62.50	61.94	63.86	63.45
Kota Tangerang Selatan	99.20	99.30	99.50	99.72	99.63	98.80	98.57	98.27	98.26	98.59	83.33	80.58	82.99	78.74	77.59
Provinsi Banten	99.44	99.28	99.45	99.33	99.43	95.79	95.55	96.77	96.36	96.65	68.72	67.95	68.94	69.22	69.64

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Serang pada kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2023 berada di angka 98,32 persen berada di bawah Kabupaten Lebak (99,43%), Kabupaten Tangerang (99,39%), dan Kota Tangerang (99,34%). Sementara itu, pada kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2023 capaian APS

Kota Serang berada di angka 91,51% di bawah capaian seluruh Kabupaten/Kota se-Banten selain Kabupaten Lebak. Capaian pada kelompok umur ini terpaut cukup jauh dengan beberapa kabupaten/kota lain seperti Kota Tangerang dengan capaian sebesar 99,45%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 98,59%, Kota Cilegon sebesar 98,49%, Kabupaten Lebak 91,65% sebesar 97,90%. Sedangkan pada APS Kota Serang di kelompok umur 16-18 berada di angka 63,45%, berada di bawah kabupaten/kota selain Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Capaian ini sebagaimana pada kelompok umur sebelumnya juga terpaut cukup jauh dari Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 77,59%, Kota Tangerang sebesar 74,85%, dan Kota Cilegon 73,01%, begitu juga dengan Kabupaten/Kota lain di Banten.

Kondisi yang ditunjukkan dari capaian APS sebagaimana yang dijelaskan di atas, menunjukkan adanya penurunan pada kelompok umur yang lebih tinggi dalam pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan di tengah masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor ketersediaan sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penghambat beriringan dengan faktor finansial masyarakat. Perbandingan yang ditunjukkan membutuhkan evaluasi atas strategi bidang pendidikan di Kota Serang. Rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan menengah bersifat kritis karena berkaitan dengan kualitas angkatan kerja yang akan dihasilkan.

B. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang belum memadai dan berkualitas

Perbandingan dengan daerah-daerah yang mencapai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dapat memberikan standar untuk upaya yang harus dilakukan Kota Serang termasuk perumusan kebijakan yang mendukung. Beberapa potensi seperti investasi, kebijakan pembangunan, dan kondisi infrastruktur perlu dievaluasi secara lebih baik. Secara khusus untuk memastikan terjadinya kemandirian perekonomian, Kota Serang perlu melakukan persiapan yang penyesuaian dari level paling bawah yaitu Rumah Tangga. Kesejahteraan masyarakat yang berbanding dengan kemajuan Kota Serang sebagai sebuah Ibu Kota Provinsi Banten dapat ditinjau dari kualitas fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat. Berikut ini adalah kondisi terkini dari fasilitas atau infrastruktur sanitasi yang ada pada Rumah Tangga di Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Tabel III.12
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki
Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Kabupaten/ Kota	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)								
	Sendiri			Bersama			Tidak Ada		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	70,27	71,97	80,20	2,03	3,18	5,12	25,74	22,29	13,20
Kab Lebak	73,49	75,11	78,09	2,77	3,78	3,51	20,88	18,61	16,64
Kab Tangerang	89,63	89,81	93,40	4,11	4,94	2,94	5,44	4,05	2,21
Kab Serang	84,38	84,38	83,38	5,56	1,26	6,49	9,24	11,13	8,98
Kota Tangerang	95,99	94,84	95,30	3,44	4,31	3,88	0,09	0,07	0,07
Kota Cilegon	91,70	89,97	92,21	6,57	7,98	6,71	1,40	1,86	0,73
Kota Serang	91,05	86,61	88,02	2,44	7,83	6,92	5,77	4,71	4,60
Kota Tangerang Selatan	98,02	97,93	97,87	1,90	2,07	2,09	0,09	0,00	0,00
Provinsi Banten	88,04	87,95	90,09	3,49	3,99	3,98	7,52	6,68	6,68

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas sanitasi di Kota Serang masih berada di bawah beberapa daerah lain di Provinsi Banten. Persentase Rumah Tangga yang tidak memiliki dan menggunakan fasilitas Tempat Buang Air Besar pada tahun 2023 di Kota Serang mencapai 4,60%. Kondisi ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan kondisi Kota Tangerang Selatan yang memiliki angka 0,00%, Kota Tangerang sebesar 0,07%, Kota Cilegon sebesar 0,73%, dan Kabupaten Tangerang sebesar 2,21%. Kondisi ini juga ditambah lagi dengan persentase Rumah Tangga di Kota Serang yang masih menggunakan fasilitas sanitasi secara Bersama yaitu di angka 6,92 % di tahun 2023. Sehingga secara keseluruhan, persentase keberadaan sanitasi di Kota Serang pada tahun 2023 dengan angka 88,02% mengalami peningkatan dari tahun 2022 di angka 86,61%.

Kondisi tempat buang air besar yang ditunjukkan di atas menandakan bahwa infrastruktur dasar di Kota Serang masih memerlukan perbaikan. Untuk menambah *insight* berikut adalah kondisi terkini dari persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kota Serang.

Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, tercatat persentase RT yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum sebesar 74,56% yang merupakan kondisi paling bawah jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2021 sebesar

77,92% dan tahun 2022 sebesar 74,81%. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung pembangunan di Kota Serang masih memerlukan upaya-upaya yang strategis untuk dilakukan.

Selain fasilitas dan infrastruktur dasar bagi Rumah Tangga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penelidikan untuk infrastruktur fisik yang bersifat umum juga perlu dilakukan. Amanat regulasi yang mengatur penyelenggaraan jalan publik mengindikasikan *maintenance* yang bersifat segera dan menyeluruh jika terkait kerusakan jalan. Berikut ini adalah kondisi eksisting dari jalan berdasarkan kondisinya di Kota Serang pada tahun 2019-2023.

Tabel III.13
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Serang tahun 2019-2023

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Serang (kilometer)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	136.49	138,62	149.530	146.94	203.059
Sedang	63.19	63,19	41.050	43.20	159.150
Rusak	6.35	6,35	17.640	18.02	41.450
Rusak Berat	-	-	0	0	10.170
Jumlah	206,03	208,16	208.16	208.16	413.824

Sumber: BPS Kota Serang, 2024

Masih adanya kondisi jalan yang tidak mantap sebanyak 13,06 persen dan kondisi yang mantap mencapai pada angka 86,94 persen. Data yang ditunjukkan ini memperlihatkan bahwa masih ada kebutuhan pengerjaan jalan yang baik untuk kemudian dapat menghadirkan infrastruktur dasar kepada publik. Hal ini juga berguna untuk memberikan akses yang lebih dalam pengembangan ekonomi wilayah dan juga pariwisata.

Analisis yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup krusial menghambat pembangunan kemandirian ekonomi dan transformasi pembangunan di Kota Serang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten, menandakan adanya kesenjangan dalam kontribusi ekonomi. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan dan capaian pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, termasuk investasi, kebijakan pembangunan, dan kondisi infrastruktur. Rancangan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk mempromosikan diversifikasi ekonomi, meningkatkan sektor industri lokal, dan memperkuat infrastruktur ekonomi. Dengan pendekatan yang

holistik, Kota Serang dapat mengatasi permasalahan krusial ini, mencapai kemandirian ekonomi, dan mewujudkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.4. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek pelayanan publik

A. Implementasi tata kelola pemerintahan yang belum terwujud secara menyeluruh

Tata Kelola dan birokrasi yang profesional merujuk pada suatu sistem administrasi publik yang beroperasi dengan standar tinggi, menjunjung integritas, kredibilitas, dan efisiensi. Profesionalisme birokrasi mencakup kualifikasi, kompetensi, serta etika dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Dalam analisis kebijakan publik, birokrasi yang profesional diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam perumusan dan implementasi kebijakan, menjalankan fungsi pelayanan publik dengan efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan suatu paradigma dalam manajemen publik yang menekankan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Dalam konteks kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengukuran efektivitas tata kelola pemerintahan sering kali mencakup indikator-indikator seperti tingkat korupsi, tingkat partisipasi masyarakat, dan kejelasan proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kualitas birokrasi di Kota Serang, suatu tindakan asesmen perlu dilakukan untuk dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan birokrasi yang profesional. Upaya ini juga melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan kinerja birokrasi. Berikut ini adalah kondisi terkini dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kota Serang yang disandingkan dengan IRB Provinsi Banten.

Tabel III.14
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang dan Provinsi Banten

Kota/Provinsi	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kota Serang	58,30	57,69	60,91	70,97
Provinsi Banten	61,12	63,11	66,11	78,17

Sumber: Roadmap reformasi Birokrasi dan Analisis Bappeda, 2024

Berdasarkan gambaran dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Serang, dibandingkan dengan Provinsi Banten, menunjukkan tingkat yang masih cukup rendah. Pada tahun 2023, IRB Kota Serang mencapai 70,97, sedangkan IRB Provinsi Banten mencapai 78,17.

Selain itu perlu juga dilihat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kota Serang yang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten lainnya.

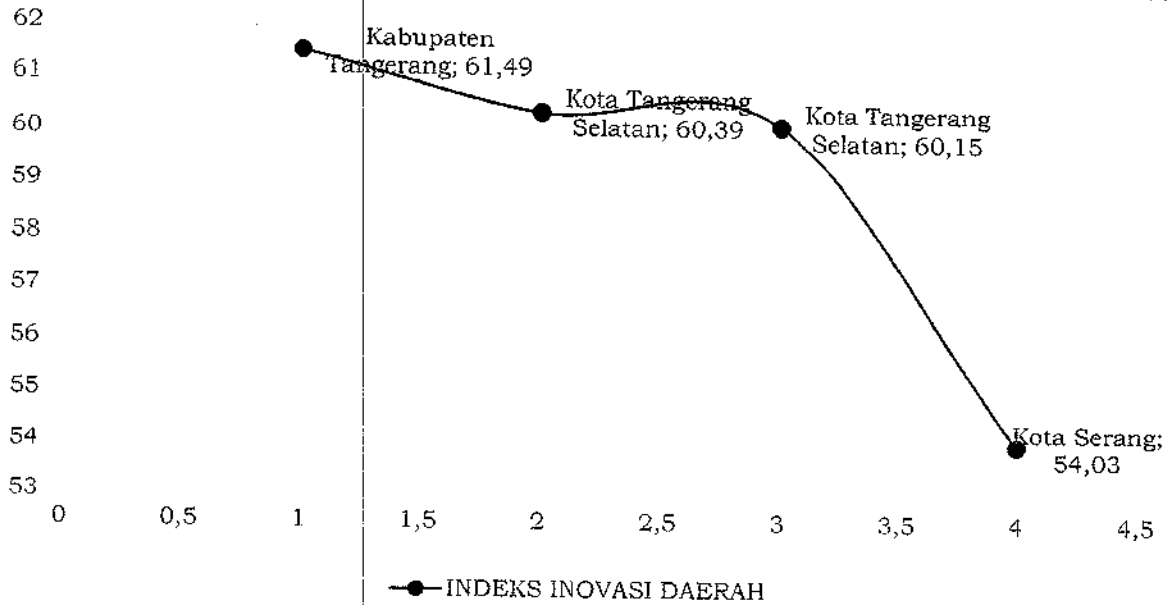
Tabel III.15
Indeks SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	SAKIP Tahun 2023
Kab Pandeglang	BB
Kab Lebak	BB
Kab Tangerang	BB
Kab Serang	BB
Kota Tangerang	B
Kota Cilegon	B
Kota Serang	B
Kota Tangerang Selatan	B

Sumber: Roadmap reformasi Birokrasi dan Analisis Bappeda, 2024

Berdasarkan data yang ditunjukkan, capaian indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Serang masih berada di bawah seluruh kabupaten di Provinsi Banten yaitu pada Tahun 2023 sebesar 60,02. Hal ini menandakan bahwa tingkat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintah belum mencapai tingkat yang optimal. Kondisi ini memunculkan tantangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, koordinasi antar organisasi perangkat daerah, *monitoring* dan akuntabilitas pada program pembangunan.

Gambar III.2
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar di atas, capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Serang berada pada angka 54,03 dengan predikat Inovatif, akan tetap masih cukup rendah jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Tangerang sebesar 61,49, Kota Tangerang Selatan sebesar 60,39, dan Kota Tangerang sebesar 60,15 yang semuanya mendapat predikat Sangat Inovatif.

Capaian IRB, IID, dan rata-rata pendapatan di Kota Serang yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan beberapa daerah sekitarnya di Provinsi Banten menunjukkan kondisi yang masih harus ditingkatkan dan merupakan indikasi adanya potensi permasalahan dalam tata kelola, regulasi terkait manajemen sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan efektivitas kebijakan ekonomi dan administratif yang pro masyarakat di Kota Serang. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pelayanan publik dan peningkatan integritas aparatur pemerintahan perlu dilakukan.

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

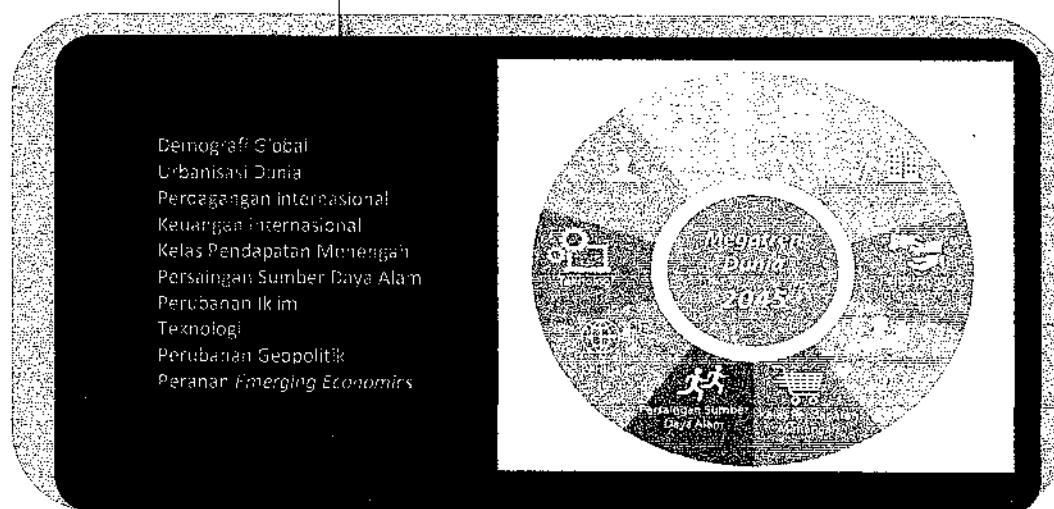
Isu strategis merujuk pada persoalan-persoalan krusial yang menjadi fokus pembicaraan di tingkat internasional, nasional, atau regional, karena dampak signifikannya terhadap pembangunan daerah pada masa kini dan masa depan. Identifikasi isu-isu strategis melibatkan pengenalan permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh strategis dari berbagai sektor, serta perumusan solusi untuk menangani dan mengantisipasi dampaknya terhadap rencana pembangunan jangka panjang. Pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini memungkinkan penyusunan program kegiatan yang terstruktur, tepat, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Penanganan terhadap isu strategis akan membuka peluang dan menghilangkan hambatan. Dengan demikian potensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan menjadi lebih besar jika pemahaman terhadap isu strategis didapatkan. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai isu strategis akan membawa efektivitas langkah perencanaan dan kemudahan dalam melakukan evaluasi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang tidak dikenali dan dilakukan antisipasi dengan baik akan membuka peluang munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Oleh karena itu, perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah harus didasarkan kepada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dari seluruh bidang yang berpengaruh pada agenda pembangunan daerah. Secara umum, perumusan isu strategis akan ditelaah dari isu internasional, isu nasional, dan isu-isu daerah atau regional.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Perkembangan dan perubahan yang terjadi secara global merupakan sebuah tantangan yang harus disikapi dengan bijak dari perspektif Pembangunan daerah. Berdasarkan struktur logis penyusunan rencana jangka panjang nasional, dalam RPJPN Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa terdapat isu dan tantangan global yang tertuang dalam istilah “Megatren” yang merupakan proyeksi perubahan dari sisi demografi, perdagangan, keuangan, pelaku usaha, sumber daya, perubahan iklim, teknologi dan geopolitik. Secara umum isu strategis global ini dapat dirangkum ke dalam gambar berikut ini.

Gambar III.3
Megatren Dunia 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Berdasarkan arahan ini, tantangan megatren akan dijadikan sebagai dasar perumusan isu strategis internasional terhadap pembangunan Kota Serang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut ini adalah penjelasan

mengenai isu strategis internasional berdasarkan Megatren yang berkaitan langsung dengan Kota Serang.

A. Perubahan demografi global

Perubahan demografi global, yang mengindikasikan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dunia hingga mencapai 9,45 miliar jiwa pada tahun 2045, menandai pertambahan sebesar 2,1 miliar jiwa dibandingkan dengan tahun 2015. Fenomena ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan pada pola migrasi dan struktur usia populasi. Dengan 55% dari total penduduk dunia berlokasi di Asia, ini mencerminkan dominasi demografi yang akan terjadi di wilayah Asia.

Dalam konteks Kota Serang, perubahan demografi global memiliki potensi untuk memengaruhi kondisi dan kebutuhan di tingkat lokal. Pertumbuhan jumlah penduduk global yang signifikan dapat memicu peningkatan aktivitas migrasi, baik masuk maupun keluar Kota Serang. Terlebih lagi, proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang juga signifikan di Kota Serang pada tahun 2045 akan menciptakan tantangan baru dalam aspek infrastruktur, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

Proyeksi peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di seluruh dunia menciptakan tuntutan tambahan terhadap layanan kesehatan dan fasilitas pendukung lansia di Kota Serang. Hal ini menuntut perencanaan yang matang dalam menyediakan fasilitas kesehatan, transportasi, dan rekreasi yang dapat memenuhi kebutuhan populasi usia lanjut.

Dengan demikian, pemangku kepentingan di Kota Serang perlu mempertimbangkan dampak perubahan demografi global dalam merencanakan dan mengembangkan kota. Ini termasuk kesiapan dalam menyediakan infrastruktur yang mampu menanggapi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan khusus kelompok usia tertentu. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat di tengah dinamika perubahan demografi global.

B. Perdagangan internasional

Perubahan konstelasi perdagangan global menandai dinamika perdagangan antarnegara yang melibatkan pertukaran barang dan jasa di tingkat global. Pada tahun 2045, proyeksi menunjukkan bahwa negara berkembang akan menjadi poros ekonomi dengan pertumbuhan sekitar 6 persen per tahun, mengakibatkan perubahan struktural dalam perekonomian global. Khususnya di kawasan Asia, perubahan ini akan menciptakan peningkatan perdagangan intra-Asia.

Dalam konteks Kota Serang yang menjadi bagian dari Indonesia negara berkembang di Asia, pertumbuhan volume perdagangan dan investasi dapat memberikan dampak positif. Peningkatan ini memiliki potensi untuk merangsang investasi domestik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan sektor industri, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, ketergantungan Kota Serang pada sektor industri pengolahan mengharuskannya untuk beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk dalam hal regulasi perdagangan, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil.

Transformasi perdagangan global juga memiliki potensi dampak pada pertumbuhan usaha mikro di Kota Serang, terutama terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Perubahan ini mengharuskan penyesuaian pada model pengelolaan pasar tradisional, terutama dalam hal infrastruktur dan strategi promosi yang dapat diadopsi agar dapat terlibat dalam perdagangan global. Seiring dengan dinamika perdagangan global, usaha mikro di Kota Serang perlu mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memperbarui strategi bisnis mereka agar tetap relevan dan berdaya saing. Adaptasi terhadap perubahan ini dapat membuka pintu bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi lokal, sambil memastikan bahwa usaha mikro dapat tetap berperan aktif dalam dinamika perdagangan yang berkembang.

C. Pertumbuhan masyarakat pendapatan kelas menengah dan potensi *emerging economic*

Pada tahun 2045, proyeksi pertumbuhan kelas menengah mencapai angka total sekitar 8,1 miliar orang, setara dengan 84 persen dari populasi global. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi secara global, khususnya diperkuat oleh peningkatan jumlah penduduk di Asia dan Amerika Latin. Perubahan ini menandai pergeseran pusat pertumbuhan baik dalam aspek strata ekonomi maupun geografis.

Pertumbuhan masyarakat yang memiliki pendapatan kelas menengah Kota Serang, yang menjadi bagian dari perubahan demografi global, terdapat tantangan yang perlu direspons dan diadaptasi dengan cermat. Pertumbuhan kelas menengah diharapkan memicu peningkatan kebutuhan konsumen dan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Oleh karena itu, Kota Serang perlu memastikan bahwa infrastruktur dan layanan publik dapat merespons perubahan ini dengan efektif, sehingga mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam konteks lingkungan, konsumsi yang besar dari masyarakat kelas menengah di Kota Serang akan memberikan dampak signifikan pada kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan manajemen yang bijak untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Seiring dengan dinamika tersebut, penting untuk mempertimbangkan pula tren ekonomi yang baru atau transformasi ekonomi global dalam hal kelas pendapatan.

Dalam beberapa kajian kondisi ini juga dikenal dengan istilah *Emerging Market Economy* (EME). Perkembangan ini dapat dimaknai dengan kondisi di mana negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang berada dalam rentang dari rendah mengalami transformasi menuju ke level menengah. Negara-negara yang termasuk dalam kategori EME mencakup 80% dari populasi dunia dan akan memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap perekonomian global. Perubahan ini mencerminkan dinamika yang signifikan dalam struktur ekonomi global, di mana negara-negara tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru dan memiliki dampak yang substansial dalam aktivitas ekonomi dunia.

D. Persaingan sumber daya alam

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dan Afrika, mencapai puncaknya pada tahun 2045, berpotensi memicu intensifikasi persaingan terkait sumber daya alam. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan sumber daya alam seperti energi, air, dan mineral juga akan meningkat. Hal ini menimbulkan tantangan serius terkait pengelolaan dan akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas secara global. Dampak yang mungkin timbul adalah persaingan yang lebih ketat antara negara dan perusahaan untuk mengamankan sumber daya alam kritis. Negara-negara di Asia dan Afrika, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, mungkin bersaing untuk mengakses sumber daya alam yang terbatas di wilayah mereka sendiri atau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain yang kaya akan sumber daya.

Keterbatasan jumlah sumber daya alam pada tahun 2045 juga dapat menciptakan tekanan lebih lanjut terhadap lingkungan. Eksploitasi berlebihan dan persaingan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan risiko konflik antara negara terkait kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi potensial ini tentu saja akan dirasakan oleh negara-negara yang memiliki variasi sumber daya alam yang beragam.

Kota Serang, dengan sektor unggulan yang cukup bervariasi, berpotensi untuk menghadapi dampak langsung dari persaingan sumber daya alam ini. Kebutuhan yang meningkat dapat menyulitkan akses terhadap sumber daya

alam, sehingga memunculkan peningkatan biaya produksi yang dapat mempengaruhi daya saing industri lokal. Oleh karena itu, Kota Serang berpotensi menghadapi tantangan dalam strategi pembangunan berkelanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, diversifikasi ekonomi, dan kerja sama regional dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk memitigasi dampak negatif persaingan sumber daya alam di tingkat global pada tahun 2045.

E. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca merupakan ancaman serius dengan konsekuensi global yang tidak dapat diabaikan. Dengan proyeksi suhu dunia naik sekitar 3 hingga 3,5 derajat Celsius pada akhir abad ini, tantangan yang dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Kota Serang, menjadi semakin kompleks. Salah satu dampak yang dapat nyata dan signifikan bagi Kota Serang adalah kenaikan permukaan laut. Sebagai kota pesisir, Kota Serang rentan terhadap ancaman kenaikan air laut yang dapat merusak infrastruktur dan pemukiman penduduk sepanjang garis pantai. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan badai, yang dapat memberikan tekanan ekstra pada kemampuan kota dalam mengatasi dampak tersebut.

Ketergantungan Kota Serang pada sektor ekonomi terkait sumber daya alam, seperti pertanian dan perikanan, membuatnya rentan terhadap gangguan terhadap ekosistem lokal. Perubahan iklim dapat memengaruhi produktivitas sektor ini, menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber daya alam. Selain itu, ketidakpastian dalam siklus air akibat perubahan iklim dapat mengancam ketersediaan air di Kota Serang, berpotensi berdampak pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan kegiatan industri, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keberlanjutan kota.

Risiko kesehatan juga dapat meningkat, karena perubahan suhu dan pola hujan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Hal ini menuntut strategi penguatan sistem kesehatan dan upaya pencegahan yang lebih proaktif. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, Kota Serang harus mengambil tindakan serius dalam mengimplementasikan kebijakan dan proyek-proyek yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, infrastruktur, dan sumber daya alam serta memastikan keberlanjutan Kota Serang di tengah perubahan iklim global yang tidak terhindarkan. Begitu pula dalam mengatasi persoalan terkait manajemen pengolahan limbah dan sampah.

F. Teknologi informasi

Pada tahun 2045, perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan dampaknya meresapi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Fenomena ini mencakup evolusi yang signifikan dalam berbagai bidang, membentuk suatu era di mana teknologi menjadi pilar utama yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi tidak hanya terbatas pada perangkat dan aplikasi digital, melainkan juga meluas ke ranah bioteknologi, rekayasa genetika, kesehatan, dan pengobatan. Progres di bidang ini membuka pintu bagi inovasi medis yang luar biasa, termasuk pengembangan terapi genetik untuk penyembuhan penyakit genetik dan perubahan paradigma pengobatan.

Energi terbarukan menjadi fokus utama dalam perubahan pola konsumsi energi pada tahun 2045. Teknologi canggih memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di samping itu, perangkat yang dapat dipakai (*wearable devices*) menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Robotika dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pada tahun 2045.

Sebagai kota yang erat kaitannya dengan sektor perindustrian, kondisi global ini akan sangat memengaruhi Kota Serang. Terlebih lagi mengingat bahwa pembangunan *smart city* masih belum bisa diwujudkan hingga tahun 2024 di Kota Serang. Memperhatikan hal ini, diperlukan beberapa penyesuaian seperti peningkatan ketersediaan lapangan usaha yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan penyesuaian kompetensi para tenaga kerja akan menjadi suatu kebutuhan yang krusial dan memerlukan perencanaan yang seksama. Kota Serang juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan daya saing yang berbasis pada pengembangan teknologi informasi yang bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, strategi adaptasi yang cerdas dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing Kota Serang di era teknologi informasi yang terus berkembang.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih

keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional yang dijabarkan sebagai berikut.

Isu-isu strategis nasional merupakan permasalahan yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan nasional yang memerlukan langkah-langkah antisipatif yang khusus untuk mengatasi dampaknya. Adanya isu-isu strategis nasional yang masih belum terselesaikan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dengan upaya yang lebih intensif. Kendati demikian, kompleksitas muncul ketika isu-isu strategis nasional yang belum teratasi menghadapi kemunculan isu strategis baru, yang tentunya membutuhkan perlakuan khusus dalam proses antisipasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan formulasi isu-isu strategis daerah diperlukan juga untuk mempertimbangkan isu-isu strategis nasional sebagaimana yang terangkum dalam kilasan narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berikut ini.

Secara esensial, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan inisiatif untuk mengimplementasikan visi dan misi pembangunan jangka panjang negara. Dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai komitmen yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta didasarkan pada evaluasi dan analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas, termasuk dalam konteks penyesuaian dengan target-target utama pembangunan jangka panjang dalam RPJPN, adalah bertujuan untuk memajukan negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan di atas dan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

Gambar III.4
Visi Indonesia Emas 2045



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Visi yang disampaikan dalam gambar di atas mengindikasikan kebutuhan atas komitmen dan kejelasan terhadap seluruh “goals” dari visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- 1) Pendapatan Per kapita setara negara maju
- 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia international meningkat
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat
- 5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Sementara itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

- 1) **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3) **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan

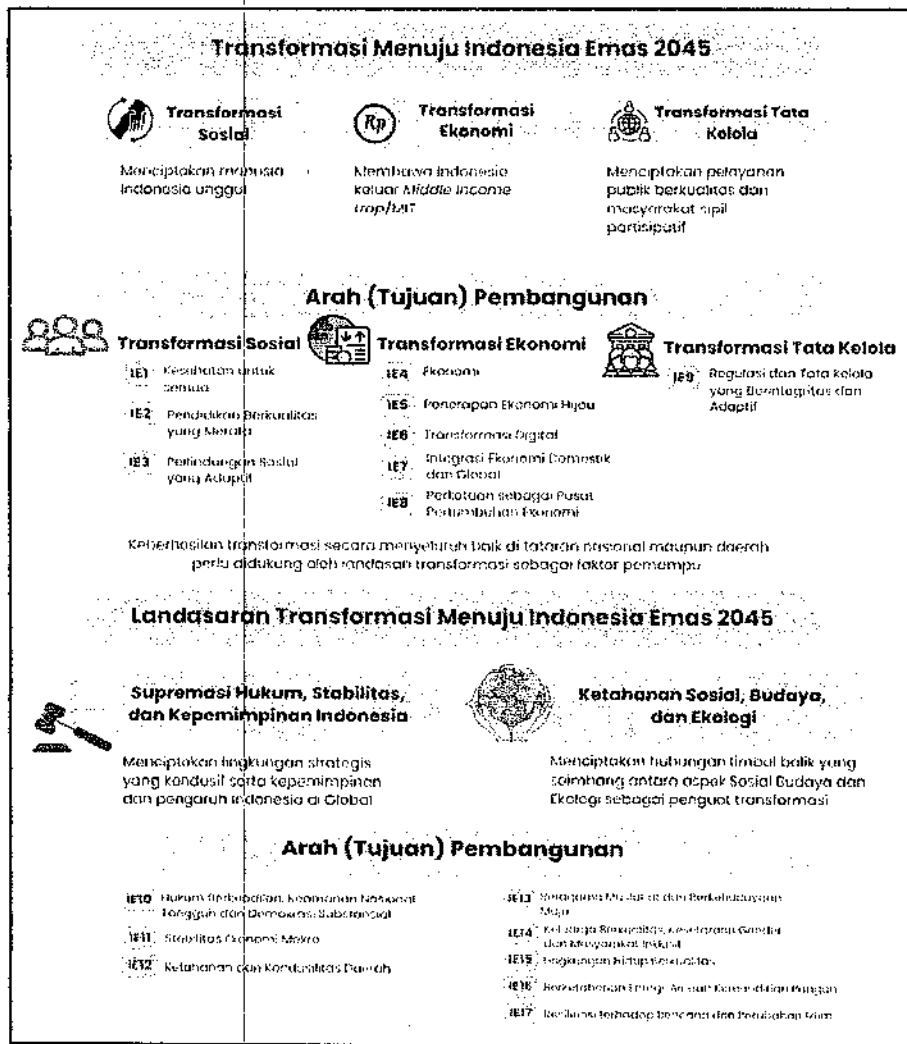
keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

- 5) **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) **Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan** melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
- 7) **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8) **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:

Gambar III.5

Tujuh Belas Arah Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPN, data diolah, 2024

Dalam penyusunan RPJPD Kota Serang harus memedomani dan memperhatikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam RPJPN tahun 2025-2045, melalui penjabaran visi, misi, sasaran utama, dan arah pembangunan RPJPN diatas.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

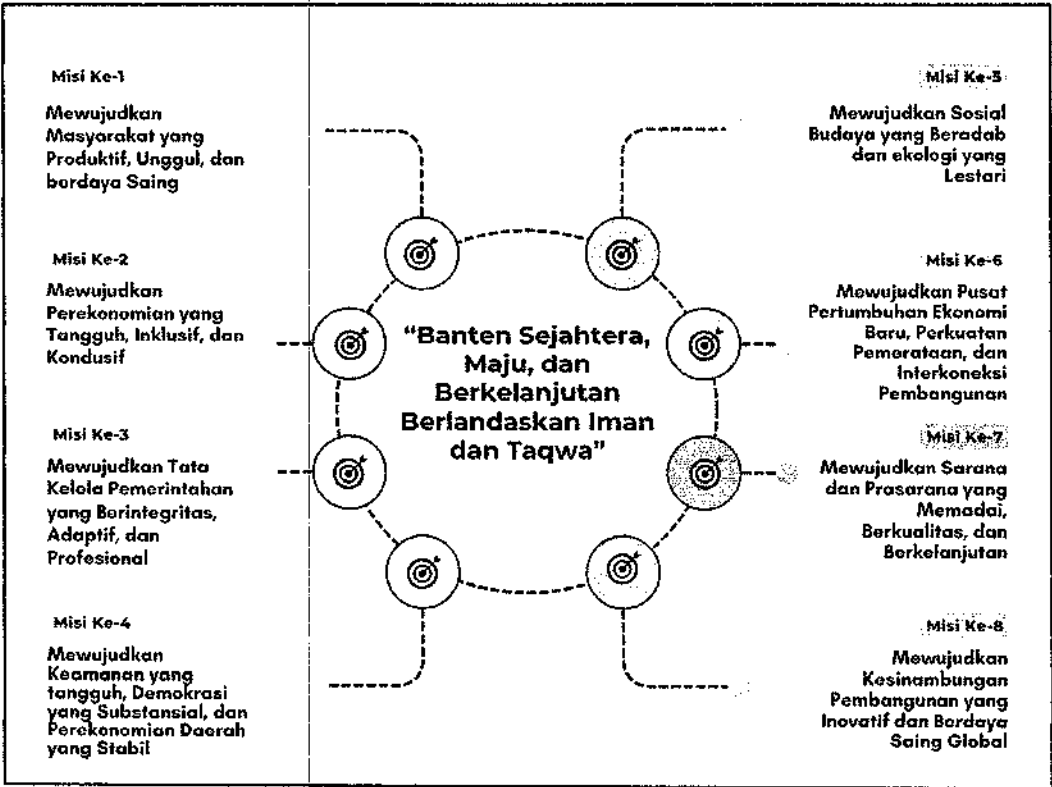
A. Telaah RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Banten

Kualitas capaian pembangunan Provinsi Banten sangat ditentukan oleh kontribusi dari capaian kabupaten/kota dalam lingkup wilayah administratif Banten. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah Kota Serang harus memerhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Banten. Berikut ini adalah hasil telaah terhadap faktor-faktor krusial dalam RPJPD Provinsi Banten tahun 2025-2045.

- 1) Dalam RPJPD Provinsi Banten 2025-2045, Banten memiliki Visi **“Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Visi

ini dijabarkan dalam 8 (Delapan) Misi yaitu yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar III.6
Visi dan Misi RPJPD Provinsi Banten



Sumber: RPJPD Provinsi Banten 2025-2045

- 2) **Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Banten dalam RPJPN Tahun 2025-2045** sebagaimana yang diamanatkan pada wilayah jawa untuk mendukung, **"Megapolis yang Unggul, Inovatif dan Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan"** dengan 5 (lima) aspek utama:
- a) SDM berdaya saing global;
 - b) Kawasan pusat pertumbuhan;
 - c) Pembangunan hijau dan sirkular;
 - d) Multi infrastruktur dan *maritime backbone*;
 - e) Penuntasan RDTR kabupaten/kota.
- 3) **Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045**, sebagaimana berikut:

Tabel III.16
Penyelarasan 17 Arah Pembangunan Nasional dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

No	Transformasi	Arah Pembangunan Nasional	Transformasi	Arah Pembangunan Provinsi
1	Transformasi Sosial (Misi 1)	I.E.1 Kesehatan untuk Semua; I.E.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	I.E.1 Kesehatan untuk Semua; I.E.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;

No	Transformasi	Arah Pembangunan Nasional	Transformasi	Arah Pembangunan Provinsi
		I.E.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif.		I.E.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif.
2	Transformasi Ekonomi (Misi 2)	I.E.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; I.E.5. Penerapan Ekonomi Hijau; I.E.6. Transformasi Digital; I.E.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; I.E.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	I.E.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; I.E.5. Penerapan Ekonomi Hijau; I.E.6. Transformasi Digital; I.E.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; I.E.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
3	Tata Kelola (Misi 3)	I.E.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	I.E.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia (Misi 4)	I.E.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial; I.E.11. Stabilitas Ekonomi Makro; I.E.12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Daerah yang Berdaya Gantar Kawasan.	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	I.E.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial; I.E.11. Stabilitas Ekonomi Makro; I.E.12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gantar Kawasan.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Misi 5)	I.E.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; I.E.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; I.E.15. Lingkungan Hidup Berkualitas; I.E.16. Berketahanan energi, Air, dan Kemandirian Pangan; I.E.17. Resiliensi terhadap Bencana Alam dan Iklim.	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari	I.E.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; I.E.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; I.E.15. Lingkungan Hidup Berkualitas; I.E.16. Berketahanan energi, Air, dan Kemandirian Pangan; I.E.17. Resiliensi terhadap Bencana Alam dan Iklim.

Sumber: data diolah, 2024

4) Tahap Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

a) Tahap I Pembangunan Provinsi Banten 2025-2029: Penguatan Modal Dasar

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- Pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi;
- Peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan;
- Pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan
- Peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum

b) Tahap II Pembangunan Provinsi Banten 2030-2034: Peningkatan Pembangunan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial;
- Peningkatan investasi dan penanaman modal dan pengoptimalan produktivitas UMKM daerah;
- Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi;
- Pengembangan kerja sama multipihak antar lembaga; dan
- Penguatan fungsi infrastruktur di kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara.

c) Tahap III Pembangunan Provinsi Banten 2035-2039: Pengembangan Kapabilitas

- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah;
- Penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor;
- Pengembangan *agrotechnopark*;
- Pengoptimalan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan
- Pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara, serta pengembangan kawasan perdesaan;

d) Tahap IV Pembangunan Provinsi Banten 2040-2045: **Perwujudan Capaian Pembangunan**

- Pemantapan kondisi lingkungan belajar sebagai pengoptimalan kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah;
- Pemantapan inovasi yang berdaya saing tinggi;
- Pemantapan pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup;
- pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah;
- Pemantapan kualitas desentralisasi fiskal; dan
- Pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah.

5) **Penyelarasan Permasalahan RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang.**

Poin-poin penjabaran di atas memerlukan suatu penyelarasan yang dapat menghubungkan permasalahan antara RPJPD Provinsi Banten dengan RPJPD Kota Serang dari segi keterhubungannya masing-masing. Tujuan dari penyelarasan ini adalah untuk menunjukkan urgensi dan sekaligus perumusan isu strategis RPJPD Kota Serang tahun 2025-2045, yang akan dijabarkan dalam gambar berikut ini.

Gambar III.7
Penyandingan Permasalahan RPJPD Provinsi Banten dan Kota Serang Tahun 2025-2045

Provinsi Banten	Kota Serang
Sumber daya manusia yang belum berkualitas dan berdaya saing	Pembangunan SDM yang belum merata, berkualitas, dan berdaya saing
Perekonomian yang melambat dan belum merata	Pengentasan kemiskinan yang belum merata dan terpadu
	Pembangunan ekonomi daerah yang belum inklusif dan berdaya saing
Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Implementasi tata kelola pemerintahan yang belum terwujud secara menyeluruh
Keamanan wilayah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro yang belum optimal	Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana yang belum terpadu dan berkelanjutan
Inklusivitas kehidupan sosial dan budaya yang belum optimal	Pengembangan karakter budaya masyarakat yang belum optimal
Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang belum berkelanjutan	Kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang belum memadai dan berkualitas

Sumber: data diolah, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa seluruh permasalahan pembangunan jangka panjang Kota Serang memiliki korelasi dan keterhubungan dengan permasalahan atau aspek permasalahan yang

dirumuskan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Dengan adanya korelasi ini, maka isu strategis yang akan dirumuskan selanjutnya diharapkan terbentuk dalam tatanan yang integral dan strategis.

B. Telaahan KLHS RPJPD

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang terdapat tujuan esensial yaitu pengimplementasian isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJPD. Langkah ini didasarkan pada hasil analisis berbagai skenario kondisi lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang sesuai dengan rumusan isu dan permasalahan yang diidentifikasi dalam RPJPD Kota Serang. Untuk memastikan keselarasan antara kerangka kerja Pembangunan Berkelanjutan (PB) dan RPJPD, perlu dilakukan tindak lanjut dengan menyusun matriks penyelarasan kerangka kerja PB dengan RPJPD, yang dapat ditemukan pada Tabel di bawah ini. Upaya ini bertujuan untuk menghadirkan keselarasan yang kuat antara isu-isu pembangunan berkelanjutan dan RPJPD Kota Serang, memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tersebut mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah tabel penyelarasan antara isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dan permasalahan RPJPD Kota Serang.

Tabel III.17

Penyandingan Kerangka Kerja Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB dengan Permasalahan RPJPD Kota Serang

Kerangka Kerja TPB	TPB	Permasalahan RPJPD
Mengurangi angka kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial	Tanpa Kemiskinan	Pembangunan kualitas SDM yang belum merata dan berdaya saing Pengentasan kemiskinan yang belum merata dan terpadu
Meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat miskin		
Mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim yang memperparah kemiskinan		
Mengurangi angka kelaparan dan malnutrisi	Tanpa Kelaparan	
Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani		
Mengurangi kerusakan lahan dan sumber daya alam yang mendukung pertanian		
Meningkatkan Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	Kesehatan dan Kesejahteraan	

Kerangka Kerja TPB	TPB	Permasalahan RPJPD
Meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan	Pendidikan berkualitas	
Mengurangi resiko dan dampak penyakit yang berkaitan dengan lingkungan		
Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi semua		
Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja		
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan pembangunan berkelanjutan	Kesetaraan gender	
Menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan		
Mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi		
Mengakui dan menghormati hak-hak perempuan terkait sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan	Energi Bersih dan Terjangkau	Pembangunan ekonomi daerah yang belum inklusif dan berdaya saing
Menyediakan akses energi yang terjangkau dan aman bagi semua		
Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan		
Mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi	
Meningkatkan lapangan kerja dan kondisi kerja yang layak		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan		
Mengurangi konsumsi dan produksi yang tidak ramah lingkungan	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dan layanan publik		
Meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor industri		
Mengurangi limbah dan konsumsi sumber daya alam	Mengurangi ketimpangan	
Meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas sosial		
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat		
Meningkatkan kerja sama dan solidaritas antara negara-negara berkembang dan maju		

Kerangka Kerja TPB	TPB	Permasalahan RPJPD
Meningkatkan kerja sama dan solidaritas antara berbagai pemangku kepentingan pembangunan	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
Meningkatkan dukungan dan sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan		
Meningkatkan kesadaran dan komitmen global untuk melindungi dan melestarikan lingkungan		
Meningkatkan akses dan kualitas air bersih dan sanitasi bagi semua	Air Bersih dan Sanitasi	Pengembangan karakter budaya masyarakat yang belum optimal
Meningkatkan Kesehatan dan produktivitas masyarakat		
Mengurangi pencemaran dan penggunaan air secara berlebihan		
Meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan perkotaan	Perkotaan dan komunitas berkelanjutan	
Meningkatkan infrastruktur dan layanan perkotaan		
Mengurangi polusi dan dampak lingkungan dari perkembangan perkotaan		
Meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumen yang bertanggungjawab	Konsumsi dan Produksi bertanggungjawab	
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat		
Mengurangi jejak ekologis dan dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi		
Meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Tindakan untuk Iklim	
Meningkatkan peluang dan inovasi dalam ekonomi hijau		
Mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan dari perubahan iklim		
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir	Kehidupan di Bawah Air	
Meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dari sumber daya kelautan		
Mengurangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut		

Kerangka Kerja TPB	TPB	Permasalahan RPJPD
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan	Kehidupan di Darat	
Meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dari sumber daya daratan		
Mengurangi deforestasi dan degradasi ekosistem darat		
Meningkatkan tata Kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	Implementasi tata kelola pemerintahan yang belum terwujud secara menyeluruh
Meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam ekonomi		
Mencegah dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan		

Sumber: data diolah, 2024

C. Telaahan RTRW Kota Serang

1) Tujuan Penataan Ruang Kota Serang

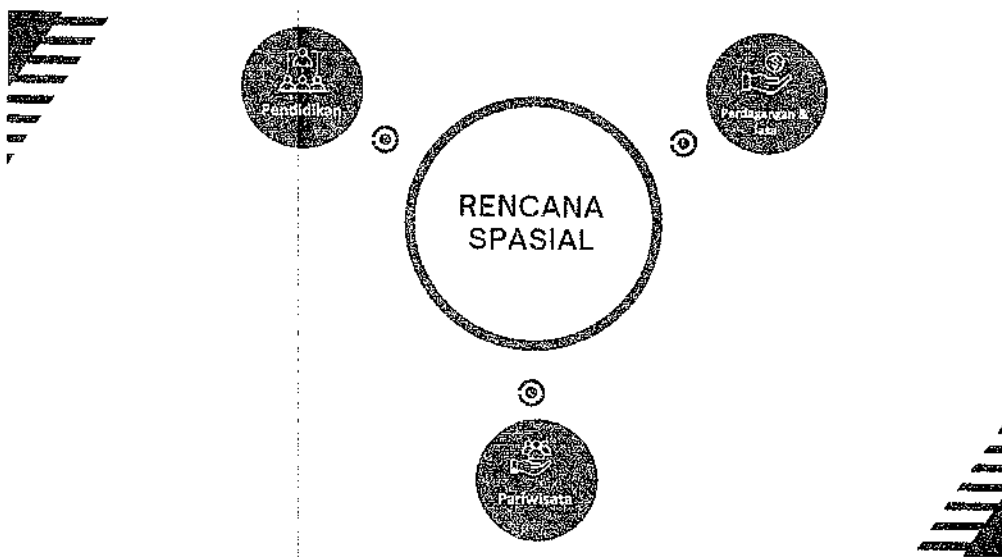
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang untuk periode 2020-2040 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, dua panduan kunci yang diterapkan melibatkan RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah. Ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berikutnya, penilaian terhadap keselarasan dan keterpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam perspektif jangka panjang, yaitu 20 tahun ke depan, dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah. Dalam konteks RTRW Kota Serang, tujuan penataan ruang Kota tersebut dirinci sebagai berikut:

“Mewujudkan daerah sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Serang, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kota Serang menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang diperkuat dengan pengembangan pendidikan. Hal tersebut juga ditunjang oleh peran Kota Serang sebagai PKN dalam urusan pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Gambar III.8
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kota Serang



Sumber: Data diolah, 2024

Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Serang, yang perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kota Serang tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam substansi kebijakan penataan ruang ini, terdapat panduan terkait perkembangan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Kebijakan mengenai Pola Ruang Kota Serang, yang merupakan kerangka kebijakan yang esensial untuk mengkoordinasikan

dokumen rencana pembangunan (RPJPD) Kota Serang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki dengan strategi:
 1. menetapkan pusat pelayanan;
 2. mengembangkan sub pusat pelayanan secara merata;
 3. mengembangkan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah secara proporsional;
 4. menghubungkan antar sub pusat pelayanan dan antara sub pusat pelayanan dengan pusat kota;
 5. mendukung pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan secara berimbang;
 6. mengembangkan sentra budi daya yang mendukung pelayanan skala pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan;
 7. mengembangkan jaringan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan, dan pusat lingkungan;
 8. mendorong pembangunan dan pengembangan pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;
 9. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub wilayah secara merata; dan
 10. mengembangkan sektor potensial untuk mendorong peningkatan investasi dan pendapatan masyarakat.
- b) Penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan dengan strategi:
 1. menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal yang mencakup pusat kegiatan pelayanan sosial, komersial, dan pusat kegiatan wisata;
 2. membagi pusat kegiatan pelayanan menjadi 5 (lima) bagian wilayah;
 3. menempatkan fasilitas sosial dan ekonomi pada pusat kegiatan sesuai dengan jangkauan pelayanan secara merata;
 4. mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat; dan
 5. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah.

- c) Pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dengan strategi:
 - 1. menata permukiman kumuh;
 - 2. mengembangkan perumahan bagi masyarakat kurang mampu;
 - 3. merencanakan infrastruktur permukiman secara terpadu; dan
 - 4. mengembangkan kawasan permukiman yang partisipatif.
- d) Pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dengan strategi:
 - 1. mendukung pembangunan KP3B;
 - 2. merencanakan tata ruang pada kawasan sekitar pusat pemerintahan;
 - 3. mendukung pengembangan jaringan jalan yang menuju KP3B; dan
 - 4. mengantisipasi pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali.
- e) Pengembangan fasilitas pendidikan regional dengan strategi:
 - 1. merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala pelayanannya;
 - 2. mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan perguruan tinggi; dan
 - 3. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas pendidikan regional.
- f) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku dengan strategi:
 - 1. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat pelayanan kota, dengan upaya:
 - mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui regulasi pemerintah daerah, berupa pengembangan jaringan pelayanan angkutan masal dan jaringan lintas angkutan barang serta pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
 - merevitalisasi fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;
 - meningkatkan kapasitas ruas jalan utama; dan

- meningkatkan akses melalui pengembangan jalan-jalan lingkar utara selatan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas.
2. Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya:
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi; dan
 - mengembangkan pelayanan angkutan umum massal.
 3. Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya:
 - meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A, tipe B dan Tipe C; dan
 - membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor.
 4. Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya:
 - menambah sarana penunjang jalan;
 - meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik;
 - mengoptimalkan keberadaan sempadan jalur kereta api; dan
 - membangun jalur khusus sepeda pada ruas jalur jalan utama dan kawasan pusat perdagangan.
 5. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan dengan upaya:
 - mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan ke seluruh wilayah perkotaan;
 - membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik;
 - mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan;
 - mengembangkan sumber daya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan; dan

- menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.
6. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya:
- mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan pemukiman;
 - menempatkan *hotspot* yang diarahkan pada ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran; dan
 - menetapkan pemanfaatan menara bersama dalam penyediaan antenna telekomunikasi.
7. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya:
- memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
 - meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian;
 - memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air; dan
 - mengoptimalkan keberadaan sempadan bangunan air.
8. Mengembangkan sistem penyediaan air minum, dengan upaya:
- mengembangkan sistem jaringan air bersih yang siap minum; dan
 - melindungi sumber mata air dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air tanah secara terbatas.
9. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:
- mengolah limbah domestik dengan *onsite system* diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematuan dan melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu di Kecamatan Kasemen; dan
 - mengolah limbah industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
10. Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya:
- memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;
 - menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*; dan
 - meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada melalui peningkatan peran masyarakat.

11. Mengembangkan sistem drainase, dengan upaya:
 - menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air;
 - memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase; dan
 - membuat sodetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi.
- g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata dengan strategi:
 1. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 2. mengembangkan potensi-potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. mendukung pengembangan sarana pendidikan tinggi; dan
 4. mengembangkan potensi pariwisata.
- h) Pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional dengan strategi:
 1. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan regional dan nasional;
 2. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan dan kawasan peruntukan industri di Wilayah Kabupaten Serang;
 3. mengoptimalkan fungsi kawasan budi daya pada pusat Kota; dan
 4. mendukung pengembangan kawasan sistem terpadu Provinsi Banten.
- i) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi:
 1. menyusun rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan;
 2. menyusun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada wilayah bagian selatan dan utara.
- j) Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi dengan strategi:
 1. menjaga kelestarian cagar alam Pulau Dua;
 2. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 3. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
 4. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kegiatan jalur hijau dan RTH;

5. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 6. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
 7. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
 8. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan;
 9. meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
 10. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait DAS; dan
 11. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.
- k) Pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama dengan strategi:
1. merehabilitasi dan menata kawasan cagar budaya Banten Lama sebagai kawasan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya;
 2. mempertahankan dan melestarikan delineasi kawasan cagar budaya Banten Lama sesuai dengan kewenangannya;
 3. mengamankan Situs cagar budaya Kawasan Banten Lama sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. mengembangkan atraksi dan sarana serta prasarana pariwisata sesuai dengan kewenangannya.
- l) Pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi-potensi kawasan wisata alam dengan strategi:
1. mengembangkan kawasan penyangga di sekitar cagar alam yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan RTH;
 2. mengembangkan kawasan ekowisata; dan
 3. mengembangkan rute wisata di Daerah.
- m) Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal dengan strategi:
1. mengembangkan dan menata kawasan Royal dan Pasar Lama;
 2. mengembangkan dan menata sektor informal di lingkungan Pasar Induk Rau dan pasar tradisional yang ada di Daerah;

3. menata dan mengelola sektor informal di kawasan cagar budaya Banten Lama;
 4. mengatur persebaran pedagang pada wilayah tertentu sesuai dengan jenisnya;
 5. mengembangkan kemitraan antara sektor formal dengan sektor informal; dan
 6. menetapkan regulasi keberadaan sektor informal.
- n) Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana dengan strategi:
1. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 2. merencanakan jalur evakuasi bencana; dan
 3. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- o) Penyediaan pedestrian di pusat kota dengan strategi:
1. mengembangkan jalur pedestrian sepanjang jalur utama; dan
 2. mengembangkan jalur pedestrian pada kawasan pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- p) Penetapan RTH seluas 30% dari luas wilayah dengan strategi:
1. menyediakan RTH Privat dengan luas paling sedikit 10% dari luas kawasan terbangun;
 2. menyediakan RTH Publik dengan luas paling sedikit 3.043 ha dari kawasan terbangun;
 3. melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH;
 4. mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik;
 5. menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya;
 6. membangun RTH pada mas jalan utama;
 7. membangun RTH pada lokasi fasilitas umum;
 8. membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan jaringan jalur kereta api, sempadan jaringan SUTT dan SUTET;
 9. menghijaukan halaman rumah, perkantoran, dan perdagangan; dan
 10. kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
- q) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara dengan strategi:
1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

2. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan kewenangannya;
3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan
4. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan.

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan Pola Ruang Kota Serang untuk memastikan bahwa tujuan RTRW Kota Serang dalam mewujudkan daerah sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN dapat tercakup dalam kesiapan pola ruang Kota Serang.

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Serang

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. Rencana ini memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota untuk periode 20 tahun ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

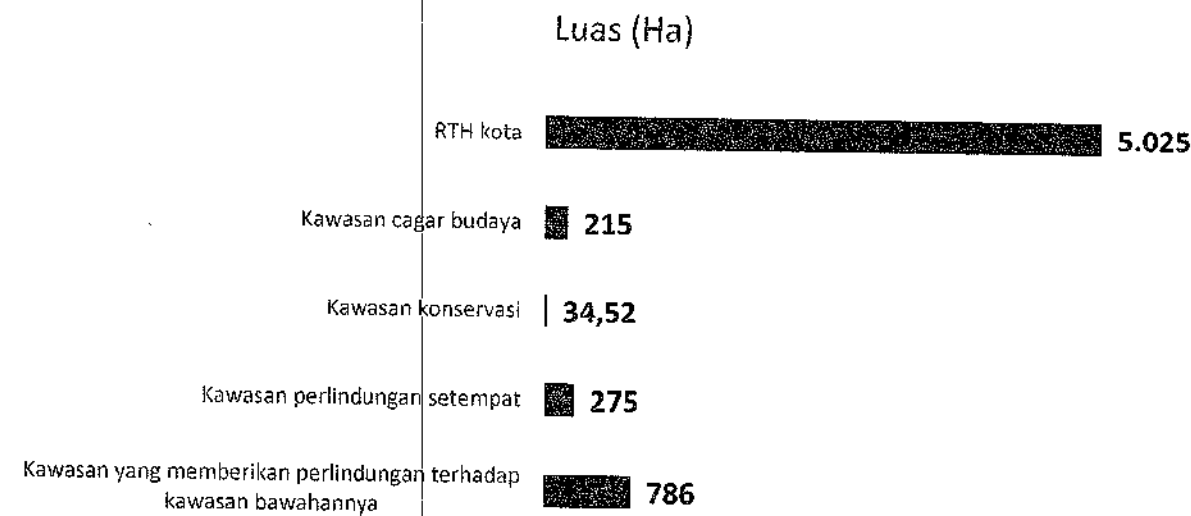
Alokasi pola kawasan lindung di Kota Serang terdiri atas alokasi Kawasan RTH dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Selain itu ditunjang oleh Kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, serta kawasan konservasi.

Tabel III.18
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	786
2	Kawasan perlindungan setempat	275
3	Kawasan konservasi	34,52
4	Kawasan cagar budaya	215
5	RTH kota	5.025

Sumber: Dokumen RTRW 2020 – 2040 Kota Serang

Gambar III.9
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang



Sumber: RTRW, diolah 2024

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Alokasi lahan untuk Kawasan Perumahan dengan luas 13.716 Ha;
2. Alokasi lahan untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan luas 3.913 Ha;
3. Alokasi lahan untuk Kawasan Pertanian dengan luas 3.054 Ha.

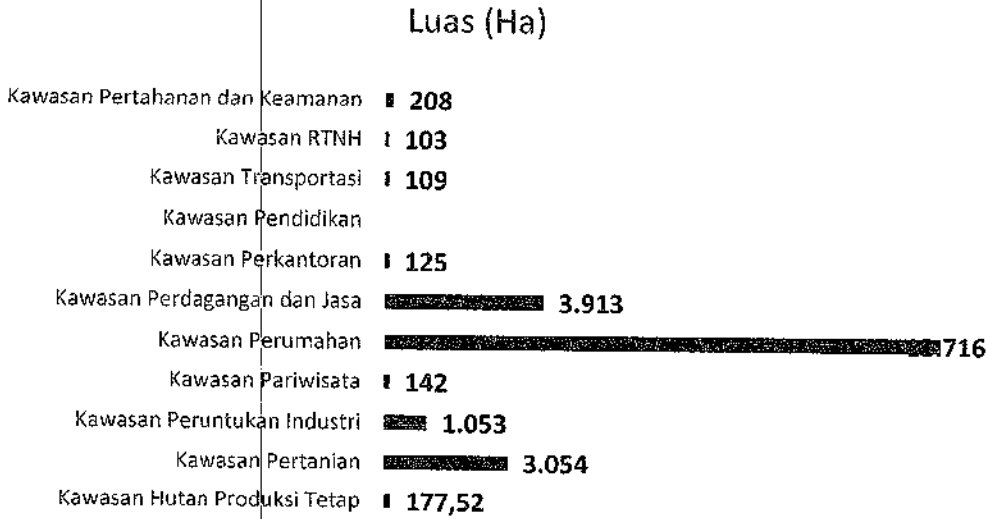
Tabel III.19
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	177,52
2	Kawasan Pertanian	3.054
3	Kawasan Peruntukan Industri	1.053
4	Kawasan Pariwisata	142
5	Kawasan Permukiman	
	Kawasan Perumahan	13.716
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	3.913
	Kawasan Perkantoran	125
	Kawasan Pendidikan	
	Kawasan Transportasi	109
	Kawasan RTNH	103
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	208

Sumber: RTRW, diolah 2024

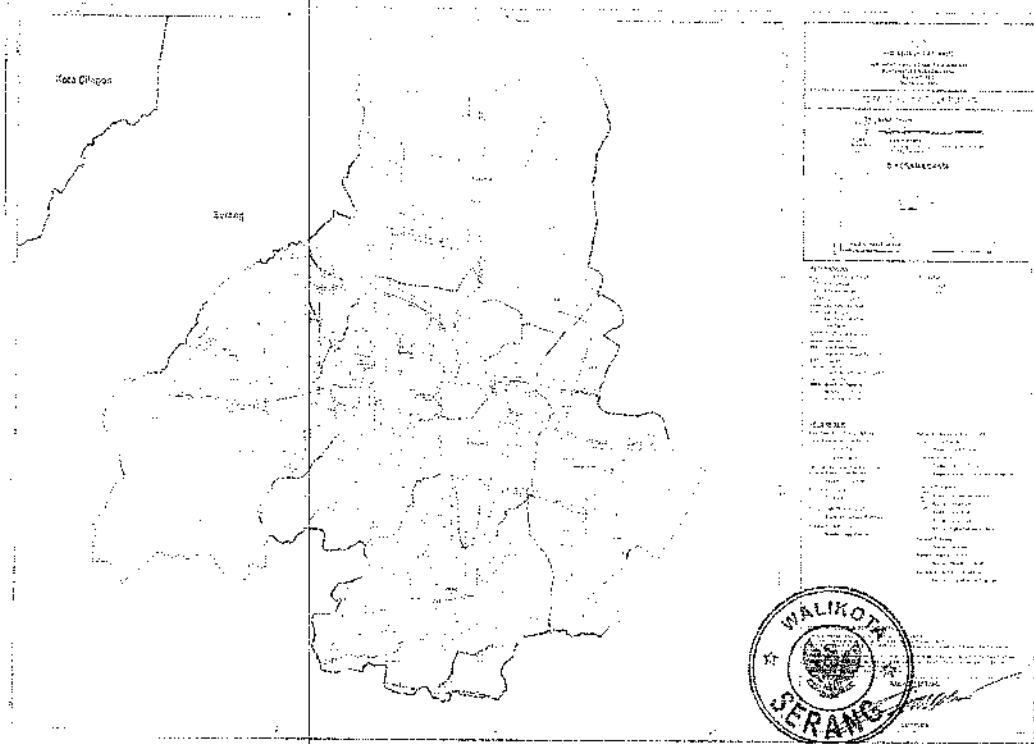
Untuk mendapatkan gambaran komparatif yang lebih jelas, berikut adalah diagram yang menunjukkan rencana pola ruang Kawasan budidaya Kota Serang dan peta pola ruang secara keseluruhan.

Gambar III.10
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang



Sumber: RTRW, diolah 2024

Gambar III.11
Rencana Pola Ruang Kota Serang



Sumber: RTRW, diolah 2024

Dari analisis di atas, berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Serang, maka fokus pengembangan wilayah Kota Serang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang dijelaskan dalam RTRW Kota Serang tahun 2020-2040 adalah pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata yang ditunjang dengan alokasi pendidikan. Pengembangan ini akan diperkuat oleh peran Kota Serang di regional Provinsi Banten sebagai Pusat

Kegiatan Nasional dan pusat pemerintahan provinsi. Selain itu, penetapan kawasan untuk kepentingan industri juga menjadi tanda upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengarahkan perkembangan wilayahnya.

3.2.4 Isu Strategis Kota Serang

Isu strategis memberikan gambaran tentang fokus dan prioritas penanganan yang menjadi perhatian pemerintah. Keberadaan isu strategis dianggap krusial karena memiliki dampak yang besar, meluas, dan signifikan terhadap upaya perbaikan kondisi masyarakat dalam rangka pembangunan di masa mendatang. Melalui identifikasi berbagai isu, baik yang berskala internasional, nasional, maupun daerah, dapat ditetapkan isu-isu strategis untuk Kota Serang yang akan menjadi fokus penanganan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Rincian isu-isu tersebut akan diuraikan berdasarkan aspek-aspek pembangunan daerah sebagai berikut.

A. Isu strategis Kota Serang berdasarkan aspek Demografi dan Geografi

1) Penguatan modal sosial yang berkearifan luhur

Modal sosial masyarakat senantiasa berkembang seiring perubahan zaman, didorong oleh interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Modal sosial menjadi fondasi utama dalam membentuk, mengubah, dan memperkaya dinamika sosial. Melalui kondisi ini, norma-norma, nilai-nilai, serta perilaku kolektif masyarakat terus berkembang, menciptakan pola sosial baru yang mempengaruhi arah perkembangan kota secara keseluruhan. Kota Serang tidak hanya tumbuh dari segi fisik, namun juga dari segi sosial dan budaya yang memperkuat modal sosial masyarakatnya supaya berkearifan luhur.

Penguatan modal sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kualitas lingkungan hidup di sekitar masyarakat. Sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup cenderung memiliki modal sosial budaya yang kuat. Dalam konteks Kota Serang, ketahanan sosial budaya terwujud dalam upaya melestarikan warisan budaya, menguatkan karakter masyarakat lokal, serta menjaga identitas sosial yang sejalan dengan perkembangan zaman.

2) Keberlanjutan ekologi dan resiliensi perubahan iklim

Di sisi lain, keberlanjutan ekologi menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan alam dan aktivitas manusia. Pembangunan yang bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem harus terus diupayakan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti industrialisasi yang tidak terkontrol, urbanisasi yang cepat, serta polusi yang merusak kualitas udara, air, dan tanah. Masyarakat Kota Serang harus memiliki kepedulian yang lebih besar lagi

terhadap ketahanan yang keberlanjutan ekologi, di mana setiap elemen warga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem alam.

Strategi pembangunan Kota Serang perlu mempertimbangkan aspek demografi yang terus berubah serta pengaruh geografisnya. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah memperkuat modal sosial melalui partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Serang juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekologi.

Dengan demikian, ketahanan sosial budaya dan keberlanjutan ekologi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam menjaga kualitas hidup di Kota Serang. Melalui kesadaran kolektif masyarakat dan peran aktif pemerintah, Kota Serang dapat menjadi model bagi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sosial, budaya, dan ekologi yang harmonis.

B. Isu Strategis Kota Serang berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat

1) Penguatan perlindungan sosial yang adaptif

Falsafah pembangunan yang holistik mengamanatkan bahwa seluruh pihak dan sektor harus mendapatkan penanganan yang adil, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Terutama dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang krusial, prinsip keadilan menyeluruh menjadi landasan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kota Serang, salah satu tantangan sosial utama yang masih dihadapi adalah kemiskinan, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif dari seluruh pemangku kebijakan.

Langkah-langkah konkret dalam menangani kemiskinan di Kota Serang perlu untuk dirumuskan melalui upaya penciptaan model-model perlindungan sosial yang bersifat adaptif. Artinya, pendekatan ini harus disiapkan tidak hanya terbatas pada solusi umum, melainkan responsif terhadap kebutuhan dan konteks lokal. Dalam bentuk praksisnya, selain memberikan dukungan finansial, perlindungan sosial yang adaptif juga mencakup penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penanganan kemiskinan secara holistik terlihat dalam hubungannya dengan falsafah pembangunan yang menyeluruh dan mendasar pada pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari keluarga. Tantangan dalam

mengarahkan penyelesaian atas isu ini, tidak hanya terpaku pada faktor ekonomis saja. Akan tetapi yang jauh lebih urgen adalah upaya untuk memastikan dan menyiapkan perangkat-perangkat dan proses mitigasi yang mencapai setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan inklusif yang dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di Kota Serang.

2) Transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif

Transformasi ekonomi di sektor-sektor produktif memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks pembangunan sebuah wilayah seperti halnya di Kota Serang. Hal ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui transformasi ini, sektor-sektor yang memiliki potensi dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Terlebih lagi, fokus pada sektor-sektor produktif dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Transformasi ekonomi yang efektif membuka pintu bagi inovasi dan peningkatan produktivitas, mendukung daya saing wilayah dalam tingkat nasional dan global. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara umum, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap distribusi pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membentuk lingkungan bisnis yang mendukung dan kondusif. Dengan pendekatan yang terintegrasi dengan baik, transformasi ekonomi dapat menjadi sebuah perjalanan yang sangat produktif melalui upaya pembentukan fondasi yang kuat untuk masa depan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan asumsi seperti ini, transformasi ekonomi akan berdampak dalam waktu yang lama dan akan menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan hingga masa depan.

Upaya strategis dalam menghadapi isu transformasi ekonomi ini tidak hanya sekedar melibatkan perubahan struktural, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan positif yang mendalam dalam ekosistem bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Tantangan untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas akan langsung berimbas pada peningkatan daya saing daerah, bahkan bisa mencapai dunia internasional. Dengan demikian, isu ini akan dapat diarahkan untuk menyukseskan terjadinya transformasi ekonomi yang dapat dilihat dari kualitas ketahanan ekonomi daerah.

Isu strategis ini juga berhubungan dengan kebutuhan inovasi yang berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, dan pengelolaan berkelanjutan yang berorientasi pada nilai-nilai futuristik. Secara praksis, transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif ini juga membutuhkan dukungan-dukungan yang berfungsi sebagai penguat partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pihak yang bertanggung jawab dalam hal perekonomian dengan lembaga pendidikan dan pelatihan akan sangat diperlukan. Hal ini perlu untuk dirumuskan dengan seksama dan bijak karena bukan tidak mungkin menciptakan celah persoalan lain, seperti konflik antar sesama masyarakat atau kelompok masyarakat. Begitu pula dalam meredam kemungkinan imbas dari transformasi ekonomi ke persoalan-persoalan lingkungan hidup dan persoalan sosial lainnya.

C. Isu strategis Kota Serang berdasarkan aspek daya saing daerah

1) Akselerasi pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan produktif

Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan tulang punggung dari pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Serang. Pendekatan komprehensif dalam menghadapi isu pembangunan dalam hal SDM sangat diperlukan untuk mencapai Visi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2024. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat meningkatkan demografi secara global akan menyebabkan munculnya persoalan-persoalan dalam lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan.

Selain persoalan umum di atas, diperlukan pembaruan substansial untuk dalam kualitas pendidikan, baik formal maupun nonformal. Beberapa hal kunci yang merupakan tantangan yang muncul dalam isu ini mencakup peningkatan keterampilan dan kualifikasi guru, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan global dan teknologi, serta penyediaan sarana prasarana belajar yang modern dan memadai. Fokus pada integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi krusial agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era digital. Selain itu pendidikan nonformal juga perlu diperhatikan terutama dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan pendukung yang bersifat praksis pada angkatan kerja yang akan atau baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan juga terdapat tantangan yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan mencakup upaya pencegahan penyakit, peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan medis. Terkait dengan potensi penyebaran wabah penyakit, program-program preventif seperti vaksinasi dan edukasi

kesehatan masyarakat perlu dijadikan sebagai prioritas, sementara investasi dalam fasilitas kesehatan yang modern dan tenaga medis yang berkualitas akan mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain penyakit medis, penyakit mental seperti depresi, kecemasan, dan stres juga menjadi isu yang perlu mendapatkan penanganan serius. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai masih menjadi kendala utama bagi banyak penduduk. Kesehatan mental yang buruk berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan kinerja sosial-ekonomi daerah tersebut. Ketika masalah kesehatan mental tidak ditangani dengan baik, ini dapat menghambat produktivitas individu dan mengurangi partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kesehatan mental bukan hanya isu pembangunan SDM tetapi juga isu strategis yang mempengaruhi kemajuan dan stabilitas sosial-ekonomi daerah seperti Kota Serang.

Dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan di atas, langkah strategis dalam memperbarui kebijakan menjadi penting untuk dilakukan demi terciptanya lingkungan yang mendukung terwujudnya optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara produktif. Pertimbangan ini juga diperlukan agar investasi yang ditanamkan pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan dapat tepat guna. Pemerintah Daerah Kota Serang juga mesti memastikan setiap penduduk di wilayahnya memiliki akses yang adil dan merata dalam mendapatkan pelayanan terkait pendidikan dan kesehatan.

2) Pemenuhan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan merata

Seluruh pemangku kepentingan di Kota Serang harus memberikan perhatian serius terhadap aktivitas yang berpotensi merusak harmoni sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, beberapa isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus mencakup peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang, gangguan terhadap habitat alami, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, serta kenaikan emisi gas rumah kaca. Dampak-dampak ini bukan hanya mengancam keseimbangan sosial, tetapi juga mempercepat degradasi kualitas lingkungan, mulai dari udara, air, hingga tanah, serta menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Tantangan utama bagi Pemerintah Kota Serang adalah memaksimalkan langkah-langkah preventif serta menciptakan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko penurunan kualitas lingkungan. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan berfokus pada pembangunan sarana

prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur perkotaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dengan pelestarian lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, perhatian harus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti mereka yang berkebutuhan khusus, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, serta mempertimbangkan aspek keadilan gender. Keadilan dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam konteks ini agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari kemajuan yang ada.

Pemerintah Kota Serang harus mampu membuat keputusan investasi yang bijak dalam pengembangan infrastruktur kewilayahan, yang tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas kehidupan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Infrastruktur perkotaan yang didesain dengan baik, ramah lingkungan, dan adil akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang merata, menciptakan kota yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

D. Isu strategis Kota Serang berdasarkan aspek pelayanan publik

1) Implementasi reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berkualitas

Isu strategis terkait transformasi tata kelola melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi memerlukan analisis mendalam untuk memahami dampak serta implikasi strategisnya bagi Kota Serang hingga tahun 2045. Proses ini melibatkan identifikasi tantangan dan hambatan yang perlu diantisipasi, yang meliputi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem birokrasi yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki dan mengukur potensi perubahan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam menghadapi transformasi ini, pertimbangan untuk menerapkan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas sistem birokrasi yang ada perlu untuk dilakukan. Upaya kunci dalam mendukungnya adalah proses identifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki dan pengukuran potensi perubahan terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kota Serang.

Kota Serang perlu mengarahkan penyusunan visi pembangunan jangka pendek dan rencana kerja yang jelas terkait peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek-aspek krusial seperti perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas pegawai, dan integrasi teknologi informasi memerlukan evaluasi menyeluruh untuk

memahami sejauh mana transformasi tata kelola dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Penekanan pada reformasi birokrasi yang berintegritas dalam menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang berkualitas adalah bentuk upaya dasar yang tepat. Penguatan kualitas melalui perencanaan yang inovatif termasuk menciptakan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem IT. Peningkatan kompetensi SDM juga akan sangat dibutuhkan sehingga pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi perlu untuk dipersiapkan dengan tepat. Edukasi perangkat daerah hingga ke level terbawah harus dilakukan sehingga kualitas pelayanan benar-benar dilakukan berbasis pada garis instruksi yang sesuai. Ekosistem pelayanan publik yang didasarkan kepada isu strategis ini, akan memicu terlaksananya implementasi pelayanan publik yang akuntabel dan juga adaptif sehingga memiliki daya kelola yang berbobot.

Tabel III.20
Keterkaitan Isu Pembangunan Daerah

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI BANTEN	ISU STRATEGIS RPJPD KOTA SERANG
1. Perubahan demografi global 2. Perdagangan internasional 3. Pertumbuhan masyarakat pendapatan kelas menengah dan potensi <i>emerging economic</i> 4. Persaingan sumber daya alam 5. Perubahan Iklim 6. Teknologi informasi	1. Isu Ekonomi a. Rendahnya daya saing, produktivitas, ketahanan perekonomian pedesaan dan penggunaan teknologi tinggi pada industri b. Konektivitas jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai antar wilayah kurang optimal c. Tingkat inflasi masih rentan terhadap gejolak harga BBM 2. Isu Sosial a. Akses pendidikan daerah terpencil dan sulit dijangkau masih terbatas b. Terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha c. Pelayanan kesehatan lansia, jumlah stunting dan insidensi TB masih tinggi d. Tingginya tingkat kemiskinan, produktivitas UMKM terbatas di perkotaan, kualifikasi tenaga kerja, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar masih belum optimal	1. Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing 2. Pembangunan perekonomian yang Tangguh dan inklusif 3. Tata Kelola pemerintah yang adaptif dan berintegrasi 4. Keamanan, ketahanan, demokrasi, dan Kerja sama Pembangunan, serta ekonomi makro yang Tangguh 5. Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang arif dan luhur 6. Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	1. Isu strategis berdasarkan aspek Demografi dan Geografi a. Penguatan modal sosial yang berkearifan luhur b. Keberlanjutan ekologi dan resiliensi perubahan iklim 2. Isu Strategis berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat a. Penguatan perlindungan sosial yang adaptif b. Transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif c. Isu strategis Kota Serang berdasarkan aspek daya saing daerah d. Akselerasi pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan produktif e. Pemenuhan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan merata 3. Isu strategis berdasarkan aspek pelayanan publik a. Implementasi reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berkualitas

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI BANTEN	ISU STRATEGIS RPJPD KOTA SERANG
	3. Isu Sarana dan Prasarana a. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar kesehatan dan pendidikan masih rendah b. Bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah c. Pelayanan dan pemanfaatan ketenagalistrikan belum merata d. Ketersediaan air sebagian kecil yang telah dimanfaatkan akibat variasi spasial antarpulau dan temporal antarmusim e. Akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas f. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan g. Masalah perkotaan masih berdampak pada kerugian ekonomi h. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional i. Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau terbatas j. Akses terhadap pengelolaan sanitasi aman masih terbatas k. Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana 4. Isu Desentralisasi dan Otonomi Daerah		

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI BANTEN	ISU STRATEGIS RPJPD KOTA SERANG
	a. Penegakan hukum masih menjadi isu penting b. Peningkatan tata kelola pembangunan termasuk perkotaan metropolitan belum mengimbangi kualitas pelayanannya c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi d. Kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah di Pulau Jawa 5. Isu Sosial Budaya dan Ekologi a. Tahun 2021 Provinsi Banten (47,47) Indeks Pembangunan (IPK) di bawah angka nasional (51,9) b. Peran dan fungsi keluarga belum optimal dan ketimpangan gender masih tinggi c. Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah berdampak kualitas lingkungan hidup d. Posisi geografis di cincin api pasifik, zona megathrust di pesisir selatan dan erupsi gunung api aktif berpotensi bencana alam e. Kelarasan rencana tata ruang dan rencana pembangunan, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal		

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional serta merupakan implementasi dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Kota Serang berupaya memanfaatkan lokalitas, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas yang mencerminkan identitas unik daerah guna mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan sudut pandang ini, diperlukan suatu pembahasan khusus yang mengilustrasikan bagaimana rencana pembangunan daerah memastikan kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang nasional.

Sebagai bagian dari upaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang menjadi aspirasi besar dalam implementasi pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 2025 hingga 2045, Kota Serang turut menyusun visi jangka panjang daerah. Dalam konteks perencanaan, visi RPJPD mencerminkan aspirasi dan harapan yang ingin dicapai oleh Kota Serang pada akhir periode perencanaan dua puluh tahun nanti. Untuk merealisasikan visi tersebut, penetapan misi dalam RPJPD menjadi suatu kebutuhan esensial. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan regulasi dan adanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan di tengah masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan jangka panjang yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kota Serang. Tujuan dari penyusunan rencana jangka panjang ini adalah untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

RPJPD diarahkan sebagai langkah untuk mendukung ketercapaian tujuan pembangunan nasional dengan fokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan manusia sebagai pusat objek dan sekaligus subjek pembangunan. RPJPD Kota Serang pada dasarnya merupakan upaya untuk merincikan dan menggambarkan visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka panjang 20 tahun yang mengacu pada RPJPN dan RTRW. Proses penyusunan RPJPD Kota Serang dilakukan dengan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kota Serang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tersebut pada pasal 260 yang berbunyi "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Pasal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang memegang tanggung jawab untuk merencanakan pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun. Tugas ini melibatkan penyusunan dan perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang akan dijalankan dalam periode pembangunan jangka menengah lima tahunan.

Visi RPJPD harus mampu memberikan gambaran masa depan yang diidamkan bagi masyarakat dan daerah, menjadi dasar bagi semua elemen pelaku pembangunan di Kota Serang. Visi menggambarkan arah atau kondisi ideal di masa depan yang diinginkan, berdasarkan situasi dan kondisi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi sekarang dan masa depan yang diharapkan. Oleh karena itu, visi harus didasarkan pada realitas, fokus pada masa depan, dan bukan sekadar pemikiran spekulasi semata. Visi pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, menjadi panduan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visi pada periode lima tahun mendatang serta dalam penyusunan RPJMD.

Misi pembangunan adalah rumusan umum mengenai langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai visi yang ingin dicapai dan merinci upaya-upaya apa yang perlu dilakukan. Dalam pengembangan rumusan misi dalam dokumen perencanaan, perhatian diberikan pada faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi pembangunan daerah. Misi disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, pernyataan misi Kota Serang menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dan maksud yang ingin dijelaskan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi menjadi aspek yang sangat krusial dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang. Visi RPJPD merupakan manifestasi dari cita-cita Kota Serang pada tahun 2045.

Proses perumusan visi dan misi jangka panjang memerlukan upaya yang besar dan harus mempertimbangkan visi nasional, visi Provinsi Banten, serta merujuk pada dokumen RTRW dan KLHS-RPJPD. Selain itu, aspirasi dan harapan masyarakat juga menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan visi ini. Selanjutnya, proses ini akan dilaksanakan secara komprehensif dan konsisten dengan perencanaan pembangunan jangka menengah. Proses ini melibatkan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Keterwakilan dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat, dikenal sebagai pendekatan *pentahelix*, diharapkan dapat mencerminkan aspirasi publik secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar perencanaan jangka panjang dapat mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat untuk kemajuan daerah dalam dua puluh tahun ke depan.

4.1 VISI KOTA SERANG

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kota Serang diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengusung Visi Indonesia Emas 2045: "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Harapan dan cita-cita yang terkandung dalam visi ini adalah tercapainya kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuatan geopolitik, militer, dan geoeкономи dunia pada tahun 2045. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar dan memiliki peluang untuk mengendalikan berbagai aspek sosial, kebangsaan, dan kenegaraan secara berdaulat.

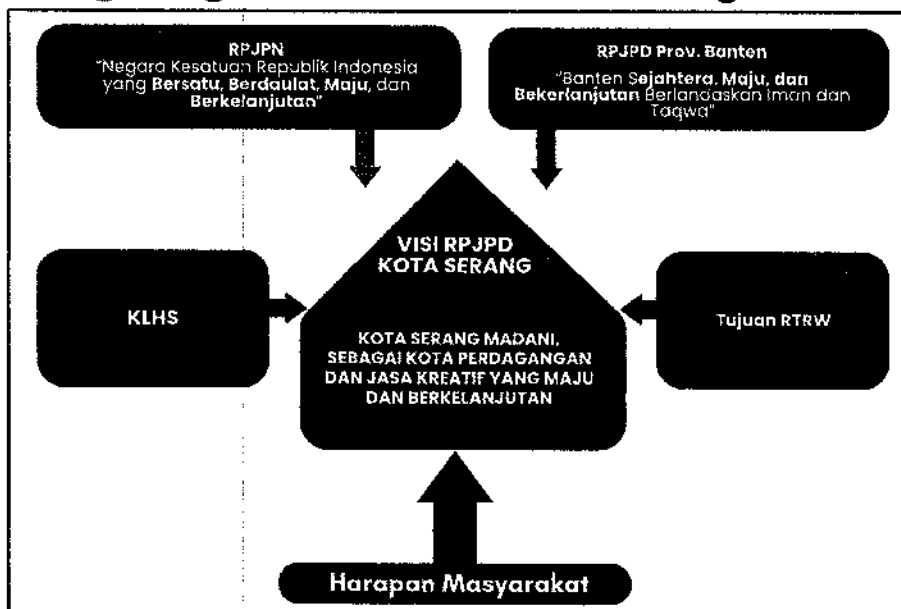
Target yang telah ditetapkan ini didasarkan pada fondasi pengetahuan dan inovasi yang tumbuh dari akar budaya Nusantara yang kaya. Berdasarkan ini, maka Indonesia diproyeksi akan menjadi negara yang berdaya, modern, dan adil, menunjukkan daya saing yang tinggi di tingkat domestik maupun global. Secara umum, kemandirian ekonomi menjadi tonggak utama yang memungkinkan Indonesia untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Di samping itu, keadilan sosial akan menjadi prinsip pokok yang dijaminakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Kota Serang dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan akan bersinggungan dengan dinamika global dan nasional yang berpengaruh secara signifikan pada pembangunan daerah. Megatren global, seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi, dipandang sebagai pemicu utama untuk mengantisipasi perubahan ini. Respon yang cepat, terutama melalui mitigasi dan adaptasi, perlu dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki mengadopsi pendekatan transformasi dalam seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang harus mengintegrasikan strategi transformasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan ketangguhan Kota Serang di masa depan.

Dalam merumuskan Visi pembangunan jangka panjang Kota Serang, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari melibatkan masyarakat adalah agar perencanaan yang disusun dapat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat. Aspirasi masyarakat diperoleh melalui proses jajak pendapat yang disebar kepada masyarakat. Hasil dari partisipasi masyarakat tersebut menghasilkan harapan masyarakat, yang akan menjadi landasan utama dalam pembentukan visi dan misi Kota Serang.

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten, serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka dapat dilihat kerangka logis perumusan visi Kota Serang pada gambar berikut:

Gambar IV. 1
Kerangka Logis Perumusan Visi Kota Serang 2025-2045



Sumber: Data diolah, 2024

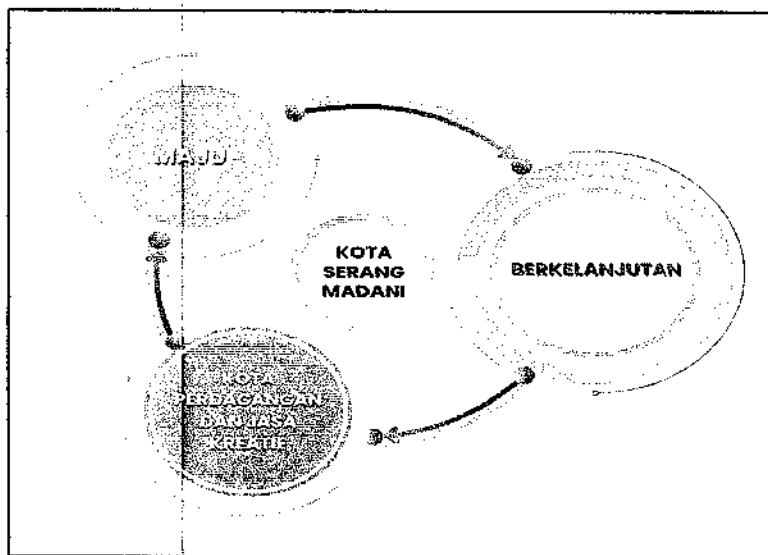
Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam gambar di atas, dengan mempertimbangkan pencapaian

pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global, serta harapan masyarakat dan tujuan RTRW, ditetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Serang tahun 2025-2045, yaitu:

“KOTA SERANG MADANI SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA KREATIF YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Kota Serang menjadi Kota yang Madani, Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju, dan Berkelanjutan terdiri dari empat pokok visi yaitu Madani, Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif, Maju dan Berkelanjutan. Keterkaitan antar pokok visi RPJPD Kota Serang dapat dilihat sebagaimana dalam diagram berikut ini:

Gambar IV.2
Alur Keterkaitan Pokok Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah, 2024

MADANI merupakan slogan utama Kota Serang yang menunjukkan prinsip dan tujuan utama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Serang sejahtera yang beradab dan berbudaya. MADANI Kota Serang pada dasarnya adalah semangat kebangsaan yang mengandung prinsip persaudaraan, persatuan, toleransi, moderat, kedaulatan, dan kemartabatan manusia, dengan prinsip sebagai sistem nilai yang menghormati kebebasan beragama; menjaga persaudaraan antar umat beragama; menjaga perdamaian dan kedamaian; menjaga persatuan; etika politik yang bebas dan bertanggungjawab; pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban masyarakat; konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan; terciptanya masyarakat yang demokratis; menghormati hak-hak asasi individu; dan selalu berada dalam koridor agama.

Selain slogan Kota Serang Madani, terdapat 3 pokok visi untuk menggambarkan keberhasilan daerah. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Visi RPJPD Kota Serang, berikut adalah penjelasan visi Kota Serang:

A. PERDAGANGAN DAN JASA KREATIF

Salah satu sektor aktivitas dan pembentuk struktur perekonomian adalah perdagangan dan jasa, yaitu sektor ekonomi yang bergerak atau terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa layanannya baik di dalam wilayah maupun antar wilayah secara regional, nasional, dan global. Kota Serang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif merupakan cerminan dari keunggulan daerah dalam penyediaan akses terhadap aktivitas perdagangan, jasa, dan kreativitas.

Perdagangan dan jasa kreatif mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, desain, seni, dan budaya, yang memberikan nilai tambah melalui inovasi dan kreativitas. Sektor ini akan memperkaya budaya lokal dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Peran dan kontribusi sektor perdagangan dan jasa kreatif dapat menjadi katalisator dan penggerak Kota Serang untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. Dengan memanfaatkan potensi kreatif, Kota Serang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar regional, nasional, dan global, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

B. MAJU

Pokok visi MAJU merupakan prinsip pembangunan yang tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik secara ekonomi dalam mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Pencapaian cita-cita ini ditandai dengan sektor unggulan yang kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi di tingkat regional dan nasional. Kota Serang MAJU memiliki tekad mewujudkan Kota Serang sebagai kota yang berdaya, modern dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui teknologi dan layanan yang mutakhir, percepatan pembangunan infrastruktur serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kota Serang MAJU juga mencerminkan seluruh lapisan masyarakat Kota Serang dapat menikmati keadilan dan kesejahteraan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, penguatan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan

keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang tangguh.

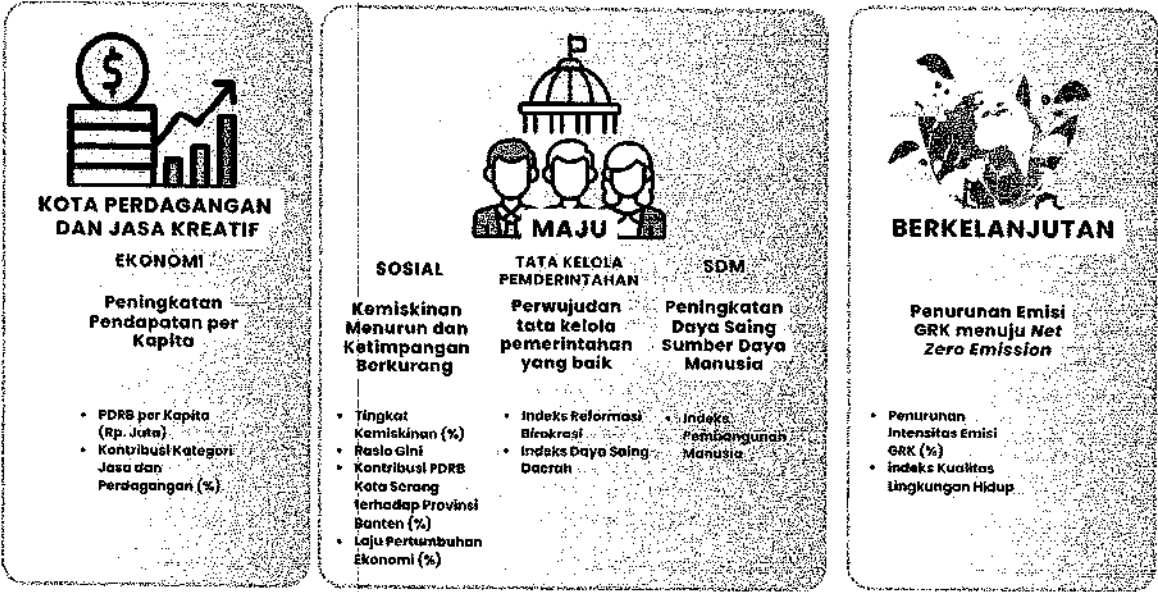
C. BERKELANJUTAN

Pokok visi BERKELANJUTAN menunjukkan komitmen Kota Serang untuk terus menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui penyelarasan penciptaan produk, layanan, sarana dan prasarana bidang ekonomi, sosial, budaya yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan, dalam mewujudkan Kota Serang menjadi kota yang maju dan modern namun tetap mendukung program-program ramah lingkungan yang tujuannya untuk menurunkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kota Serang tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Serang. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kota yang Madani, Pusat Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju, dan berkelanjutan. Meningkatnya pendapatan per kapita melalui yang didapatkan oleh PDRB per kapita, meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan naiknya kontribusi kategori jasa dan perdagangan adalah indikator sasaran visi **KOTA PERDAGANGAN DAN JASA KREATIF**. Meningkatnya daya saing SDM, berhasilnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang didapatkan dengan meningkatnya IPM Kota Serang, menurunnya kemiskinan, menurunnya Rasio Gini, naiknya kontribusi PDRB Kota Serang, dan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator sasaran visi **MAJU**. Sementara itu turunnya emisi GRK menuju Net Zero Emission yang didapatkan dari naiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah indikator sasaran visi **BERKELANJUTAN**.

Melalui acuan dari permasalahan, isu strategis, serta harapan masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kota Serang sebagai berikut:

Gambar IV. 3
Keterkaitan Pokok Visi dengan Sasaran Visi Kota Serang



Sumber: Data diolah, 2024

Untuk memastikan terjadinya sinergitas antara visi pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional, maka diperlukan penyelarasan antara visi RPJPD Kota Serang, visi RPJPD Provinsi Banten, dan visi RPJMN sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar IV.4
Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Banten, dan Visi Kota Serang Tahun 2025-2045

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa	Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta konsep arah pembangunan Provinsi Banten yaitu Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa, maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kota Serang Tahun 2025-2045 dibuat persandingan antara sasaran serta indikator visi Kota Serang Tahun 2024-2045 dengan sasaran visi nasional dan Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.1
Persandingan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang
Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045				RPJPD Kab/kota Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	a. GNI Perkapita (USD)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	77,21-72,42	348,94-415,51	Peningkatan Pendapatan perKapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	58,55	300-348,50
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,62	98,90				
		c. Kontribusi PDB Marnufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Sektor Industri (%)	30,48-31,20	34,99-36,13		b. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	70,00	74,00
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,55 - 6,17	0,54-0,04
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		b. Rasio Gini (Indeks)	0,344-0,365	0,300-0,351		b. Rasio Gini (Indeks)	0,340-0,342	0,290-0,300
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,43		c. Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	4,00-5,00	7,50-8,50
						d. Pertumbuhan ekonomi	5,28-5,33	5,89-6,89		d. Laju pertumbuhan ekonomi	4,68 - 5,04	6,00-7,00
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,70-3,90	4,50-4,80	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a. Indeks Reformasi Birokrasi	70,97	95,00
										b. Indeks Daya Saing Daerah	3,47	5,00
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	a. Indeks Modal Manusia	0,54	0,71	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,51	87,56
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,56	93,42	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,39	36,56
		Indeks kualitas lingkungan hidup	76,49	83,00		Indeks kualitas lingkungan hidup	66,92	74,92		b. Indeks kualitas lingkungan hidup	64,53	68,77

4.2 MISI KOTA SERANG

Misi adalah pernyataan umum yang merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang efektif membantu menguraikan dengan lebih jelas gambaran visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil.

Perwujudan cita-cita pembangunan Kota Serang dua puluh tahun ke depan didasarkan pada enam landasan transformasi sebagai kekuatan pembangunan daerah. Enam landasan tersebut melibatkan Transformasi Sosial, Ketahanan Sosial dan Budaya, Transformasi Tata Kelola, Transformasi Ekonomi yang didukung oleh penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara pokok visi, dan misi RPJPD Kota Serang.

Gambar IV.5
Keterhubungan antara Pokok Visi dan Misi RPJPD Kota Serang
Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam gambar, strategi transformasi yang merupakan misi dari RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi poros perumusan misi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045. Melalui pokok visi RPJPD dengan memerhatikan strategi transformasi (Misi RPJPN) yang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang kemudian dirumuskan secara linier dalam bentuk misi. Adanya kesinambungan antara pokok Visi RPJPD Kota Serang dan Misi RPJPN menunjukkan bahwa Misi RPJPD Kota Serang terintegrasikan ke dalam kerangka pikir misi perencanaan pembangunan jangka panjang nasional.

Berdasarkan visi jangka panjang Kota Serang tahun 2025-2045 yang telah ditentukan yaitu **“Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan”**, maka misi RPJPD Kota Serang dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan

Transformasi sosial di Kota Serang mencerminkan perubahan mendasar dalam aspek-aspek kritis masyarakat, termasuk struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku. Hal ini tidak hanya terbatas pada satu sektor, melainkan melibatkan berbagai faktor kompleks seperti perubahan demografi, kemajuan teknologi, kondisi lingkungan, dinamika geopolitik, perubahan ekonomi, dan aspek sosial budaya. Keberhasilan transformasi ini sangat tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Dalam upaya menjalankan transformasi sosial, difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar yang sistematis, pengembangan modal manusia, dan modal sosial budaya. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan mampu bersaing di tingkat nasional serta global. Misi transformasi sosial menitikberatkan pada pembangunan sistem kesehatan yang terorganisir, tangguh, dan responsif guna memastikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi kunci penting dalam mencapai misi transformasi sosial ini.

Dalam konteks lebih spesifik, pencapaian misi transformasi sosial juga mencakup penanganan permasalahan jaringan pengaman sosial dengan tujuan akhir mengentaskan kemiskinan di Kota Serang. Ini menegaskan bahwa perubahan sosial yang diinginkan perlu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dengan demikian, transformasi sosial di Kota Serang diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan secara menyeluruh.

4.2.2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Transformasi ekonomi di Kota Serang bukan hanya sekadar respons terhadap proyeksi perubahan ekonomi global, tetapi merupakan fondasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di segmen berpendapatan menengah ke bawah. Dalam menghadapi era perubahan ekonomi global, Kota Serang bertekad untuk mengalami perubahan struktural yang signifikan, beralih dari ekonomi bernilai tambah rendah ke ekonomi bernilai tambah tinggi. Transformasi ini mendorong masyarakat untuk menjadi

lebih produktif, efisien, dan berdaya saing, menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor produksi menjadi poin sentral dalam strategi transformasi ekonomi Kota Serang. Pendekatan holistik yang mencakup pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Sementara itu, implementasi ekonomi hijau dianggap sebagai elemen krusial untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kota Serang tidak hanya berkomitmen pada aspek ekonomi konvensional, tetapi juga memandang ke arah masa depan dengan fokus pada teknologi digital. Pemberdayaan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi inti dari transformasi ini, mengakselerasi kemajuan dalam skala makro dan mikro.

Pembangunan di Kota Serang juga menekankan keberlanjutan dengan merinci strategi pembangunan ekonomi yang mencakup pengembangan infrastruktur yang efisien, peningkatan aksesibilitas pasar, dan kemudahan berinvestasi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, Kota Serang bertekad untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan perlindungan lingkungan hidup menjadi landasan utama dalam merancang masa depan Kota Serang. Dengan demikian, transformasi ekonomi akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah terutama akselerator terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

4.2.3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan selalu menjadi penentu berhasil atau tidaknya langkah-langkah pembangunan yang telah dirumuskan. Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transformasi tata kelola di Kota Serang dilakukan dengan mempertimbangkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan menunjukkan keberpihakan pada transparansi penggunaan anggaran, serta ketaatan hukum.

Dalam menjalankan misi transformasi tata kelola, Kota Serang perlu untuk menyiapkan regulasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan signifikan yang adaptif dan berintegritas. Selain itu, upaya-upaya tertentu seperti efisiensi prosedur pelayanan sembari meningkatkan kualitas dari

regulasi prosedural juga harus dilakukan. Hal ini direncanakan beriringan dengan upaya untuk memprioritaskan penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Tujuan akhir dari upaya sistematis ini adalah tercapainya pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan.

Terkait dengan penyiapan SDM pemerintahan di Kota Serang, pembaruan sistem pendidikan antikorupsi perlu diperhatikan dengan seksama. Beberapa langkah penting dan strategis perlu dipastikan terlaksana seperti diarahkannya tata kelola pemerintahan ke dalam layanan publik yang berkualitas dan inklusif, transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, dan penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil, serta memerhatikan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan berkesinambungan.

4.2.4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya mencerminkan kemampuan suatu kebudayaan untuk secara berkelanjutan memelihara dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budayanya yang relevan, yang kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Kota Serang, ketahanan sosial budaya tidak hanya mencakup upaya untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Serang, akan tetapi juga kebutuhan terhadap interaksi positif antar anggota masyarakat, dukungan dari sistem pendidikan yang mempromosikan keberagaman, serta lingkungan yang mendukung ekspresi kreativitas budaya. Dengan demikian misi terkait ketahanan sosial budaya tidak hanya merupakan bentuk pelestarian warisan masa lalu, melainkan juga menuntut adaptasi terhadap dinamika perubahan sosial untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan kebudayaan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Sementara itu, dimensi lingkungan hidup merupakan elemen krusial dalam upaya mencapai ketahanan ekologis yang melibatkan aspek ekonomi, masyarakat, dan kondisi lingkungan hidup. Ketahanan ekologi adalah basis untuk mewujudkan ketahanan daerah, terutama dalam aspek ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial ekonomi. Ketahanan ekologi memegang peranan sentral karena mencakup keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlanjutan ekosistem, sehingga menjaga ketersediaan sumber daya alam yang krusial di Kota Serang.

Kota Serang akan mengoptimalkan untuk menjaga hubungan timbal balik yang produktif antara sistem sosial budaya dan ekologi dalam menciptakan ketahanan daerah yang kuat. Arah pengembangan pembangunan jangka panjang dalam misi ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan arah yang ideal, beberapa arah pembangunan yang diperhatikan adalah persoalan keberagamaan, kondisi keluarga sebagai tulang punggung sosial kemasyarakatan, kualitas lingkungan hidup, kualitas penyediaan energi, kemandirian pangan, dan resiliensi terhadap bencana alam serta perubahan iklim.

4.2.5. Mewujudkan Sarana Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Kualitas sarana dan prasarana menjadi penanda penting keberhasilan pembangunan daerah. Efektivitas dan efisiensi waktu serta penggunaan anggaran yang optimal adalah fokus utama dalam menilai dampak dari sarana dan prasarana tersebut. Dalam perspektif kualitatif, kondisi yang baik dari sarana dan prasarana memiliki peran sentral dalam mencapai hasil pembangunan yang maksimal, memastikan manfaat yang optimal dari investasi pembangunan yang dilakukan.

Secara kolektif, keberadaan sarana dan prasarana yang berkualitas tidak hanya menyokong pencapaian pembangunan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang akan memastikan misi kelima ini bersifat merata, sehingga dapat mengatasi ketimpangan sosial dan mendukung pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Kota Serang.

Misi ini juga mengarahkan upaya meminimalisir angka pengangguran terbuka di Kota Serang. Dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di berbagai wilayah, pemerintah dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dengan demikian, kualitas sarana dan prasarana adalah suatu langkah yang strategis untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Serang.

Melalui Visi dan Misi yang telah dijabarkan di atas, selama dua puluh tahun mendatang, Kota Serang dihadapkan pada tantangan penting dalam menentukan arah perkembangan kota menuju kota metropolitan. Perencanaan strategis sangat diperlukan sebagai kerangka kerja yang jelas dan berbasis pada visi untuk mewujudkan kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Banten. Dengan lokasi yang strategis sebagai penghubung antara Jakarta dan wilayah Jawa Barat, Kota Serang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat, terutama melalui peningkatan daya saing di sektor ekonomi.

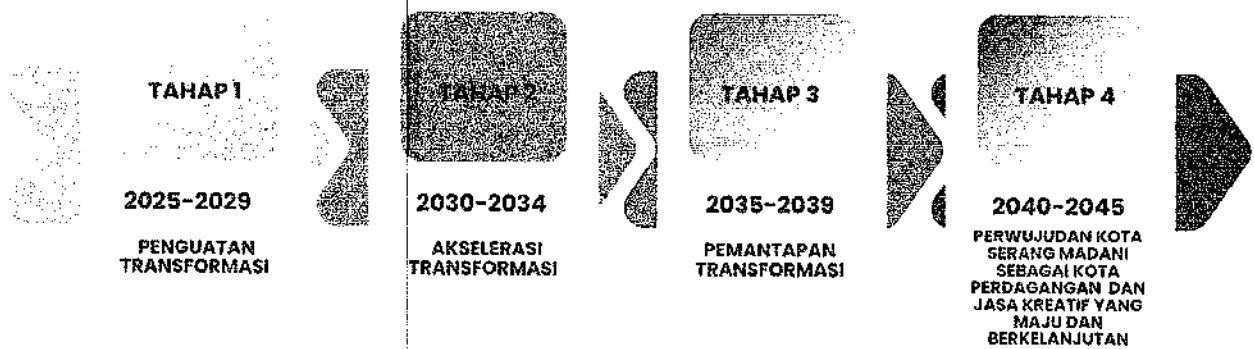
Secara bertahap pelaksanaan misi dan pencapaian visi pembangunan jangka panjang guna mendukung pembangunan Kota Serang sebagai metropolitan akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dalam lingkup perencanaannya, tahap-tahap ini akan mewali penguatan infrastruktur dasar, perluasan kapasitas ekonomi daerah, percepatan pembangunan pusat-pusat ekonomi daerah, dan kemudian pemastian tercapainya visi pembangunan jangka panjang Kota Serang dalam bentuk kota metropolitan Serang.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam proses pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang diperlukan penentuan tema dan arah kebijakan sebagai petunjuk strategis setiap tahapan untuk setiap 5 (lima tahun) selama 20 (dua puluh) tahun. Tema dan arah kebijakan akan dijadikan sebagai arahan atau pedoman bagi calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program politik. Tema dan arah kebijakan disusun menjadi tahapan-tahapan periode lima tahunan dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok serta indikator sebagai ukuran keberhasilan RPJPD Kota Serang 2025-2045. Tema atau Penahapan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Serang disusun secara sistematis untuk mewujudkan Kota Serang MADANI sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan

Gambar V.1
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang



Visi jangka panjang Kota Serang adalah Kota Serang MADANI sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan, yang diupayakan dengan mewujudkan perubahan sosial, ekonomi, tata kelola, dan ekologi yang terangkum dalam sumber daya sehingga memiliki kemampuan dalam menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, serta berdaya saing dan kreatif. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan target tercapainya keseimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat menyeluruh mengenai tema pembangunan jangka panjang Kota Serang, berikut adalah penjelasan untuk setiap tahap yang diakomodir oleh masing-masing tema.

A. Tema Pembangunan I (Tahun 2025-2029): Penguatan Transformasi

Pada periode pertama pembangunan jangka panjang Kota Serang, fokus utama adalah memperkuat transformasi. Langkah-langkah tersebut mencakup semua aspek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini tercermin dalam upaya memastikan bahwa layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tersedia secara merata dan berkualitas. Selain itu, pembangunan daerah difokuskan melalui kebijakan yang mendukung riset inovasi, produktivitas tenaga kerja, dan digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selanjutnya, ada upaya penciptaan lembaga yang berfungsi secara tepat guna untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk memperkuat ketahanan sosial, memelihara warisan budaya, dan memperhatikan keberlanjutan ekologi. Dalam konteks ini, infrastruktur juga menjadi fokus penting, dengan tujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan memadai di seluruh wilayah Kota Serang. Penguatan ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur yang ada serta pembangunan baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota.

Secara keseluruhan, periode pertama pembangunan jangka panjang Kota Serang menandai komitmen untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah konkret termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan inovasi dan produktivitas, pembenahan lembaga, serta peningkatan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pada tahun 2029 diharapkan Kota Serang dapat berkembang secara menyeluruh, memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

B. Tema Pembangunan II (Tahun 2030-2034): Akselerasi Transformasi

Tahap selanjutnya adalah akselerasi transformasi pembangunan yang dapat dimaknai dengan upaya percepatan untuk meningkatkan pembangunan baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, dan juga sosial kebudayaan. Percepatan transformasi pembangunan juga dapat disikapi sebagai upaya strategis agar hasil pembangunan dapat dinikmati dengan lebih cepat. Dengan adanya akselerasi pembangunan, maka potensi meningkatnya kesenjangan diharapkan dapat turun dan sebaliknya kesejahteraan dapat meningkat secara lebih cepat. Upaya percepatan ini dapat diketahui dari model-model kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Meski ada semangat untuk melakukan

akselerasi, perencanaan yang matang dan struktur tata kelola tetap harus menjadi perhatian utama.

Dalam melaksanakan pembangunan pada periode kedua ini, akselerasi transformasi pembangunan akan dioptimalisasi melalui upaya-upaya percepatan seperti mengusahakan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif; meningkatkan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi; menciptakan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil partisipatif; memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif; dan mempercepat peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai.

C. Tema Pembangunan III (Tahun 2035-2039): Pemantapan Transformasi

Tahap ketiga pembangunan Kota Serang adalah pemantapan transformasi yang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Pemerintah Kota Serang akan melakukan optimalisasi untuk memantapkan dan menguatkan cakupan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas infrastruktur dengan seluruh komponen pendukung pembangunan daerah. Semangat yang terkandung di dalam tahapan pembangunan periode ketiga ini adalah memastikan terjadinya pemantapan dalam transformasi pembangunan khususnya pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan dalam kesejahteraan rakyat.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan Kota Serang difokuskan pada arah kebijakan yang menuju pada pemantapan daya saing SDM dan berkelanjutan; pemantapan ekonomi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh; kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil madani; mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan; dan pemantapan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

D. Tema Pembangunan IV (Tahun 2040-2045): Perwujudan Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan

Tahap akhir dari pembangunan jangka Panjang Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif Yang Maju dan Berkelanjutan. Tahap ini akan difokuskan pada perwujudan masyarakat Kota Serang yang unggul, berpendapatan tinggi, memiliki regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan

adaptif, mewujudkan masyarakat Serang yang beradab, dan mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tahap akhir pembangunan jangka panjang ini juga dijadikan sebagai arah pembangunan yang telah terkondisikan secara maksimal. Seluruh aspek pembangunan daerah telah berada pada kondisi penyempurnaan yang didapat dari evaluasi capaian kinerja pembangunan secara komprehensif. Pada tahap akhir ini, seluruh target yang ditetapkan telah dapat diwujudkan secara optimal dan berada pada kualitas terbaik.

5.1. ARAH KEBIJAKAN KOTA SERANG TAHUN 2025-2045

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan dari visi dan misi yang telah ditentukan. Kota Serang memiliki visi pembangunan jangka panjang untuk menjadi **Kota Serang MADANI sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan**. Arah kebijakan yang disusun menjadi panduan untuk menyelaraskan langkah pembangunan yang terbagi menjadi empat tahap periode pembangunan. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Kota Serang.

Untuk mencapai visi RPJPD Kota Serang pada tahun 2045 diperlukan transformasi untuk mencapai arah pembangunan di masa yang akan datang. Keberhasilan transformasi secara menyeluruh memerlukan dukungan dalam bentuk landasan transformasi sebagai faktor penguat. Transformasi di Kota Serang terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang didukung oleh landasan transformasi berupa ketahanan sosial dan budaya, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Transformasi sosial berfokus pada pendidikan, kesehatan, serta kemiskinan dan perlindungan sosial. Transformasi ekonomi mendorong untuk mewujudkan ekonomi yang kreatif dan inklusif. Transformasi tata kelola berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif. Pada transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didorong untuk mewujudkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana yang merata, berkualitas, dan ramah lingkungan. Adapun transformasi ketahanan sosial berfokus pada keagamaan dan kebudayaan. Kebijakan yang diarahkan

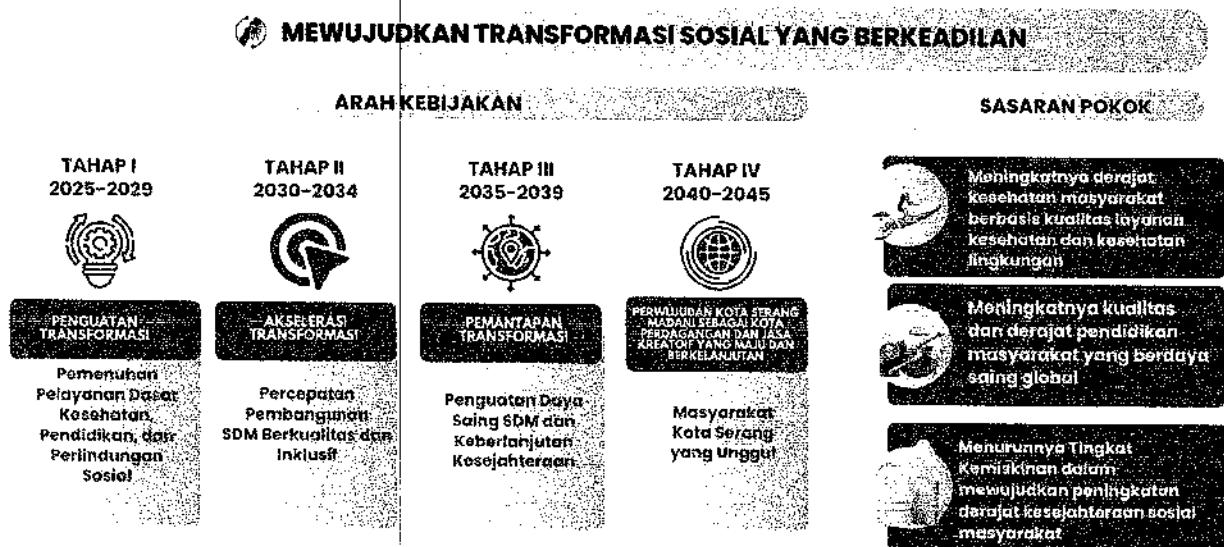
untuk mendukung transformasi-transformasi di atas untuk mencapai visi Serang dapat dijabarkan pada penjelasan berikut.

5.1.1 Misi Kesatu: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial)

Transformasi sosial atau misi kesatu Kota Serang dapat dimaknai dengan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas unggul pada arah kebijakan transformasi sosial mencakup pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta kemiskinan dan perlindungan sosial. Transformasi sosial merupakan upaya suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi sosial diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia dan sosial budaya.

Berdasarkan arah kebijakan transformasi sosial di atas dengan arahan dari misi, maka untuk dapat mewujudkan transformasi sosial di Kota Serang disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.2
Arah Kebijakan berdasarkan Transformasi Sosial/Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan di Kota Serang 2025-2045



Gambar di atas menunjukkan usaha untuk melaksanakan transformasi sosial selama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan arah kebijakan dan indikator pada masing-masingnya. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan transformasi sosial.

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama transformasi sosial Kota Serang diarahkan pada **“Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial”**. Upaya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Sementara itu, perlindungan sosial akan dilakukan dengan menekan angka kemiskinan melalui peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.

Kualitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi indikator utama dalam pelaksanaan transformasi sosial. Pendekatan yang bersifat menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan setiap jiwa memiliki akses yang setara dan berkualitas dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Pemastian ini akan memicu terjadinya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang merupakan roda utama penggerak bagi masyarakat untuk menjadi unggul.

Sementara itu perlindungan sosial bagi masyarakat secara berkualitas dan adaptif adalah kebutuhan mendasar dalam mencapai kesejahteraan. Secara struktural, upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan sangat diperlukan dengan mengadopsi semangat keadilan sosial. Selain mampu meredam persoalan-persoalan terkait kemiskinan, perlindungan sosial akan menjadi landasan utama di Kota Serang untuk menjaga kepastian terjadinya pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Secara kumulatif, akses pendidikan yang baik dan kesehatan yang mumpuni akan mendukung terciptanya perlindungan sosial yang optimal. Pada akhirnya, dengan terpenuhinya tiga komponen ini akan dapat menghadirkan sistem transformasi sosial yang efektif di Kota Serang.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua transformasi sosial Kota Serang diarahkan pada **“Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif”**. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sosial yang berfokus pada akselerasi pembangunan SDM serta memastikan seluruh masyarakat terutama kelompok marginal memperoleh perlindungan sosial yang adaptif.

Pemerintah Kota Serang perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berpotensi dapat memicu percepatan pembangunan sumber daya manusia. Investasi di sektor pendidikan seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja dapat menciptakan akselerasi kualitas SDM. Selain itu, investasi di sektor kesehatan

juga akan memicu terjadinya kualitas masyarakat yang memiliki ketahanan dan vitalitas (daya hidup) tinggi.

Percepatan yang dilakukan di sektor pendidikan, kesehatan, akan secara linier memengaruhi ketahanan masyarakat. Masyarakat yang memiliki ketahanan sosial yang tinggi akan secara langsung menciptakan kerangka dasar perlindungan sosial bagi keseluruhan komunitas. Dengan kondisi ini, kelompok-kelompok marginal akan memiliki kesempatan lebih baik dalam merasakan manfaat pembangunan daerah. Dengan kondisi ini diharapkan kemiskinan sebagai persoalan utama dalam masyarakat dapat ditekan secara optimal.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2040)

Pada tahap ketiga transformasi sosial Kota Serang diarahkan pada **“Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan”**. Tahap ini merupakan tahap penguatan pada transformasi sosial melalui penguatan daya saing SDM serta memastikan adanya pengembangan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat.

Tahap ini diharapkan akan memicu terjadinya cara pikir atau paradigma di tengah masyarakat untuk membangun kemandirian dan integritas sosial secara baik. Pemerintah Kota Serang juga harus mempertimbangkan upaya ekspansif dengan semangat menghadirkan kehidupan yang berkecukupan. Upaya-upaya yang dilakukan diarahkan tidak hanya kepada persoalan ekonomi saja namun perlu diarahkan kepada kualitas aksesibilitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

Secara struktural, tahap ketiga dalam rencana pembangunan jangka panjang memiliki posisi paling penting dalam memastikan kondisi akhir perencanaan jangka panjang. Pemerintah Kota Serang dalam tahap ini harus memastikan seluruh kerangka dan perangkat pemakmuran masyarakat telah berada pada jalur yang benar. Selain itu semua kebutuhan mendasar sudah berada dalam posisi optimal dan siap untuk disempurnakan dalam tahap akhir pembangunan jangka panjang.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat transformasi sosial Kota Serang diarahkan pada **“Masyarakat Kota Serang yang unggul”**. Tahap ini merupakan tahapan transformasi sosial yang untuk mewujudkan Kota Serang Madani sebagai kota perdagangan dan jasa kreatif yang maju dan berkelanjutan pada tahun 2045. Oleh karena itu, tahapan ini memastikan terwujudnya SDM yang unggul dan memiliki kesejahteraan yang merata serta berkualitas.

Terwujudnya Masyarakat Kota Serang yang unggul adalah tema yang menunjukkan bagaimana tahap akhir pembangunan jangka panjang telah berada dalam fase penyempurnaan. Keunggulan yang dimaksud lebih mengarah pada kemajuan dan keunggulan SDM masyarakat Kota Serang berhubungan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi tanpa harus meninggalkan akar budaya setempat.

Pada tahap terakhir dalam pembangunan jangka panjang ini, pemerintah Kota Serang perlu untuk memunculkan kepastian dirasakannya keadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keunggulan dalam kualitas SDM di Kota Serang dapat dimaknai dengan telah tercapainya standar ideal dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendorong ekonomi lainnya.

Untuk mewujudkan misi kesatu RPJPD Kota Serang pada setiap tahap dapat diterjemahkan dan difokuskan dalam arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

Tabel V.1
Arah Kebijakan Transformasi Misi Kesatu RPJPD Kota Serang
Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Mewujudkan Tranformasi Sosial yang Berkeadilan	• Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	• Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. • Pengembangan konsep hospital tourism	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif); • Pemerataan dan peningkatan akses	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar yang inklusif); • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik,	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif). • Perluasan dan peningkatan bantuan	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif). • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
	pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; • Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; • Penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.	khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; • Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. • Penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan perguruan tinggi dan pemerintah daerah.	pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kebencanaan daerah). • Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kebencanaan daerah). • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. • Pengembangan pendidikan vokasi yang diharapkan dapat langsung mendukung industri atau kebutuhan tenaga kerja
	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; • Perluasan penyediaan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan Masyarakat; • Perlindungan sosial dan Perluasan penyediaan jaminan sosial; • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat; • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. • Perluasan penyediaan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan Masyarakat; • Perlindungan sosial dan Perluasan penyediaan jaminan sosial; • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat; • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; • Perluasan penyediaan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan Masyarakat; • Perlindungan sosial dan Perluasan penyediaan jaminan sosial; • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; • Perluasan penyediaan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; • Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

5.1.2 Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi)

Transformasi ekonomi/misi kedua merupakan suatu proses untuk mencapai pertumbuhan pada bidang ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dapat memberikan perubahan yang fundamental dalam struktur perekonomian suatu daerah.

Dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kota Serang disusun arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.3

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi/Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Kota Serang 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, transformasi ekonomi menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan transformasi ekonomi.

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama transformasi ekonomi Kota Serang diarahkan pada **“Penguatan riset inovasi dan pengembangan industri kreatif”**. Tahap pertama ini merupakan tahapan penguatan transformasi ekonomi di Kota Serang. Arah kebijakan ini mengacu pada seluruh upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi terutama terkait sektor perdagangan dan jasa kreatif. Riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja memiliki koneksi langsung dengan upaya peningkatan ekonomi di Kota Serang. Riset yang dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi akan meningkatkan keragaman strategi pembangunan ekonomi daerah. Selain itu,

kerangka pemikiran yang dikembangkan dari riset inovasi akan memberikan pilihan yang lebih banyak bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja terkait metodologi.

Dengan meningkatkan kualitas riset inovasi dan pengembangan industri kreatif, Kota Serang akan lebih menyoroti suatu transformasi ekonomi yang berlandaskan sumber daya manusia. Inisiasi ini akan dapat diterapkan beriringan dengan upaya-upaya yang disebut *bridging economic* sebagai bentuk pelaksanaan ekonomi yang inklusif. Secara efektif, riset untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga akan membawa Kota Serang menuju penentuan sektor-sektor unggulan yang sudah ada maupun sektor-sektor yang baru.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua transformasi ekonomi Kota Serang diarahkan pada **“Peningkatan produktivitas industri kreatif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”**. Tahap kedua ini merupakan tahapan akselerasi transformasi ekonomi di Kota Serang. Tahap ini juga akan berfokus pada meningkatkan produktivitas secara masif bisa dimulai dari pelaksanaan program-program yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu perluasan sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan mengembangkan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi, infrastruktur energi, dan prasarana komunikasi. Upaya ini akan menciptakan dorongan yang signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal di Kota Serang. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan tenaga kerja harus dilakukan untuk menunjang terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif. Peningkatan produktivitas industri kreatif dapat ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses ekonomi, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang partisipatif.

Beberapa model program, seperti pemberian kredit mikro untuk usaha kecil terutama industri kreatif, pelaksanaan pelatihan keterampilan, dan berbagai program informal yang turut ditingkatkan berdasarkan kebutuhan ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Peningkatan produktivitas yang menyeluruh mengindikasikan bahwa perluasan sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada hal-hal berbasis kuantitatif, namun juga yang bersifat kualitatif. Oleh sebab itu, kebijakan sangat perlu untuk mengarahkan transformasi ekonomi yang berbasis pada potensi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat di Kota Serang.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2040)

Pada tahap ketiga transformasi ekonomi Kota Serang diarahkan pada **“Pemantapan ekonomi kreatif melalui jaringan rantai global dan ekspor”**. Tahap ketiga ini merupakan bentuk tahapan transformasi ekonomi untuk pemantapan transformasi pada sektor ekonomi unggulan di Kota Serang. Penguatan ekonomi yang melibatkan jaringan rantai global dan lokal dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan ekspansi ekonomi. Sebagai indikator efektivitas dari upaya penguatan ekonomi ini dapat dilihat pada progres pertumbuhan riil PDRB. Selain itu, progres penguatan ekonomi juga dapat dilihat dari peningkatan produksi yang berkorelasi dengan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya di Kota Serang.

Kota Serang perlu untuk melakukan internalisasi perspektif yang didasarkan kepada kebutuhan pengembangan ekonomi daerah. Pemberian insentif dan dukungan produktif lainnya kepada UMKM terutama sektor-sektor baru dan berkembang adalah upaya strategis yang perlu dipertimbangkan. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi yang telah terbukti performanya pada tahap sebelumnya, harus diberikan apresiasi berupa dukungan pengembangan untuk mencapai tingkat lebih global.

Arah pengembangan jaringan rantai global tidak mengharuskan pemerintah daerah melakukan transformasi bersifat internasional. Dukungan sarana digital dapat digunakan sebagai pengungkit alternatif dalam menciptakan lingkungan industri yang kondusif. Perkembangan menuju pemastian terjadinya inklusivitas ekonomi di Kota Serang tetap harus dijadikan sebagai barometer utama, seiring dengan perhatian pada aspek keberlanjutan. Pemerintah Kota Serang akan memastikan bahwa seluruh upaya penguatan jaringan ekonomi yang tangguh dan tidak rentan terhadap guncangan. Oleh karena itu, pada tahap ini seluruh aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan telah berada dalam kerangka yang tepat.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat transformasi ekonomi Kota Serang diarahkan pada **“Kota Serang berpendapatan tinggi”**. Tahapan keempat pada transformasi ekonomi ini mendorong perwujudan visi Kota Serang pada tahun 2045. Arah kebijakan ini mengindikasikan pencapaian yang bersifat sistemis dalam seluruh aktivitas ekonomi di Kota Serang. Kerangka pikir dari pencapaian transformasi ekonomi akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terlihat dari pendapat masyarakat yang tinggi.

Perwujudan Kota Serang yang berpendapatan tinggi juga menunjukkan adanya target pemerataan pendapatan di seluruh lapis masyarakat. Linieritas pendapatan masyarakat juga harus ditunjukkan dengan berkurangnya angka kemiskinan secara signifikan, mudahnya akses pendidikan, idealnya akses kesehatan, dan efektifnya sumber-sumber pendapatan daerah. Seluruh mode aktivitas ekonomi dengan demikian perlu untuk dikuatkan, baik yang masih menggunakan pendekatan tradisional maupun yang telah menggunakan pengembangan berbasis IT.

Pendapatan masyarakat yang tinggi juga perlu dipastikan dengan adanya transformasi paradigma perekonomian di Kota Serang. Pemerintahan Kota Serang juga perlu melakukan penyeimbangan antara tendensi eksploitatif dengan ide keberlanjutan. Pendapatan masyarakat yang tinggi adalah suatu kondisi yang harus dicapai dan juga harus dipertahankan. Dengan demikian, perwujudan ekonomi yang sirkular di Kota Serang juga harus dilaksanakan secara matang.

Untuk mewujudkan misi kedua RPJPD Kota Serang pada setiap tahap dapat diterjemahkan dan difokuskan dalam arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

Tabel V.2
Arah Kebijakan Transformasi Misi Kedua RPJPD Kota Serang
Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	• Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah. • Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis • Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian	• Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah • Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Serang. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik melalui peningkatan akses ke kemitraan usaha. • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital	• Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Serang. • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan; • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), dan penerapan teknologi. • Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama	• Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, • Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. • Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian dan perikanan. • City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata

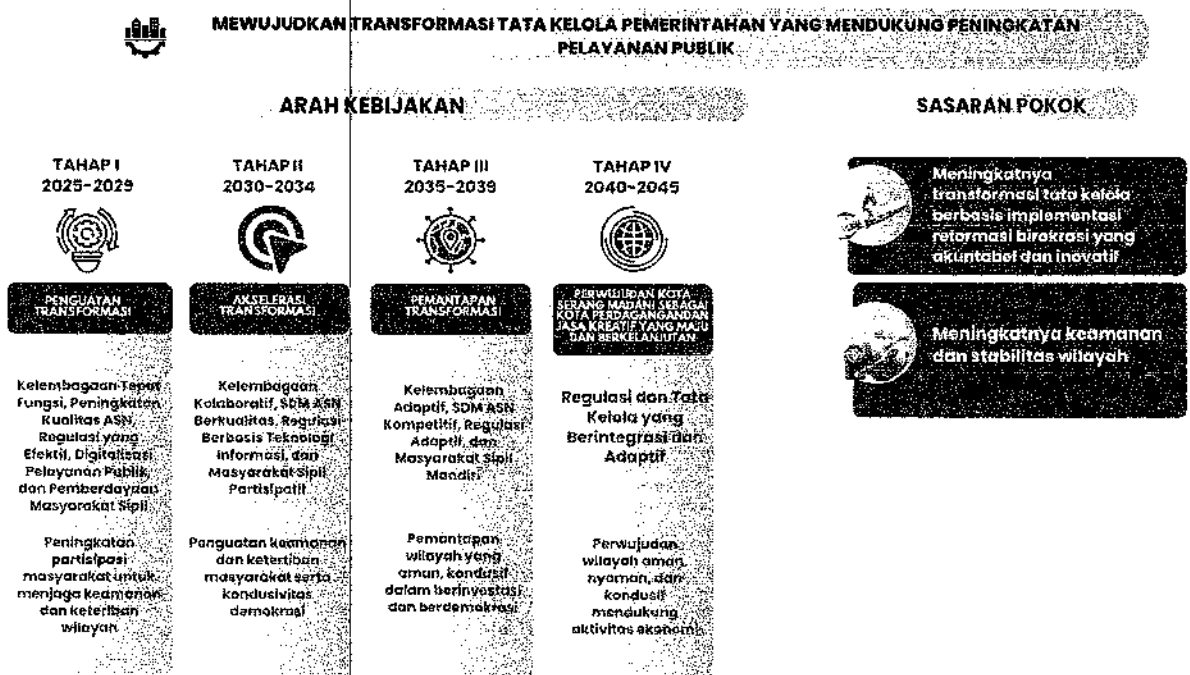
MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
	dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan • Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. • Pengembangan industri pariwisata yang atraktif, berkualitas, berkelanjutan melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha serta pengembangan kegiatan <i>Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition</i>.	disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Peningkatan produktivitas BUMD • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan. • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. • Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan • Pengembangan pariwisata yang atraktif, berkualitas, berkelanjutan melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha serta pengembangan kegiatan <i>Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition</i>.	regional maupun kerja sama internasional lainnya. • Peningkatan produktivitas BUMD. • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; • City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan (urban tourism). • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. • Pengembangan pariwisata yang atraktif, berkualitas, berkelanjutan melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha serta pengembangan kegiatan <i>Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition</i>.	perkotaan (urban tourism). • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital. • Pengembangan pariwisata yang atraktif, berkualitas, berkelanjutan melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha serta pengembangan kegiatan <i>Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition</i>.
	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; • Penguatan pengendalian inflasi daerah. • Pembentukan Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas- asas good governance	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; • Penguatan pengendalian inflasi daerah. • Pembentukan Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas- asas good governance	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; • Penguatan pengendalian inflasi daerah • Pembentukan Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas- asas good governance	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; • Penguatan pengendalian inflasi daerah • Pembentukan Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas- asas good governance

5.1.3 Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif memungkinkan adanya pengelolaan sektor pemerintahan dan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang lebih terbuka dan transparan. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pelayanan terhadap publik yang lebih optimal dan munculnya regulasi yang adaptif.

Dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Kota Serang, disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.4
Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Tata Kelola Kota Serang 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, transformasi tata kelola akan menjadi acuan utama dan sekaligus mencakup transformasi pemerintahan di Kota Serang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan tata kelola.

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kota Serang diarahkan pada **“Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil”** dan **“Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah”**.

Tahap pertama ini merupakan tahapan pembuatan dasar transformasi tata kelola yang dikuatkan di Kota Serang. Pelaksanaan tahap pertama ini dengan mengidentifikasi serta menangani secara langsung berbagai persoalan mendasar yang ada dalam tata kelola pemerintahan di Kota Serang. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbaiki proses-proses administratif yang tidak efisien, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan memperpendek jalur birokrasi.

Selain itu, pada tahap ini akan dilaksanakan peningkatan kualitas ASN yang mencakup program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai negeri, serta promosi nilai-nilai etika dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka. ASN yang berkualitas di pemerintah Kota Serang akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Memerhatikan upaya-upaya ini, partisipasi masyarakat dalam penciptaan ruang publik yang lebih sehat sangat perlu untuk ditingkatkan. Khususnya dalam pengelolaan anggaran pemerintahan yang memang semestinya direncanakan dan dikelola secara efektif. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif juga perlu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Keterlibatan masyarakat akan menciptakan jaringan pengawasan yang lebih berfungsi dan sekaligus memperkuat legitimasi serta akuntabilitas pemerintah Kota Serang.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kota Serang diarahkan pada **“Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil partisipatif”** dan **“Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusivitas wilayah”**. Tahap ini menggambarkan fase akselerasi dalam proses transformasi tata kelola di Kota Serang, di mana langkah-langkah strategis akan diambil untuk memperkuat fondasi yang telah dibangun sebelumnya.

Pada tahap kedua ini, penting untuk menciptakan kerja sama antara berbagai lembaga dan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kerja sama kelembagaan yang kolaboratif akan memungkinkan terjadinya kolaborasi berbagai sektor dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan Kota Serang. Selain itu, pengembangan SDM ASN yang berkualitas mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif, dan pembangunan kapasitas ASN. Seluruh rangkaian upaya ini berfungsi untuk

menghadapi tantangan dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.

Selanjutnya, penyusunan dan pemberlakuan regulasi berbasis teknologi informatif menjadi bagian integral dari pembangunan jangka panjang tahap kedua ini. Penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk menyusun, mengimplementasikan, dan memantau regulasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan Kota Serang. Untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan yang dibuat, kondisi daerah yang aman dan tertib harus dapat dipenuhi. Secara politis, suhu demokrasi yang kondusif akan menunjang kestabilan aktivitas perekonomian Kota Serang. Dengan adanya pembenahan dan percepatan ini, maka keterlibatan semua pihak juga akan menjadi jaminan terjadinya percepatan transformasi tata kelola, terutama untuk mencapai kondisi yang tertib, aman, dan kondusif untuk melaksanakan kegiatan sosial pemerintahan.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2040)

Pada tahap ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kota Serang diarahkan pada **“Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri.”** dan **“Pemantapan wilayah yang aman, kondusif dalam berinvestasi dan berdemokrasi”**. Tahap ketiga ini merupakan tahap transformasi tata kelola dalam rangka mendukung ekspansi industri unggulan di Kota Serang, dan juga menekankan pada kemandirian masyarakat sipil.

Kepentingan pemerintah Kota Serang dalam tahap ketiga ini mencakup penciptaan kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan zaman. Kelembagaan adaptif akan memungkinkan pemerintah Kota Serang untuk menghadapi tantangan yang kompleks dengan respons yang efektif dan efisien. Pengembangan SDM ASN yang kompetitif juga perlu dijadikan sebagai prioritas utama dalam tahap ini dengan cakupan peningkatan kapasitas dan keterampilan ASN dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks. Diharapkan dari upaya-upaya ini ASN dapat menjadi motor penggerak bagi perubahan dan inovasi dalam pemerintahan di Kota Serang.

Selanjutnya, adanya regulasi yang adaptif juga harus dikembangkan oleh pemerintah Kota Serang dengan ketepatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu mengakomodasi perubahan dan memfasilitasi pertumbuhan industri unggulan. Seluruh rangkaian upaya untuk menguatkan

transformasi tata Kelola ini harus mengarah kepada target pemantapan wilayah yang aman, kondusif dalam berinvestasi dan ramah untuk melaksanakan demokrasi.

Seluruh langkah yang termaktub dalam arah kebijakan tahap ketiga dalam transformasi tata kelola ini akan berujung pada pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri. Masyarakat sipil yang mandiri akan mampu berperan aktif dalam pembangunan Kota Serang, baik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun melalui inisiatif dan program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kota Serang diarahkan pada **“Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif”** dan **“Perwujudan wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif mendukung aktivitas ekonomi”**. Tahap keempat transformasi tata kelola ini menjadi bagian integral dari transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung visi Kota Serang pada tahun 2045.

Pemerintah Kota Serang dalam tahap keempat ini harus melakukan upaya integratif pada regulasi dan tata kelola untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan dan prosedur pemerintah telah saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Upaya-upaya ini akan berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Serang juga harus memastikan bahwa regulasi dan tata kelola pemerintahan yang ada telah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dengan dinamika yang terus berubah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, dan sosial, maka regulasi dan tata kelola yang adaptif akan memungkinkan Kota Serang untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul.

Fungsi utama yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Serang dalam arah kebijakan pada tahap keempat ini adalah fungsi koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengembangan regulasi serta tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Kolaborasi ini seharusnya akan dapat memastikan bahwa seluruh kepentingan dipertimbangkan secara adil dan menyeluruh, sehingga menciptakan kesepakatan yang lebih kuat dan implementasi yang lebih efektif.

Dengan demikian, tahap keempat ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan transformasi tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan sebelumnya dan membawa Kota Serang menuju visi yang tercapai dan berkelanjutan pada tahun 2045. Dengan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif, Kota Serang diharapkan dapat mencapai tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakatnya. Selanjutnya di akhir tahap pembangunan Kota Serang diharapkan transformasi tata kelola menghasilkan perwujudan masyarakat yang aman, demokratis, dan kondusif dengan tatanan yang jelas dan berdasarkan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan misi ketiga RPJPD Kota Serang pada setiap tahap dapat diterjemahkan dan difokuskan dalam arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

Tabel V.3

Arah Kebijakan Transformasi Misi 3 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik	• Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi; • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	• Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah; • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat; • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi; • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;	• Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat; • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi; • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	• Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat; • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi; • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFROMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
		• Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.		
	• Penguatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan serta pemenuhan HAM.	• Penguatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan serta pemenuhan HAM.	• Penguatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan serta pemenuhan HAM.	• Penguatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan serta pemenuhan HAM.

5.1.4 Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial dan budaya merupakan hal yang penting dalam memajukan suatu wilayah. Ketahanan Sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu wilayah yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatannya dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan dengan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ketahanan budaya merupakan upaya penyesuaian diri terhadap situasi-situasi luaran tanpa banyak merusak kebudayaan yang telah menjadi tatanan kehidupannya. Dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya Kota Serang disusun arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.5
Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kota Serang 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, misi keempat ini menjadi acuan utama dan sekaligus mencakup ketahanan sosial budaya dan ekologi selama 20 (dua puluh) tahun. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5

tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kota Serang.

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Kota Serang diarahkan pada **“Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan”**. Arah kebijakan dalam tahap ini mencakup pada beberapa aspek sosial budaya yang penting seperti pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta adat istiadat. Pengakuan ini menjadi pilar utama paradigmatis di Kota Serang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat serta menjaga harmoni sosial. Upaya ini tidak hanya tentang mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam proses pembangunan.

Selain itu, dalam konteks penguatan ketahanan sosial budaya, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, terpenuhi dengan baik. Ini dilakukan melalui berbagai program pengasuhan, perawatan, dan pembentukan resiliensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Serang akan menyusun dan melaksanakan program-program yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Dengan memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan pembangunan, Kota Serang memastikan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya, tetapi juga membawa Kota Serang menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Kota Serang diarahkan pada **“Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif”**. Tahap kedua pada arah kebijakan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah upaya akselerasi perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan pusat budaya sebagai destinasi wisata yang di dalamnya melibatkan partisipasi seluruh pihak. Dalam kerangka ini,

pembangunan Kota Serang ditujukan untuk memperkuat identitas budaya dan memperluas dampak positifnya terhadap ekonomi lokal.

Pengembangan pusat budaya sebagai destinasi wisata bukan hanya sekadar mempertahankan warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pariwisata budaya. Melalui upaya ini, Kota Serang dapat mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai salah satu daya tarik utama bagi wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, dalam konteks pemantapan ketahanan sosial budaya, upaya lebih lanjut juga diperlukan untuk memperkuat jaringan sosial melalui edukasi formal dan informal. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi dapat dijadikan sebagai pendorong utama pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Dengan melaksanakan upaya-upaya ini, Kota Serang diharapkan mampu memperkuat fondasi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemantapan ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan setempat, serta mengukuhkan posisi Kota Serang sebagai destinasi yang menarik bagi investasi dan pariwisata di tingkat nasional maupun internasional.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2040)

Pada tahap ketiga dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Kota Serang diarahkan pada **“Pemantapan ketangguhan manusia, masyarakat, alam dan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan”** Arah kebijakan pada tahap III ini berkaitan dengan penguatan transformasi yang akan dilakukan yaitu melalui upaya-upaya untuk mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat yang terintegrasi dengan lingkungan. Tahap ini merupakan tahap pendahuluan dan menjadi landasan yang krusial karena mengandung makna pemastian kondisi ketangguhan yang telah ada di tengah masyarakat Kota Serang.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahap ketiga ini akan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Serang telah memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Transformasi ini juga mencakup pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara manusia dan lingkungan serta perlunya menjaga keseimbangan ekologi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Selain itu, ketangguhan masyarakat yang dimaksud pada tahap ini melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Tahap pembangunan jangka panjang tahap ketiga ini merupakan titik balik penting dalam perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Serang.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Kota Serang diarahkan pada **“Mewujudkan masyarakat Serang yang beradab dan berbudaya.”** Pada tahap pembangunan ini, kebijakan diarahkan untuk memastikan pembentukan karakter masyarakat Kota Serang yang memiliki nilai-nilai keadaban yang tinggi, menjunjung tinggi etika, kesopanan, dan keterampilan sosial yang baik. Hal ini menjadi standar yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkembang secara berkelanjutan.

Kondisi ini adalah perwujudan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan karakter, pembangunan kesadaran akan pentingnya etika dalam berinteraksi, hingga partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu, pembangunan masyarakat yang beradab juga mencakup upaya untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya keberagaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap individu merasa diakui dan dihargai, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor swasta, tahap keempat ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan nilai-nilai keadaban dalam masyarakat Kota Serang. Dengan demikian, Kota Serang tidak hanya menjadi tempat wilayah yang dapat ditinggali secara nyaman, tetapi juga menjadi ruang pengembangan pribadi dan sosial yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi keempat RPJPD Kota Serang pada setiap tahap dapat diterjemahkan dan difokuskan dalam arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

Tabel V.4

Arah Kebijakan Transformasi Misi 4 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Mewujudkan Ketahanan Sosial	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi

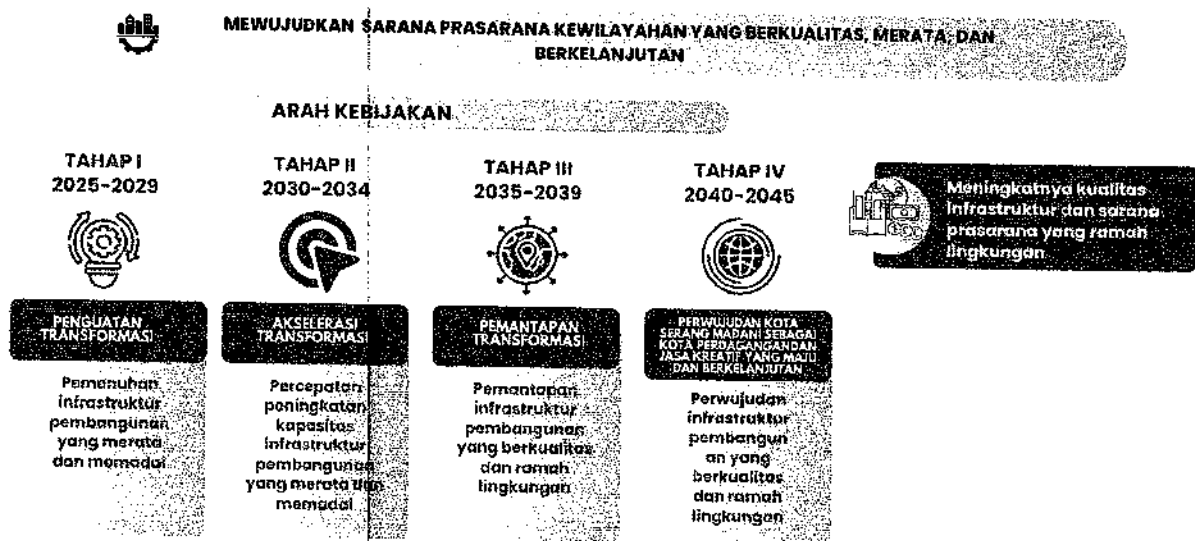
MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Budaya dan Ekologi	masyarakat, dengan berdasarkan Pancasila • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; • Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy; • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; • Efisiensi rantai pasok pangan, termasuk penyimpanan yang efisien, pengolahan, dan distribusi pangan; • Peningkatan efisiensi energi di tingkat rumah tangga, sekolah, dan industri kecil.	masyarakat, dengan berdasarkan Pancasila; • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; • Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan; • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; • Peningkatan efisiensi energi di tingkat rumah tangga, sekolah, dan industri kecil; • Efisiensi rantai pasokan pangan, termasuk penyimpanan yang efisien, pengolahan, dan distribusi pangan.	masyarakat, dengan berdasarkan Pancasila; • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis; • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami; • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan; • Efisiensi rantai pasokan pangan, termasuk penyimpanan yang efisien, pengolahan, dan distribusi pangan; • Peningkatan efisiensi energi di tingkat rumah tangga, sekolah, dan industri kecil.	kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan Pancasila; • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis; • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami; • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan; • Efisiensi rantai pasokan pangan, termasuk penyimpanan yang efisien, pengolahan, dan distribusi pangan; • Peningkatan efisiensi energi di tingkat rumah tangga, sekolah, dan industri kecil.

5.1.5 Misi Kelima: Sarana dan Prasarana kewilayahan yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan

Sarana dan prasarana yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkesinambungan pembangunan adalah sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan bagi umum dan sekaligus menekan ketimpangan yang terjadi di Kota Serang. Transformasi ini akan diarahkan kepada perwujudan infrastruktur publik yang memiliki kualitas terbaik. Langkah ini juga akan diarahkan kepada pencapaian pembangunan fisik yang tetap mengedepankan semangat daur

ulang di Kota Serang. Pelaksanaan transformasi di bidang sarana dan prasarana, akan difokuskan kepada kepuasan masyarakat yang menandakan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang. Sehingga dapat mewujudkan transformasi sarana dan prasarana di Kota Serang disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.6
Arah Kebijakan berdasarkan Misi Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan di Kota Serang 2025-2045



Gambar di atas menunjukkan usaha untuk melaksanakan transformasi sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan selama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan arah kebijakan dan indikator pada masing-masingnya. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan Kota Serang diarahkan pada **"Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai"**. Upaya pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata dan dapat diakses dengan merata ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kota Serang. Proses pemenuhan ini mencakup para inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan transformasi yang lain.

Infrastruktur pembangunan yang memadai dapat diartikan sebagai infrastruktur yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai mencakup peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, terutama di sektor perumahan, permukiman, dan pendukung kawasan industri. Selain itu, berdasarkan

kebutuhan primer daerah, infrastruktur publik dasar yang perlu juga diperhatikan pemenuhannya seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, jalan, irigasi, air minum, persampahan, energi, dan komunikasi.

Tahap pertama pembangunan jangka panjang Kota Serang ini dicanangkan untuk memerhatikan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala urgensi dan kedaruratan. Pertimbangan terhadap sarana prioritas juga harus diberikan berdasarkan kepada aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pemerintah daerah.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua transformasi sosial Kota Serang diarahkan pada **“Percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur dan melengkapi apa yang telah dicanangkan pada tahap pertama. Asumsi dari kebijakan ini diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kesamaan hak untuk menikmati sarana publik dan juga ramah terhadap lingkungan hidup.

Upaya untuk menyeimbangkan seluruh kepentingan adalah salah satu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Kota Serang dalam mempercepat peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai. Basis penetapan upaya yang akan dilaksanakan adalah evaluasi atas pelaksanaan pembangunan pada tahap pertama. Tahap kedua ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa seluruh lapisan masyarakat telah dapat merasakan manfaat infrastruktur pembangunan. Dengan demikian, pada tahap kedua ini kapasitas dari infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan kualitas, pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2040)

Pada tahap ketiga transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan Kota Serang diarahkan pada **“Pemantapan infrastruktur pembangunan yang berkualitas, merata dan ramah lingkungan”**. Tahap ini merupakan tahap penguatan pada transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan melalui pemantapan sarana-prasarana yang telah berhasil diadakan pada tahap pertama dan kedua serta memastikan adanya pengembangan kepada lingkungan hidup.

Tahap ini tidak hanya berfokus pada pemantapan aspek teknis pembangunan pada segi kualitasnya, akan tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan standar kelayakan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini secara sosial juga akan membuktikan keseriusan Kota Serang dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam. Seluruh *stakeholders* akan dilibatkan secara intens dalam upaya pemantapan ini. Penyeimbangan antara kebutuhan infrastruktur yang pada satu sisi akan berdampak pada kualitas alam, dengan konservasi lingkungan hidup di sisi lain yang menahan laju eksploitasi adalah langkah yang sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan di Kota Serang pada tahun 2045.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan Kota Serang diarahkan pada **“Perwujudan infrastruktur pembangunan yang berkualitas, merata dan ramah lingkungan”**. Tahap ini merupakan tahapan akhir dari transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Serang pada tahun 2045. Oleh karena itu, tahapan ini memastikan terwujudnya rangkaian perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang. Kebijakan-kebijakan yang ditentukan pada tahap akhir pembangunan jangka Panjang Kota Serang ini akan diarahkan pada aspek kebersinambungan pembangunan sebagai penyokong utama keberlanjutan pembangunan Kota Serang selanjutnya. Pada tahap ini, pemerintah Kota Serang harus dapat memastikan bahwa seluruh infrastruktur telah memenuhi standar dengan kualitas tinggi.

Untuk mewujudkan misi kelima RPJPD Kota Serang pada setiap tahap dapat diterjemahkan dan difokuskan dalam arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

Tabel V.5

Arah Kebijakan Transformasi Misi 5 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	• Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Serang.	• Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-	• Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama	• Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama

MISI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Kota Serang Madani Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan
	• Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan kelengkapannya • Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi. • Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjang olahraga sebagai kawasan rekreasi, fasilitas mendukung berbagai kegiatan nasional, internasional, maupun bisnis • Pengembangan optimalisasi kawasan infrastruktur permukiman yang inklusif, dan berkelanjutan	area weak coverage di kawasan perkotaan. • Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Serang. • Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan kelengkapannya • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi. • Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjang olahraga sebagai kawasan rekreasi, fasilitas mendukung berbagai kegiatan nasional, internasional, maupun bisnis.	pada metropolitan Serang. • Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Rangkasbitung Merak. • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi. • Pengembangan Kawasan pendukung pembangunan Pendidikan, digitalisasi, dan Kesehatan. • Dukungan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai pusat pemerintahan provinsi yang inklusif. • Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjang olahraga sebagai kawasan rekreasi, fasilitas mendukung berbagai kegiatan nasional, internasional, maupun bisnis.	pada metropolitan Serang. • Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi. • Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjang olahraga sebagai kawasan rekreasi, fasilitas mendukung berbagai kegiatan nasional, internasional, maupun bisnis.

5.2. Sasaran Pokok Kota Serang 2025-2045

Sasaran pokok disusun untuk menggambarkan pencapaian misi pada akhir masa pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dari arah kebijakan memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai dalam empat periode per lima tahunan. Sasaran pokok dirumuskan berdasarkan kondisi awal pada tahun penyusunan dokumen jangka panjang dan menggambarkan target-target pada setiap akhir periode lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Serang dijabarkan berikut ini.

5.2.1 Sasaran Pokok Misi Kesatu Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial)

Untuk dapat mewujudkan terjadinya transformasi sosial, Kota Serang akan berfokus untuk mewujudkan percepatan perubahan struktur sosial di tengah masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi-strategi terkait perubahan sosial akan menjadi pertanda bahwa rencana pembangunan jangka panjang Kota Serang terlaksana dengan baik.

Secara umum sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun akhir pembangunan jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah terkait derajat kesehatan masyarakat, kualitas penyelenggaraan pendidikan, turunnya angka kemiskinan, dan lingkungan sosial yang sehat. Berikut ini adalah gambaran kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Serang pada transformasi sosial melalui beberapa sasaran pokok.

A. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berbasis kualitas layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan

Kondisi kesehatan masyarakat selalu berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup yang juga sehat. Kota Serang harus diarahkan untuk memberikan dasar-dasar regulasi dan juga kebijakan yang memprioritaskan terjadinya peningkatan kesehatan masyarakat. Pada akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Serang, diharapkan umur atau angka harapan hidup masyarakat semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat dari waktu kelahirannya. Dengan adanya sasaran kunci ini, maka kualitas pelayanan masyarakat dan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan sangat perlu ditingkatkan. Begitu pula terkait dengan kualitas lingkungan sehat, hal-hal pokok seperti sanitasi dan kualitas air minum serta pangan sehat adalah kondisi yang tidak bisa diabaikan.

B. Meningkatnya Kualitas dan Derajat Pendidikan Masyarakat yang Berdaya Saing Global

Kemudahan dalam mengakses pendidikan adalah salah satu langkah paling dasar dalam menyukseskan transformasi sosial di Kota Serang. Partisipasi masyarakat dalam setiap jenjang pendidikan akan memperlihatkan kualitas angkatan kerja yang dipersiapkan oleh Kota Serang. Sasaran pokok untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam mengikuti pendidikan di semua jenjang perlu dicapai dengan penyesuaian kerangka regulasi yang efektif. Keikutsertaan seluruh masyarakat dalam menyukseskan pendidikan di Kota Serang akan menunjukkan potensi produktivitas yang dapat diberikan. Meningkatnya kualitas dan derajat pendidikan masyarakat juga harus

disejajarkan dengan kepentingan dan kebutuhan pangsa global. Hal ini dapat dioptimalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi siber.

C. Menurunnya tingkat kemiskinan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat

Kesejahteraan adalah kondisi di mana seluruh hal yang dipandang layak dan sesuai dengan standar kemartabatan manusia dapat dipenuhi. Menjadi sejahtera dengan demikian adalah tujuan yang sesuai dengan kondisi eksistensi manusia. Dalam skema sosial, perencanaan pembangunan menjadi jalan untuk menciptakan kesejahteraan bersama di suatu daerah. Kota Serang sebagai suatu wilayah administratif yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kebangsaan harus memerhatikan dan ikut terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pokok terkait dengan pencapaian kesejahteraan harus dicapai dengan menggunakan seluruh potensi yang ada di Kota Serang.

5.2.2 Sasaran Pokok Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi)

Transformasi Ekonomi menjadi poin kunci dalam perencanaan jangka panjang daerah Kota Serang. Transformasi ekonomi juga mengindikasikan fokus strategis daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke arah yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan setiap langkah yang dibutuhkan, transformasi ekonomi harus mencerminkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga pembangunan ekonomi yang inklusif agar dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi. Pendekatan kreatif dalam transformasi ekonomi menonjolkan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan, memastikan keberlanjutan sektor ekonomi. Dengan demikian, landasan strategis yang menggambarkan visi pemerintah daerah Kota Serang untuk menciptakan ekonomi yang tidak hanya produktif dan berdaya saing namun juga berkelanjutan.

Agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif, berikut adalah ulasan dari masing-masing sasaran pokok sesuai dengan strategi transformasi ekonomi yang digunakan.

A. Meningkatnya Pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi ekonomi, dan penurunan pengangguran

Pertambahan jumlah penduduk di sebuah daerah akan mempengaruhi kualitas pembangunan ekonomi yang tercermin dari kualitas pendapatan masyarakat. Untuk menyikapi situasi ini, Kota Serang akan melakukan pengembangan terhadap sektor ekonomi kreatif melalui fasilitas digital dan

pendekatan TIK. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan adanya pengembangan teknologi dan inovasi untuk mendorong produktivitas ekonomi. Selain itu, Kota Serang juga dapat menggunakan dan menerapkan ekonomi alternatif, sehingga semangat berkelanjutan juga didapatkan.

B. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi secara progresif menuju pangsa ekonomi internasional

Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi secara progresif merupakan fondasi utama dalam membawa suatu daerah atau negara menuju pangsa ekonomi internasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, daya saing ekonomi menjadi faktor kunci dalam menentukan posisi suatu daerah di kancah internasional. Pembangunan ekonomi yang progresif mencakup inovasi dalam sektor industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta adopsi teknologi canggih yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui upaya ini, Serang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memperluas pangsa pasarnya hingga ke tingkat global dengan ketersediaan produk dan jasa yang kompetitif. Untuk mencapai ini, diperlukan strategi pembangunan yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

5.2.3 Sasaran Pokok Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik (Transformasi Tata Kelola)

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Tata kelola menjadi sektor yang harus dimanajemen secara efektif, efisien, dan transparan sehingga akuntabilitas pemerintahan tercapai. Kota Serang mengupayakan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan terhadap masyarakat dengan regulasi yang adaptif dan birokrasi yang bersih. Kota Serang menggambarkan tercapainya transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif, berikut adalah ulasan dari masing-masing sasaran pokok sesuai dengan strategi transformasi yang digunakan.

A. Meningkatnya transformasi tata kelola berbasis implementasi reformasi birokrasi yang akuntabel dan inovatif

Tata pemerintahan yang baik dan bersih mencakup semua elemen yang terkait dengan pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan yang dipegang oleh

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik melalui lembaga formal maupun informal. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Serang, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan akuntabilitas dan pengembangan yang inovatif serta efisien. Hal ini diwujudkan melalui tindakan dan regulasi yang independen dan adil, serta menjamin terjadinya interaksi antara para pemangku kepentingan secara transparan, profesional, dan akuntabel, serta inovatif.

B. Meningkatnya keamanan dan stabilitas wilayah

Terciptanya keamanan dan stabilitas wilayah adalah salah satu sasaran yang harus dicapai oleh setiap daerah. Kondisi yang aman dan stabil akan menjadi standar kondusivitas suatu daerah, Kondisi yang aman akan menunjukkan juga kualitas tata kelola pemerintahan dalam melakukan intervensi kepada masyarakatnya. Intervensi yang produktif diharapkan mampu memberikan kondisi yang terstruktur dan terbangun secara sistemis.

5.2.4 Sasaran Pokok Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi menunjukkan kemampuan suatu kebudayaan daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dengan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditempati oleh manusia. Secara linier, kondisi ketahanan sosial yang baik dan kondisi ekologi yang mapan akan meningkatkan kualitas mitigasi bencana alam berbasis lokalitas di Kota Serang.

A. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang mengimplementasikan kearifan budaya lokal dan akhlakul karimah

Kebudayaan adalah identitas yang khas bagi suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Serang sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Banten, memiliki ragam budaya lokal yang unik dan spesifik. Untuk mencapai peningkatan pembinaan untuk warisan kebudayaan, diperlukan segala upaya yang didasarkan kepada terwujudnya ketahanan budaya. Alur pikir ini pada akhirnya akan menginisiasi kontribusi budaya di Kota Serang terhadap pembentukan peradaban nasional di tengah dinamika perkembangan budaya global. Dengan demikian pembinaan yang akan dilakukan perlu memerhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Kota

Serang. Dengan proses ini juga, kualitas masyarakat yang mencerminkan budaya dan akhlakul karimah dapat tercapai.

B. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Lingkungan hidup dipandang dari sisi sosial akan berkaitan dengan kualitas interaksi antar sesama. Beberapa sifat dasar yang berhubungan ini adalah sikap toleransi, kesetaraan dan kerja sama umat beragama dalam bermasyarakat. Dalam standar Indonesia, standar ini termasuk ke dalam upaya menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama yang saat ini menjadi rujukan utama. Sehatnya interaksi sosial di tengah masyarakat akan memberikan kontribusi positif, terutama sebagai strategi memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu yang akan dijadikan sebagai target atau sasaran adalah pengarusutamaan gender dan mengintegrasikan semangatnya ke dalam pembangunan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan dan salah penyusunan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang termarginalkan.

C. Optimalnya pengelolaan lingkungan dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup secara ekologis tidak akan dapat dimaksimalkan tanpa ada campur tangan manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat bergantung pada keinginan masyarakat secara umum dan pengambil kebijakan secara khusus. Dalam lingkup pelaksanaannya, seluruh proses yang dibutuhkan dapat diterjemahkan sebagai bagian dari *political will* masyarakat di suatu wilayah. Kota Serang memiliki beberapa persoalan yang dapat dilihat sebagai standar telah optimal atau belumnya pengelolaan lingkungan, yaitu dalam persoalan sampah.

Dalam menentukan kualitas lingkungan hidup, dilakukan asesmen terhadap kualitas-kualitas lingkungan secara parsial sebelumnya. Secara teknis, kualitas air tanah, udara, dan tutupan lahan menjadi komponen pembentuk indeks kualitas hidup di Kota Serang.

D. Meningkatnya kualitas mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, masyarakat, dan TIK

Bencana merupakan tantangan dan hambatan potensial di dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bagi Kota Serang, bencana yang perlu diperhatikan adalah banjir. Internalisasi pemikiran lokal ke dalam penyusunan dan penyesuaian dengan sistem mitigasi bencana akan menciptakan suatu sudut pandang kolaboratif yang lebih kaya. Kaitannya adalah dengan

keterlibatan masyarakat sehingga proses peningkatan kapasitas diri dapat juga dilaksanakan.

5.2.5 Sasaran Pokok Misi Kelima: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan

Sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan berkorelasi aktif dengan kemajuan wilayah, naiknya pendapatan, dan terpenuhinya standar kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan secara umum dan optimasi upaya internalisasi keberlanjutan dalam seluruh pilar pembangunan.

A. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik yang Ramah Lingkungan

Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana publik yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Serang. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan semakin mendesak. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan mencakup penggunaan material dan teknologi yang efisien energi, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penyediaan fasilitas transportasi publik yang dapat mengurangi emisi karbon. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, perlu upaya untuk menegaskan tujuan pada setiap proyek infrastruktur dalam aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, sistem drainase yang efektif untuk mencegah banjir, dan penyediaan fasilitas umum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum alur perencanaan sasaran pokok, indikator serta target per tahapan periodisasi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel V.6
Misi, Arah Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Kota Serang

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
Mewujudkan Tranformasi Sosial yang Berkeadilan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis kualitas	Kesehatan untuk Semua	1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,72	76,535	77,735	78,935	80,37
	layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan		2) Kesehatan Ibu dan Anak:					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	15	10	5	2
			b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,3	17,05	13,85	9,65	6,00
			3) Penanganan Tuberkulosis:					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	96,17	96,97	97,97	98,97	100
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95,09	96,09	97,34	98,59	100
			4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,62	98,796	99,02	99,24	100
			Meningkatkanya kualitas dan derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing global	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5) Hasil pembelajaran			
			a) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i. Literasi Membaca	36,14	43,24	52,12	61,00	71,66

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
			ii. Numerasi	37,81	42,95	49,37	55,79	63,50
			b) Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i. Literasi Membaca	53,74	57,03	61,44	66,19	72,38
			ii. Numerasi	60,33	64,03	68,98	74,31	81,26
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,99	9,59	10,34	11,10	12,00
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42	13,94	14,58	15,23	16,00
			6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	14,00	16,92	20,87	25,61	30,61
			7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,69	66,15	68,23	71,31	75,00
	Menurunnya tingkat kemiskinan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8) Tingkat Kemiskinan	5,55-6,17	4,75	3,35	1,96	0,54-0,04
			9) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	65,49	71,39	78,77	86,15	95
			10) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang	Meningkatnya Pengembangan ekonomi kreatif,	IPTEK, Inovasi dan	11) Rasio PDRB perdagangan dan Jasa	70	70,4	70,9	71,4	72
			12) Pengembangan Pariwisata					

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
Produktif dan Inklusif	digitalisasi ekonomi, dan penurunan pengangguran	Produktivitas Ekonom	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,99	6,29	6,67	7,05	8,40
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1,62	2,42	3,42	4,42	5,62
			c) wisatawan domestik (Ribu Orang)	8.490,59	8.530,59	8.580,59	8.630,59	8.690,59
			13) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	6,50	6,70	6,95	7,20	7,50
			14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a) i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	1,13	2,46	4,11	5,77	7,75
			a) ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah level kota (%)	5,33	6,26	7,43	8,60	10,00
			b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,68	1,27	1,60	2,00	3,95
			c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,10	0,32	0,60	0,87	1,20
			d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	10,84	13,92	17,52	22,60	28,21
			15) Tingkat Pengangguran Terbuka	6,43-7,00	6,55	6,34	6,14	5,00
			16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,04	51,03	53,63	56,37	59,83
			17) Indeks Inovasi Daerah	55,00	60,00	66,25	72,50	80,00
		Penerapan Ekonomi Hijau	18) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
			PDRB sektor pertanian	5,13	5,23	5,37	5,50	5,67
		Transformasi Digital	19) Indeks Masyarakat Digital	46,20	48,38	50,50	62,30	65,02
	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi secara progresif menuju pangsa ekonomi internasional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35-37	35,6	35,0	34,5	33,00-35,00
			21) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	81,00	81,30	81,70	82,10	82,60
		Stabilitas Ekonomi Makro	22) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,00-1,50	1,20	1,45	1,70	2,00
			23) Tingkat Inflasi (%)	2-3	2±1	2±1	2±1	2±1
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya transformasi tata kelola berbasis implementasi reformasi birokrasi yang akuntabel dan inovatif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24) Indeks Reformasi Hukum	61,00	66,40	76,90	87,40	95,00
			25) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	3,08	3,68	4,28	5,00
			26) Indeks Pelayanan Publik	3,70	3,96	4,28	4,61	5,00
			27) Indeks Integritas Nasional	71,83	74,99	78,94	82,89	87,63
	Meningkatnya keamanan dan stabilitas wilayah	Keamanan dan Ketertiban	28) a) Nilai Kota Peduli HAM	69,22	72,03	75,71	79,57	84,47
			28) b) Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkara yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi (%)	70,00	76,00	85,00	92,00	100,00
			29) Angka Kriminalitas	6,40	5,52	4,42	3,32	2,00
		Ketangguhan Daerah	30) Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Kota/ <i>Sister City</i> (Jumlah)	1	5	5	5	5
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang mengimplementasikan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	31) Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,56	52,05	52,82	53,55	54,36
			32) Indeks Kerukunan Umat Beragama	87,00	88,50	90,00	91,50	93,00

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	kearifan budaya lokal dan akhlakul karimah							
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	33) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,10	71,22	72,62	74,02	75,70
			34) 34) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,52	0,49	0,41	0,34	0,25
	Optimalnya pengelolaan lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	35) Kualitas Lingkungan Hidup					
			a) Indeks kualitas lingkungan hidup	64,53	65,38	66,44	67,50	68,77
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3,00	6,2	21,45	36,70	55,00
			c) Pengelolaan Sampah					
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,00	35,60	46,35	57,10	70,00
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	36) Ketahanan energi, air, dan pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			-Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	986,12	1026,16	1,078,51	1,133,52	1,203,25
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,10	1,95	1,77	1,59	1,05
			c) Ketahanan Air					
			- Air yang diproduksi (m3)	6.158.592	7.558.272	12.690.432	12.690.432	19.595.520

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Meningkatnya kualitas mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, masyarakat, dan TIK	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	6,00	9,00	13,00	25,00	52,00
			37) Indeks Risiko Bencana (IRB)	140,00	137,28	134,56	131,84	124,62-129,12
			38) Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
			b. Tahunan	6,39	12,55	18,71	28,47	31,03
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana publik yang ramah lingkungan	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
			a) Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	5,11	5,59	6,19	6,78	7,50
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88,03	89,73	91,89	94,11	96,89
			c) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	72,47	73,96	75,00	80,79	85,27

5.3 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Secara umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2025-2045 memuat seluruh aspek pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Meski demikian agar perencanaan menjadi lebih efektif dibutuhkan strategi khusus yang secara signifikan dapat mengubah atau memengaruhi arah, skala, dan capaian akhir dari perencanaan pembangunan ini. Oleh karena itu pemerintah Kota Serang telah menentukan upaya-upaya transformatif super prioritas atau disebut dengan *game changers* yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.7
Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)
Kota Serang

Transformasi Super Prioritas/<i>Game Changers</i>	Indikasi Kunci
1. Transformasi Sosial	1. Pendidikan a. Membangun Sekolah Unggul b. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan c. Transportasi Gratis Anak Sekolah d. Zero Anak Putus Sekolah 2. Kesehatan a. Peningkatan Kualitas dan pengembangan RSUD Kota Serang b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Sosial a. Penanganan Kemiskinan 4. Pemuda dan Olahraga a. Pembinaan Pemuda dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
2. Transformasi Ekonomi	1. Perdagangan a. Penataan Pasar b. Pembangunan Pasar Induk c. Revitalisasi Pasar Rau d. Penataan Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa e. Serang <i>Central Business District</i>/Kawasan perniagaan 2. UMKM a. Digitalisasi pelaku usaha b. Peningkatan Kemitraan 3. Ekonomi kreatif a. Pengembangan dan promosi produk Ekonomi Kreatif Unggulan b. Penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif

Transformasi Super Prioritas/Game Changers	Indikasi Kunci
	4. Pariwisata a. Pengembangan KPW Banten Lama b. Pembangunan Wisata Buatan c. Promosi Pariwisata d. Pengembangan wisata <i>heritage</i> e. Pembangunan Serang <i>Convention Center</i> 5. Investasi a. Peningkatan Daya Saing Investasi 6. Pertanian a. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian 7. Ketenagakerjaan a. Pembangunan Balai Latihan Kerja 8. Perluasan Peluang Kerja 9. Penanganan kemacetan
3. Transformasi Tata Kelola	1. Pelayanan publik a. Optimalisasi infrastruktur dan SDM Pelayanan publik b. Optimalisasi Barang Milik Daerah c. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
4. Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Pengendalian banjir a. Peningkatan Infrastruktur pengendalian banjir b. Penegakan dan pengawasan RTRW 2. Penanganan sampah a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Cilowong b. Optimalisasi TPS3R menuju pembangunan ekonomi sirkular c. Pengolahan Waste to Energy 3. Peningkatan sanitasi a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun b. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) 4. Pemenuhan akses air minum a. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum b. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Peningkatan Kualitas Permukiman a. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh b. Penataan Hunian Yang Ramah Lingkungan 6. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau a. Pemenuhan RTH

Tabel V.8
Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan
Kota Serang Tahun 2025-2045
Visi: Kota Serang MADANI sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	ARAH KEBIJAKAN			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis kualitas layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan	Kesehatan untuk Semua	1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,72	80,37	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Masyarakat Kota Serang yang unggul
			2) Kesehatan Ibu dan Anak:						
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	2				
			b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,30	6,00				
			3) Penanganan Tuberkulosis:						
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	96,17	100				
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95,09	100				
			4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,62	100				
	Meningkatkannya kualitas dan derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing global	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5) Hasil pembelajaran						
			a) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
			i) Literasi Membaca	36,14	71,66				
			ii) Numerasi	37,81	63,50				
			b) Persentase peserta didik yang mencapai standar						

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	ARAH KEBIJAKAN			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
			i) Literasi Membaca	53,74	72,38				
			ii) Numerasi	50,33	81,26				
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,99	12,00				
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42	16,00				
	Menurunnya tingkat kemiskinan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Perlindungan Sosial yang Adaptif	6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	14,00	30,61				
			7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,69	75,00				
			8) Tingkat Kemiskinan	5,55-6,17	0,54-0,04				
			9) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	65,49	95,00				
			10) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	6,00	10,00				
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Meningkatnya Pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi ekonomi, dan penurunan pengangguran	IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonom	11) Rasio PDRB perdagangan dan Jasa	70,00	72,00	Penguatan riset inovasi dan Pengembangan Industri Kreatif	Peningkatan produktivitas industri kreatif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Pemantapan ekonomi kreatif melalui jaringan rantai global dan ekspor	Kota Serang berpendapatan tinggi
			12) Pengembangan Pariwisata						
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,99	8,40				
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	1,62	5,62				
			c) Wisatawan domestik (Ribuan Orang)	8.490,59	8.690,59				

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	ARAH KEBIJAKAN			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			13) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	6,50	7,50				
			14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
			a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	1,13	7,75				
			a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah level kota (%)	5,33	10,00				
			b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,68	3,95				
			c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,10	1,20				
			d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	10,84	28,21				
			15) Tingkat Pengangguran Terbuka	6,43-7,00	5,00				
			16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,04	59,83				
			17) Indeks Inovasi Daerah	55,00	80,00				
		Penerapan Ekonomi Hijau	18) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
			a) PDRB sektor pertanian	5,13	5,67				
		Transformasi Digital	19) Indeks Masyarakat Digital	46,20	65,02				
			20) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,00-37,00	33,00-35,00				
	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi secara progresif menuju pangsa ekonomi internasional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	21) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	81,00	82,64				
			22) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,00-1,50	2,00				
		Stabilitas Ekonomi Makro	23) Tingkat Inflasi (%)	2-3	2±1				
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24) Indeks Reformasi Hukum	61,00	95,00	Kelengkapan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang	Kelengkapan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, bertualitas,	Kelengkapan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif,	Regulasi dan tata kelola yang
			25) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	5,00				

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	ARAH KEBELAJAKAN			
						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, masyarakat, dan TIK	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	36) Ketahanan energi, air, dan pangan						
			a) Ketahanan Energi						
			- Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	986,12	1,203,25				
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,10	1,05				
			c) Ketahanan Air						
			- Air yang diproduksi (m3)	6.158.592	19.595.520				
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	6,00	52,00				
			37) Indeks Risiko Bencana (IRB)	140,00	124,62-129,12				
			38) Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
			Tahunan	6,39	31,03				
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana publik yang ramah lingkungan	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Pemenuhan Infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai	Percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai	Pemantapan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan	Perwujudan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan
			a) Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	5,11	7,50				
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88,03	96,89				
			c) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	72,47	85,27				

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 menjadi instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Banten, dan pembangunan Kota Serang. RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kota Serang. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD Kota harus mengacu kepada RPJPN agar terdapat rujukan yang jelas, sinergi, dan menjamin keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan kebijakan RPJPN.

Dokumen RPJPD Kota Serang 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota periode tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJPD Kota Serang 2025-2045 ini secara umum telah memuat beberapa substansi yang antara lain: kaidah pelaksanaan, pembiayaan, manajemen risiko, serta mekanisme dan komunikasi publik

RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Kepala daerah terpilih (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah Kota dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah.
2. Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat dipahami secara mendalam serta

menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Serang, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang.
4. Pemerintah Kota Serang dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten, serta melakukan penyerasian ke dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
5. Dalam rangka mengimplementasikan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kota Serang sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kota Serang. Selain penyusunan dokumen perencanaan juga memerhatikan inklusi sosial, kesetaraan gender dan upaya keberlanjutan dalam pengambilan kebijakan.
6. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal nonpemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan nonpemerintah yang melakukan kegiatan di Kota Serang berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Serang untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi implementasi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.
7. Pemerintah Kota Serang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 melalui Bappeda Kota Serang.
8. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah

atau kebijakan pembangunan jangka panjang yang dipedomani.

Keberhasilan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 sangat tergantung komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kota Serang secara inklusif dan terbuka. Pelaksanaan pembangunan Kota Serang

LAMPIRAN METADATA RPJPD KOTA SERANG TAHUN 2025-2045

Pada bagian ini dijabarkan metadata Indikator yang digunakan dalam RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045. Metadata ini terdiri dari nama indikator, satuan indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data. Penjabaran masing-masing metadata adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita
Satuan	Juta Rupiah
Definisi Operasional	PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Formulasi Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{P}$ PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode
Interpretasi	Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	BPS

b. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan dan jasa yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan dan jasa = $\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$ PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa = Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor + Transportasi dan Pergudangan + Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum + Informasi dan Komunikasi + Jasa Keuangan dan Asuransi + Real Estate + Jasa Perusahaan + Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib + Jasa Pendidikan + Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial + Jasa lainnya
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dan jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

a. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk (sesuai perhitungan BPS) dikali 100%.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS

b. Indeks Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk.
Formulasi Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum f_i[Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan: f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.
Interpretasi	Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu
Sumber Data	BPS

c. Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Menghitung kontribusi perekonomian kota Serang terhadap Perekonomian Provinsi Banten
Formulasi Perhitungan	Produk Domestik Regional Bruto nominal (ADHB) Kota Serang dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto nominal (ADHB) Provinsi Banten (sesuai perhitungan BPS) dikali 100%.
Interpretasi	Semakin besar persentase Kontribusi PDRB kota Serang terhadap PDRB Provinsi Banten menandakan semakin besar peran kota Serang dalam perekonomian Provinsi Banten
Sumber Data	BPS

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	persentase perubahan PDRB riil (ADHK) suatu daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Formulasi Perhitungan	$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{\text{PDRB ADHK tahun } (n) - \text{PDRB ADHK tahun } (n - 1)}{\text{PDRB tahun } (n - 1)} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai LPE semakin tinggi maka perkembangan ekonomi semakin baik. Nilai positif menunjukkan bahwa ekonomi daerah sedang tumbuh atau mengalami ekspansi. Nilai negatif menunjukkan perekonomian mengalami kontraksi atau penurunan nilai selama periode tertentu.
Sumber Data	BPS

3. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.
Formulasi Perhitungan	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh KemenpanRB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120.
Interpretasi	Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik.
Sumber Data	Kementerian PAN-RB

melalui Visi Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan.

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

b. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Formulasi Perhitungan	The diagram illustrates the IDSD framework, which is composed of four main pillars, each with a set of indicators and a specific count: Lingkungan Pendukung (Supporting Environment): 34 indicators. This pillar includes indicators related to infrastructure, human resources, and innovation ecosystem. Sumber Daya Manusia (Human Resources): 8 indicators. This pillar includes indicators related to human resources, such as education and health. Pasar (Market): 12 indicators. This pillar includes indicators related to the market, such as trade and investment. Ekosistem Inovasi (Innovation Ecosystem): 10 indicators. This pillar includes indicators related to innovation, such as research and development.
Interpretasi	Semakin tinggi IDSD menggambarkan kondisi daya saing daerah dan faktor-faktor pendorong produktivitas yang membentuk daya saing suatu daerah semakin baik.
Sumber Data	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS

5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission
a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca pada empat sektor/sub sektor prioritas yaitu energi, AFOLU (<i>Agriculture Forest and Other Land Use</i>), limbah, dan IPPU (<i>Industrial Processes and Production Use</i>).
Formulasi Perhitungan	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu. Penurunan ini merupakan penurunan kumulatif.

	Intensitas emisi GRK (<i>ton CO₂e/2010 IDR</i>) $IEt = TEt / PDRBt$ IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO₂e/2010 IDR miliar</i>) TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO₂e</i>) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun <i>t</i> (<i>2010 IDR miliar</i>) <i>t</i> = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IEt = \frac{(IEt - IEBt)}{IEBt}$ %IEt = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO₂e/2010 IDR miliar</i>) IEBt = Intensitas emisi GRK <i>baseline</i> tahun <i>t</i> (<i>ton CO₂e/2010 IDR miliar</i>) <i>t</i> = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA). Emisi GRK adalah gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi.
Sumber Data	Aplikasi AKSARA BAPPENAS

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Formulasi Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Sedang : $50 \leq x < 70$ 4. Kurang : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

	tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatantambahan berupa: 1. IKU: Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA: Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK

Indikator Utama Pembangunan

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Formulasi Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Sumber Data	BPS

2. Kesehatan Ibu dan Anak

a. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Satuan	Kasus
Definisi Operasional	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan
Formulasi Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas

	pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3. Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4. Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu; 5. Kesadaran Masyarakat: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Pelaporan MPDN (Dinas Kesehatan)

b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita
Satuan	Persen
Definisi Operasional	<i>Stunting</i> (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$ b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$
Formulasi Perhitungan	1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen(%); 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) $\text{Prevalensi Stunting} = PAB(5)P + PAB(5)SP$ Keterangan : PAB(5) P = Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>) PAB(5) SP = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>)

Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>; 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

3. Penanganan Tuberkulosis

a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Formulasi Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu dikali 100%.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Pelaporan (Dinas Kesehatan)

b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Formulasi Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan dikali 100%
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Pelaporan (Dinas Kesehatan)

4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah
Formulasi Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage(UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan
Sumber Data	BPJS Kesehatan

5. Hasil Pembelajaran

a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:

i. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca
Satuan	Persen
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca semakin besar menggambarkan semakin besar level hasil belajar minimal.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ii. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi
Satuan	Persen

Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi semakin besar menggambarkan semakin besar level hasil belajar minimal.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

b) Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

i. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca

Nama Indikator	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Merupakan cakupan peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dibagi jumlah peserta didik di Kota Serang.
Formulasi Perhitungan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan Kota Serang yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dikali 100%.
Interpretasi	1. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing; 2. Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C); 3. Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)

ii. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi

Nama Indikator	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Merupakan cakupan peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dibagi jumlah peserta didik di Kota Serang.
Formulasi Perhitungan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan Kota Serang yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dikali 100%.
Interpretasi	1. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing; 2. Tingkat provinsi: pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB); 3. Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C); Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)

c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Nama Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani
Formulasi Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kota Serang tahun 2023 = 8,91 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Serang yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,91 tahun atau telah menamatkan kelas VIII. Menempuh pendidikan dimaknai: Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun.
Sumber Data	BPS

d) Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
Formulasi Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
Sumber Data	BPS

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif". Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	BPS

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
Satuan	Persen		
Definisi Operasional	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.		
	Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
	- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMLB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
	- Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang - umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan		

	menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi}}{\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun } T}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun } T}} \times 100\%$
Interpretasi	Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk (sesuai perhitungan BPS)
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS

9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja

	(Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun)
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100\%$ Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan

10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Penyandang disabilitas sedang masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan, berganti pakaian, dan membersihkan diri. Penyandang disabilitas sedang dapat direhabilitasi dan diberdayakan. Penyandang disabilitas berat tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
Formulasi Perhitungan	$\% PD_{\text{formal}} = \frac{\sum PD_{\text{formal}}}{\sum AKPD} \times 100\%$ PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas

Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

11. Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan dan jasa yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Perdagangan dan Jasa} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$ PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa = Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor + Transportasi dan Pergudangan + Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum + Informasi dan Komunikasi + Jasa Keuangan dan Asuransi + Real Estate + Jasa Perusahaan + Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib + Jasa Pendidikan + Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial + Jasa lainnya
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dan jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS

12. Pengembangan Pariwisata

a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang berkontribusi oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum
Formulasi Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kota Serang}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	BPS

b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Satuan	Ribu Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Serang
Formulasi Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kota Serang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata

c) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik
Satuan	Ribu Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan Domestik yang datang ke Kota Serang
Formulasi Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Domestik di Kota Serang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan Domestik di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata

13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 sub sektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Formulasi Perhitungan	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif = Jumlah PDRB Nominal 17 Sub sektor Ekonomi Kreatif Regional dibagi Total PDRB Nominal Regional dikali 100%

Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, <i>ceteris paribus</i> . Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata

14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD

a. i. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). • Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah

a. ii. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Level Kota (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah level kota
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik • Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perindustrian

b. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota)

c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Nominal daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota)

d. Return on Aset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Aset (ROA) BUMD
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Return On Aset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Aset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ Catatan: BUMD dalam hal ini adalah seluruh BUMD yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang dan tidak termasuk BUMD yang menjadi kewenangan

	Pemerintah Provinsi Banten.
Interpretasi	<i>Return On Aset (ROA)</i> merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan Keuangan BUMD, BPS

15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut
Sumber Data	Sakernas BPS

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Satuan	Persen

Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Sakernas BPS

17. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Satuan	Nilai Indeks
Definisi Operasional	Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola inovasi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kualitas inovasi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah.
Formulasi Perhitungan	Skala ini mencerminkan beberapa tingkatan kinerja inovasi, seperti: 1. Sangat Inovatif: Nilai indeks di atas 75 2. Inovatif: Nilai indeks antara 50 hingga 75 3. Cukup Inovatif: Nilai indeks antara 25 hingga 50 4. Kurang Inovatif: Nilai indeks di bawah 25
Interpretasi	Satuan dalam Indeks Inovasi Daerah umumnya dinyatakan dalam skala angka atau nilai indeks yang biasanya berkisar antara 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat inovasi daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional

18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Rasio PDRB Sektor Pertanian

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Rasio PDRB Nominal yang bersumber dari sektor Pertanian yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian terhadap PDRB Nominal Daerah
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Pertanian}}{\text{PDRB Kota Serang}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS

19. Indeks Masyarakat Digital

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital
Satuan	Nilai Indeks
Definisi Operasional	Indeks Masyarakat Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan, adopsi, dan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat suatu daerah atau negara. Indeks ini membantu menggambarkan kesiapan dan kematangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, baik di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pemerintahan.
Formulasi Perhitungan	Formulasi perhitungan Indeks Masyarakat Digital biasanya melibatkan penilaian dan pemberian bobot terhadap setiap dimensi utama yang relevan. 1. Menentukan Dimensi Utama Dimensi utama dari Indeks Masyarakat Digital dapat terdiri dari: • Akses Teknologi Digital (A) • Keterampilan Digital (K) • Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi (P) • Lingkungan Pendukung Digital (L) 2. Menentukan Indikator Setiap Dimensi Setiap dimensi memiliki beberapa indikator yang akan diukur. Misalnya: • Akses Teknologi Digital: Tingkat penetrasi internet, kepemilikan perangkat digital. • Keterampilan Digital: Tingkat literasi digital, kemampuan pemecahan masalah digital. • Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi: Persentase populasi yang menggunakan e-commerce, penggunaan media sosial. • Lingkungan Pendukung Digital: Adanya kebijakan dan regulasi digital, investasi dalam infrastruktur digital. 3. Menilai Setiap Indikator Setiap indikator diberikan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan. Nilai biasanya dinormalisasi agar semua indikator berada dalam skala yang sama, seperti 0 hingga 100. 4. Pemberian Bobot untuk Setiap Dimensi Setiap dimensi dan indikator diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya: • Akses Teknologi Digital: 30% • Keterampilan Digital: 25% • Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi: 25% • Lingkungan Pendukung Digital: 20% 5. Menghitung Skor Setiap Dimensi Skor setiap dimensi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai indikator yang sudah diberi bobot dalam dimensi tersebut.

	$\text{Skor Dimensi} = \sum (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$ 6. Menghitung Indeks Masyarakat Digital Total Indeks total dihitung dengan menjumlahkan skor dari setiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot dimensi masing-masing: $\text{Indeks Masyarakat Digital} = (\text{Skor A} \times \text{Bobot A}) + (\text{Skor K} \times \text{Bobot K}) + (\text{Skor P} \times \text{Bobot P}) + (\text{Skor L} \times \text{Bobot L})$ Setelah indeks dihitung, hasilnya bisa dinormalisasi untuk mendapatkan skala yang konsisten, misalnya antara 0 hingga 100.
Interpretasi	1. Sangat Tinggi (Indeks di atas 75) 2. Tinggi (Indeks antara 50 hingga 75) 3. Sedang (Indeks antara 25 hingga 50) 4. Rendah (Indeks di bawah 25)
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informasi

20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan <i>share</i> PMTB terhadap PRDB Total.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	BPS

21. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Satuan	Persen

Definisi Operasional	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Serang
Formulasi Perhitungan	$\text{Ekspor Barang dan Jasa} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	BPS

22. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Satuan	Persen
Definisi Operasional	1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah

23. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Formulasi Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

24. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional

Formulasi Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%; 4. Penataan database PUU, dengan bobot 15%
Interpretasi	Kategori Nilai/Angka Predikat 1. AA : >90 - 100 Istimewa 2. A : >80 - 90 Sangat Baik 3. BB : >70 - 80 Baik 4. B : >60 - 70 Cukup Baik 5. CC : >50 - 60 Cukup 6. C : >30 - 50 Buruk 7. D : 0 - 30 Sangat Buruk
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Satuan	Angka
Definisi Operasional	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Formulasi Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KepmenPANRB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

26. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Satuan	Angka

Definisi Operasional	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling
Formulasi Perhitungan	Penilaian oleh KemenPAN-RB dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut : Aspek Kebijakan Pelayanan (30%) Aspek Profesionalisme SDM (18%) Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15%) Inovasi (7%) dihitung dengan rumus : $\sum(\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
Interpretasi	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik : 0 - 1 = Gagal (F) 1,01 - 1,5 = Sangat Buruk (E) 1,51 - 2 = Buruk (D) 2,01 - 2,5 = Cukup (Dengan Catatan(C-)) 2,51 - 3 = Cukup (C) 3,01 - 3,5 = Baik (dengan Catatan (B-)) 3,51 - 4 = Baik (B) 4,01 - 4,5 = Sangat Baik (A-) 4,51 - 5 = Pelayanan Prima (A)
Sumber Data	Kementerian PAN-RB

27. Indeks Integritas Nasional

Nama Indikator	Indeks Integritas Nasional
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).
Formulasi Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitupula sebaliknya.
Sumber Data	Survey Penilaian Integritas KPK RI

28. a. Nilai Kota Peduli HAM

Nama Indikator	Nilai Kota Peduli HAM
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Nilai Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) adalah suatu indeks atau skor yang digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di suatu kota. Indeks ini mengukur bagaimana pemerintah kota memenuhi hak-hak dasar warganya, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, hak perlindungan hukum, dan hak partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Penilaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Formulasi Perhitungan	Skor Kota Peduli HAM diberikan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui survei, data lapangan, atau laporan tahunan kota. Setiap dimensi

	diberi skor dan bobot tertentu sesuai dengan kepentingannya, kemudian dihitung menjadi nilai total.
Interpretasi	1. Kota Sangat Peduli HAM (Indeks di atas 80): Kota secara aktif memenuhi dan melindungi hak-hak dasar warganya, memiliki layanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, serta menyediakan ruang partisipasi yang baik. 2. Kota Peduli HAM (Indeks 60-80): Kota telah cukup memenuhi kebutuhan HAM dengan layanan yang memadai, meski ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. 3. Kota Cukup Peduli HAM (Indeks 40-60): Kota telah memberikan sebagian perlindungan hak dasar, tetapi terdapat beberapa kekurangan yang signifikan. 4. Kota Kurang Peduli HAM (Indeks di bawah 40): Kota masih jauh dari standar HAM, dengan banyak kebutuhan hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi atau terlindungi.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

28. b. Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkara yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi

Nama Indikator	Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkara yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkara yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pelanggaran terhadap Perda yang berhasil diselesaikan melalui penindakan non yustisi dan yustisi oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total pelanggaran yang tercatat dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.
Formulasi Perhitungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda = $\left(\frac{\text{Jumlah Pelanggaran terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Pelanggaran Tercatat}} \right) \times 100\%$ Jumlah pelanggaran terselesaikan = jumlah pelanggaran yang diselesaikan melalui penindakan yustisi dan non yustisi
Interpretasi	• Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan tingkat penyelesaian yang sangat baik, artinya hampir semua pelanggaran Perda yang tercatat berhasil diselesaikan. Ini mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam penegakan peraturan dan penyelesaian kasus. • Persentase Sedang (50% - 80%): Menunjukkan tingkat penyelesaian yang cukup baik. Namun, masih ada sejumlah pelanggaran yang belum terselesaikan atau memerlukan perhatian lebih lanjut. • Persentase Rendah (di bawah 50%): Menunjukkan tingkat penyelesaian yang rendah, artinya masih banyak kasus pelanggaran yang belum tertangani dengan baik. Ini dapat menunjukkan perlunya

	perbaikan dalam proses penegakan peraturan atau penyelesaian kasus pelanggaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja

29. Angka Kriminalitas

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Satuan	Kasus
Definisi Operasional	Angka kriminalitas dihitung sebagai jumlah total kasus kejahatan yang dilaporkan atau dicatat oleh otoritas kepolisian atau lembaga terkait. Angka ini dapat mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, perampokan, kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, dan jenis tindak pidana lainnya. Angka kriminalitas sering kali dinyatakan dalam bentuk rasio per populasi, misalnya per 10.000 penduduk, untuk memungkinkan perbandingan yang lebih tepat antara wilayah dengan populasi berbeda.
Formulasi Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Kriminal}}{\text{Total Populasi}} \right) \times 10.000$
Interpretasi	• Angka Kriminalitas Tinggi: Menunjukkan tingkat kejadian kriminal yang tinggi, yang dapat mengindikasikan permasalahan keamanan atau ketertiban sosial di wilayah tersebut. • Angka Kriminalitas Sedang: Menunjukkan adanya kasus kriminal, tetapi dalam batas yang dianggap wajar atau rata-rata berdasarkan standar wilayah atau negara. • Angka Kriminalitas Rendah: Menunjukkan tingkat keamanan yang relatif baik, dengan sedikit kasus kejahatan yang tercatat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres

30. Hubungan Kerja Sama Antar Pemerintah Kota/ *Sister City*

Nama Indikator	Hubungan Kerja Sama Antar Pemerintah Kota/ <i>Sister City</i>
Satuan	Jumlah
Definisi Operasional	ukuran kuantitatif yang mencerminkan jumlah hubungan kerja sama formal yang telah terjalin antara pemerintah kota dengan kota lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam periode waktu tertentu. Hubungan ini biasanya diwujudkan melalui nota kesepahaman (MoU) atau bentuk dokumen resmi lainnya yang mencakup berbagai bidang kerja sama.
Formulasi Perhitungan	Jumlah Hubungan Kerja Sama Aktif = Jumlah MoU Aktif dalam Periode Tertentu
Interpretasi	Menunjukkan bahwa pemerintah kota secara aktif menjalin hubungan kerja sama dengan banyak kota lain, yang dapat mencerminkan komitmen terhadap pengembangan dan kolaborasi lintas wilayah.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

31. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.
Formulasi Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 sangat rendah; 20,01 – 40,00 rendah; 40,01 – 60,00 sedang; 60,01 – 80,00 tinggi; 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Kebudayaan

32. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Formulasi Perhitungan	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Agama

33. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga direpresentasikan oleh iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) yang merupakan pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
Formulasi Perhitungan	Penghitungan iBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah-langkah penghitungan iBangga: 1. Menghitung nilai agregasi masing-masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. Menghitung skor di setiap dimensi; 3. Menghitung iBangga
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; • iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; • iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Sumber Data	BKKBN

34. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi
Formulasi Perhitungan	Langkah penghitungan IKG (sumber BPS): 1. Menghitung Indeks Antardimensi untuk Perempuan dan Laki-laki (Geometrik); 2. Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki; 3. Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik); 4. Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata-rata Geometrik dari rata-rata Aritmatik); 5. Menghitung Nilai IKG
Interpretasi	Nilai IKG berkisar antara 0-1. Semakin kecil angka IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara)
Sumber Data	BPS

35. Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Formulasi Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Sedang : $50 \leq x < 70$ 4. Kurang : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa: 1. IKU: Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA: Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks

	pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Formulasi Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR

c. Pengelolaan Sampah
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: 1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dan sebagainya; 2. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat,

	bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Formulasi Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = $\left[\frac{\text{Jumlah Pendaaran Ulang Sampah (data IIc) + Pengolahan (data III f)}}{\text{Timbulan Sampah (data I)}} \right] \times 100$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
Sumber Data	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

36. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan

a. Ketahanan Energi

Konsumsi Listrik per Kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita
Satuan	Kwh
Definisi Operasional	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Formulasi Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Formulasi Perhitungan	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan $PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minumum Dietary Energy Requirement</i>) f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS

c. Ketahanan Air

- Air yang diproduksi

Nama Indikator	Air yang diproduksi
Satuan	(m3)
Definisi Operasional	Air baku yang telah di proses melalui pengolahan sesuai standar baku mutu air minum.
Formulasi Perhitungan	Total jumlah air baku yang di produksi
Interpretasi	Semakin banyak air yang diproduksi maka semakin banyak air yang di salurkan kepada masyarakat
Sumber Data	Perumdam Tirta Madani dan Dinas PUPR

- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>onpremises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023

Formulasi Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kinerja fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS PDAM

37. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Formulasi Perhitungan	$\text{Risiko} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$
Interpretasi	Pembagian kelas risiko berdasarkan angka: 1. IRB < 13 adalah rendah 2. IRB 13 - 144 adalah sedang 3. IRB > 144 adalah tinggi Keterangan: Berdasarkan Surat BNPB No. B-009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;

	3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Sumber Data	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun

38. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah.
Formulasi Perhitungan	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu
Interpretasi	Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA)
Sumber Data	Aplikasi AKSARA BAPPENAS

39. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan

a. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Proporsi kontribusi perekonomian Kota Serang terhadap Perekonomian Provinsi Banten
Formulasi Perhitungan	Produk Domestik Regional Bruto Nominal Kota Serang dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto Nominal Provinsi Banten
Interpretasi	Semakin besar persentase Kontribusi PDRB Kota Serang terhadap PDRB Provinsi Banten menandakan semakin besar peran Kota Serang dalam perekonomian Provinsi Banten
Sumber Data	BPS

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Satuan	Persen
Definisi Operasional	Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m²; Memiliki akses air minum layak; Memiliki akses sanitasi layak
Formulasi Perhitungan	Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (Proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT} \times 100\%$ PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS

c. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Satuan	Nilai Indeks
Definisi Operasional	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau pihak terkait di suatu daerah. Indeks ini

	mencerminkan persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur, termasuk aspek seperti keandalan, kemudahan akses, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Formulasi Perhitungan	1. Dimensi utama yang umum dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur meliputi: • Kualitas Infrastruktur: Seperti kualitas fisik dan keandalan infrastruktur. • Ketersediaan Infrastruktur: Seperti ketersediaan jalan, air bersih, dan listrik. • Aksesibilitas: Kemudahan akses masyarakat ke infrastruktur. • Pemeliharaan dan Keberlanjutan: Konsistensi dalam pemeliharaan agar infrastruktur tetap berfungsi optimal. • Dampak Sosial dan Ekonomi: Pengaruh infrastruktur terhadap kesejahteraan dan kegiatan ekonomi. 2. Setiap dimensi dibagi menjadi beberapa indikator yang akan diukur. Misalnya: • Kualitas Infrastruktur: Penilaian kondisi jalan, jembatan, atau gedung. • Ketersediaan Infrastruktur: Persentase penduduk dengan akses ke listrik atau air bersih. • Aksesibilitas: Kemudahan dan kecepatan akses ke infrastruktur umum. • Pemeliharaan: Frekuensi perbaikan atau perawatan infrastruktur. • Dampak Sosial dan Ekonomi: Persepsi masyarakat tentang manfaat infrastruktur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengumpulan Data dan Pemberian Nilai pada Setiap Indikator • Data dikumpulkan dari survei, kuesioner, atau data lapangan. • Skor diberikan untuk setiap indikator menggunakan skala, misalnya 1 (sangat tidak puas) hingga 5 (sangat puas). 4. Setiap dimensi diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, misalnya: • Kualitas Infrastruktur: 30% • Ketersediaan Infrastruktur: 25% • Aksesibilitas: 20% • Pemeliharaan dan Keberlanjutan: 15% • Dampak Sosial dan Ekonomi: 10% 5. Skor dimensi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai indikator yang telah diberi bobot pada dimensi tersebut. $\text{Skor Dimensi} = \sum (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$ 6. Indeks total dihitung dengan menjumlahkan skor setiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot dimensi masing-masing.

Interpretasi	Bobot Nilai: 1. Sangat Puas (Indeks di atas 80) 2. Puas (Indeks antara 60 hingga 80) 3. Cukup Puas (Indeks antara 40 hingga 60) 4. Tidak Puas (Indeks di bawah 40)
Sumber Data	Bappeda